LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2011
(Audited)

BAGIAN ANGGARAN (022)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Perhubungan adalah salah satu Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2011 *(audited)* adalah sebesar Rp. 1.442.751.670.667,- atau 389,53 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2011. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp. 20.110.043.233.814,- atau 86,16 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA TA 2011.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp.139.260.331.934.285,- dan Kewajiban sebesar Rp. 161.634.624.499,- sehingga Ekuitas Dana Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2011 *(audited)* adalah sebesar Rp. 139.098.697.309.786,-.

3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

4. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 ini berstatus sebagai laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK-RI *(Audited).*

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011 *(Audited)* ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).* Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, Mei 2012

MENTERI PERHUBUNGAN

E. E MANGINDAAN

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Indeks Tabel	vi
Indeks Grafik	ix
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	x
Pernyataan Tanggung Jawab	
I. Ringkasan	1-2
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRAKT perbandingan 2011 dan 2010) *audited*	3-4
III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2011 dan 2010) *audited*	5-6
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
A.1. Dasar Hukum	7
A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Negara/Lembaga	7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	25
A.4. Kebijakan Akuntansi	29
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	37
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	38
B.3. Catatan Penting Lainnya	55
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1. Penjelasan Umum Neraca	69
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	70
C.3. Catatan Penting Lainnya	109
D. Pengungkapan Penting Lainnya	
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI	114
D.2. Rekening Pemerintah	121
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	122

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 65/PB/2010;

- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Belanja
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

Laporan Barang Pengguna;

- Laporan Barang Pengguna Tahunan

Lampiran Laporan Ikhtisar Badan Layanan Umum (BLU);

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Berbasis Akrual;

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Kementerian Perhubungan Tahun 2011 *(Audited)* dan Tahun 2010 *(Audited)* 24
2. Realisasi Belanja Berdasarkan Program Kementerian Perhubungan Tahun 2011 24
3. Rincian Anggaran Satker BLU 26
4. Rekapitulasi Jumlah Satker yang Menyampaikan Laporan Keuangan Per Eselon I 27
5. Rekapitulasi Jumlah Satker yang Menyampaikan Laporan SIMAK BMN Per Eselon I 29
6. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan *netto* Tahun 2011 *(Audited)* 37
7. Realisasi PNBP *netto* Tahun 2011 *(Audited)* dan Tahun 2010 *(Audited)* Menurut Tingkat Eselon I 39
8. Realisasi Pendapatan BLU 2011 (dalam Rupiah) 44
9. Perbandingan Realisasi Tahun 2011 dan Tahun 2010 (dalam Rupiah) 44
10. Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2011 Berdasarkan Satker (dalam Rupiah) 45
11. Realisasi Belanja *Netto* Tahun 2011 *(Audited)* dan Tahun 2010 *(Audited) Netto* Menurut Tingkat Eselon I 50
12. Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2011 *(Audited)* dan Tahun 2010 *(Audited)* 52
13. Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun 2011 *(Audited)* dan Tahun 2010 *(Audited)* 52
14. Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2011 *(Audited)* dan Tahun 2010 *(Audited)* 53
15. Komposisi Neraca per 31 Desember 2011 *(Audited)* 69
16. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I 70
17. Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010 *(Audited)* 71
18. Penyetoran Saldo per 31 Desember 2011 *(Audited)* 71
19. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I 71
20. Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010 *(Audited)* 72
21. Penyetoran Saldo per 31 Desember 2011 *(Audited)* 72
22. Pungutan Diluar Mekanisme APBN yang Belum Disetor ke Kas Negara 72
23. Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I 73
24. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 74
25. Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010 Ke Kas Negara 74
26. Pembayaran Saldo Kas per 31 Desember 2010 Kepada Pihak Lain 74
27. Penyetoran Saldo per 31 Desember 2011 Ke Kas Negara 74
28. Pembayaran Saldo Kas per 31 Desember 2011 Kepada Pihak Lain 75

29. Besarnya Saldo Kas pada Masing-Masing BLU 77
30. Piutang Bukan Pajak per Eselon I 76
31. Daftar Klasifikasi Piutang Kementerian Perhubungan 78
32. Rekapitulasi Umur Piutang Tahun Anggaran 2011 79
33. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Per Eselon I 79
34. Piutang Bukan Pajak (Netto) per Eselon I 80
35. Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I 80
36. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I 81
37. Bagian Lancar TP/TGR *(Netto)* per Eselon I 81
38. Uang Muka Belanja per Eselon I 81
39. Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per Eselon I 82
40. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional BLU per Eselon I 83
41. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU *(Netto)* 83
42. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU 83
43. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU 84
44. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU *(Netto)* 84
45. Rincian Persediaan per Eselon I 84
46. Rincian Persediaan Masing-Masing Satker pada Badan Layanan Umum 85
47. Daftar Persediaan per 31 Desember 2011 *(Audited)* 85
48. Posisi Aset Tetap 86
49. Posisi Aset Tetap Badan Layanan Umum 86
50. Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2011 87
51. Perbedaan SIMAK BMN dan SAKPA pada Ditjen Perhubungan Laut 88
52. Rincian Mutasi Tanah 89
53. Rincian Tanah per Eselon I 89
54. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin 92
55. Rincian Peralatan dan Mesin per Eselon I 92
56. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan 93
57. Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I 93
58. Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan 94
59. Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per Eselon I 94
60. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya 95
61. Rincian Aset Tetap Lainnya per Eselon I 96
62. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan menurut Jenisnya 96
63. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 96
64. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per Eselon I 97

65. Rincian Aset Lainnya per Eselon I 98
66. Aset Lainnya Menurut Jenisnya 98
67. Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Eselon I 98
68. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR per Eselon I 99
69. Tagihan TP/TGR per Eselon I 99
70. Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I 100
71. Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I 100
72. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Eselon I 101
73. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Eselon I 103
74. Pendapatan Diterima di Muka 103
75. Rincian Uang Muka dari KPPN per Eselon I 103
76. Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan per Eselon I 104
77. Rincian Cadangan Piutang per Eselon I 104
78. Rincian Cadangan Persediaan per Eselon I 105
79. Rincian Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per Eselon I 105
80. Rincian Dana Lancar pada Satker BLU 105
81. Dana Lancar Lainnya per Eselon I 106
82. Barang/Jasa yang Harus Diterima per Eselon I 106
83. Barang/Jasa yang Harus Diserahkan per Eselon I 107
84. Rincian Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per Eselon I 107
85. Rincian Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per Eselon I 108

DAFTAR GRAFIK

Halaman

1. Realisasi Pendapatan Tahun 2011 *(Audited)* dan 2010 (*Audited*) per Jenis Penerimaan 38
2. Realisasi PNBP Tahun 2011 *(Audited)* dan 2010 *(Audited*) Menurut Jenisnya (dalam Miliar Rupiah) 43
3. Komposisi Alokasi Belanja TA 2011 *(Audited)* dan 2010 *(Audited*) 50
4. Komposisi Realisasi Belanja ***Netto*** Menurut Jenis Belanja TA 2011 51
5. Komposisi Neraca 69
6. Posisi Aset Tetap 86

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Halaman

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	38
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	39
Catatan	B.2.1.2.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	43
Catatan	B.2.1.2.3	Pendapatan BLU	45

Belanja Negara

Catatan	B.2.2	Belanja Negara	50
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat	51
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	52
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	52
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	53
Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	54

NERACA

ASET

Aset Lancar

Catatan	C.2.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	70
Catatan	C.2.2	Kas di Bendahara Penerimaan	71
Catatan	C.2.3	Kas Lainnya dan setara Kas	73
Catatan	C.2.4	Kas Pada Badan Layanan Umum (BLU)	76
Catatan	C.2.5	Piutang Bukan Pajak	76
Catatan	C.2.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	79
Catatan	C.2.7	Piutang Bukan Pajak (*Netto)*	80
Catatan	C.2.8	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	80
Catatan	C.2.9	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan TP-TGR	81
Catatan	C.2.10	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (*netto)*	81
Catatan	C.2.11	Uang Muka Belanja	81
Catatan	C.2.12	Piutang Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	82
Catatan	C.2.13	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	82
Catatan	C.2.14	Piutang Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum *(Netto)*	83

Catatan	C.2.15	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	83
Catatan	C.2.16	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	83
Catatan	C.2.17	Piutang Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum *(Netto)*	84
Catatan	C.2.18	Persediaan	84
	Aset Tetap		
Catatan	C.2.19	Aset Tetap	85
Catatan	C.2.19.1	Tanah	88
Catatan	C.2.19.2	Peralatan dan Mesin	92
Catatan	C.2.19.3	Gedung dan Bangunan	93
Catatan	C.2.19.4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	94
Catatan	C.2.19.5	Aset Tetap Lainnya	95
Catatan	C.2.19.6	Konstruksi Dalam pengerjaan	96
	Aset Lainnya		
Catatan	C.2.20	Aset Lainnya	98
Catatan	C.2.20.1	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	98
Catatan	C.2.20.2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP TGR	99
Catatan	C.2.20.3	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi *netto*	99
Catatan	C.2.20.4	Aset Tak Berwujud	99
Catatan	C.2.20.5	Aset Lain-lain	100
KEWAJIBAN			
	Kewajiban Jangka Pendek		
Catatan	C.2.21	Utang kepada Pihak Ketiga	101
Catatan	C.2.22	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	102
Catatan	C.2.23	Pendapatan Diterima Dimuka	103
Catatan	C.2.24	Uang Muka dari KPPN	103
Catatan	C.2.25	Pendapatan yang Ditangguhkan	104
EKUITAS			
	Ekuitas Dana Lancar		
Catatan	C.2.26	Cadangan Piutang	104
Catatan	C.2.27	Cadangan Persediaan	104
Catatan	C.2.28	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	105

Catatan	C.2.29	Dana Lancar BLU	105
Catatan	C.2.30	Dana Lancar Lainnya	106
Catatan	C.2.31	Barang/Jasa Yang Harus Diterima	106
Catatan	C.2.32	Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	107
	Ekuitas Dana Investasi		
Catatan	C.2.33	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	107
Catatan	C.2.34	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	107

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan (BA 022) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 *(Audited)* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2012

MENTERI PERHUBUNGAN

E.E MANGINDAAN

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011 *(Audited)* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011 *(Audited)* ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Perhubungan dan disusun secara berjenjang.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.442.751.670.667,- atau 389,53 persen dari anggarannya.

Realisasi Belanja Tahun 2011 adalah sebesar sebesar Rp. 20.110.043.233.814,- atau 86,16 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari Realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 19.442.717.151.571,- atau 89,90 persen dari anggarannya serta Realisasi Belanja Pinjaman dan hibah sebesar Rp. 667.326.082.243 ,- atau 38,92 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 *(Audited)* dan 2010 *(Audited)* dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	31 Desember 2011 *(Audited)*		**31 Desember 2010 *(Audited)***	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	370.383.536.750	1.442.751.670.667	790.021.618.357	917.409.760.257
Belanja Rupiah Murni	21.626.158.865.000	19.442.717.151.571	16.050.293.551.000	14.561.133.126.465
Belanja Pinjaman dan Hibah	1.714.543.757.000	667.326.082.243	1.845.261.356.000	1.000.946.215.469
Jumlah Belanja	23.340.702.622.000	20.110.043.233.814	17.895.554.907.000	15.562.079.341.934

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Kementerian/Lembaga mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2011.

Jumlah Aset per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 139.260.331.934.285,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 1.083.421.312.189,- Aset Tetap sebesar Rp 135.489.192.929.555,- dan Aset Lainnya sebesar Rp 2.687.717.692.541,-.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 161.634.624.499,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 161.634.624.499,-.

Sementara itu Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 139.098.697.309.786,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 921.786.687.690,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 138.176.910.622.096,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 2010 (*Audited)* dapat disajikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

	31 Desember 2011 *(Audited)*	31 Desember 2010 *(Audited)*	Nilai kenaikan/ (penurunan)
Aset	**139.260.331.934.285**	**80.007.078.957.656**	**59.253.252.976.629**
Aset Lancar	1.083.421.312.189	1.723.628.795.671	(640.207.483.482)
Aset Tetap	135.489.192.929.555	76.948.072.224.400	58.541.120.705.155
Aset Lainnya	2.687.717.692.541	1.335.377.937.585	1.352.339.754.956
Kewajiban	161.634.624.499	486.495.561.796	(324.860.937.297)
Kewajiban Jangka Pendek	161.634.624.499	486.495.561.796	(324.860.937.297)
Ekuitas Dana	139.098.697.309.786	79.520.583.395.860	59.578.113.913.926
Ekuitas Dana Lancar	921.786.687.690	1.237.133.233.875	(315.346.546.185)
Ekuitas Dana Investasi	138.176.910.622.096	78.283.450.161.985	59.893.460.460.111
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	**139.260.331.934.285**	**80.007.078.957.656**	**59.253.252.976.629**

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	URAIAN	2011				2010			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	370,383,536,750	1,442,751,670,667	1,072,368,133,917	389.53	790,021,618,357	917,409,760,257	127,388,141,900	116.12
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	370,383,536,750	1,442,751,670,667	1,072,368,133,917	389.53	790,021,618,357	917,409,760,257	127,388,141,900	116.12
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	370,383,536,750	1,442,751,670,667	1,072,368,133,917	389.53	790,021,618,357	917,409,760,257	127,388,141,900	116.12
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1	PENERIMAAN NEGARA NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.a	Penerimaan Perpajakan Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.2	HIBAH NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)	370,383,536,750	1,442,751,670,667	1,072,368,133,917	389.53	790,021,618,357	917,409,760,257	127,388,141,900	116.12
B	BELANJA NEGARA								
B.I	BELANJA TRANSAKSI KAS	23,340,702,622,000	20,110,043,233,814	(3,230,659,388,186)	86.16	17,895,554,907,000	15,562,079,341,934	(2,333,475,565,066)	86.96
B.I.1	Rupiah Murni	21,626,158,865,000	19,442,717,151,571	(2,183,441,713,429)	89.90	16,050,293,551,000	14,561,133,126,465	(1,489,160,424,535)	90.72
B.I.1.a	Belanja Pegawai	1,378,885,219,000	1,326,418,456,631	(52,466,762,369)	96.19	1,279,373,663,000	1,158,162,941,133	(121,210,721,867)	90.53
B.I.1.b	Belanja Barang	4,162,892,362,000	3,516,506,945,874	(646,385,416,126)	84.47	3,199,719,542,000	2,696,211,721,291	(503,507,820,709)	84.26
B.I.1.c	Belanja Modal	16,084,381,284,000	14,599,791,749,066	(1,484,589,534,934)	90.77	11,571,200,346,000	10,706,758,464,041	(864,441,881,959)	92.53
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	1,714,543,757,000	667,326,082,243	(1,047,217,674,757)	38.92	1,845,261,356,000	1,000,946,215,469	(844,315,140,531)	54.24
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.b	Belanja Barang	8,534,349,000	2,714,986,310	(5,819,362,690)	31.81	4,305,011,000	1,419,565,100	(2,885,445,900)	32.97
B.I.2.c	Belanja Modal	1,706,009,408,000	664,611,095,933	(1,041,398,312,067)	38.96	1,840,956,345,000	999,526,650,369	(841,429,694,631)	54.29
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap. : LRAKT
Tanggal : 05 Mei 2012
Halaman : 2
Prog Id : lu_pauait

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	URAIAN	2011				2010			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.II	BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.1	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.2	Belanja Barang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.3	Belanja Modal Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.4	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.5	Subsidi Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.6	Hibah Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.7	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.8	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)	23,340,702,622,000	20,110,043,233,814	(3,230,659,388,186)	86.16	17,895,554,907,000	15,562,079,341,934	(2,333,475,565,066)	86.96
C	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Jakarta, Mei 2012

MENTERI PERHUBUNGAN

E. E MANGINDAAN

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011 *(Audited)* dan 2010 (*Audited*)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2011 (*Audited*)			31 DESEMBER 2010 (*Audited*)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah					
I. Penerimaan Perpajakan		0	0	0,00	0
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak		370.383.536.750	1.442.751.670.667	389,53	917.409.760.257
III. Penerimaan Hibah		0	0	0,00	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II)		**370.383.536.750**	**1.442.751.670.667**	**389,53**	**917.409.760.257**
B. Belanja Negara					
I. Belanja Rupiah Murni		**21.626.158.865.000**	**19.442.717.151.571**	**89,90**	**14.561.133.126.465**
1. Belanja Pegawai		1.378.885.219.000	1.326.418.456.631	96,19	1.158.162.941.133
2. Belanja Barang		4.162.892.362.000	3.516.506.945.874	84,47	2.696.211.721.291
3. Belanja Modal		16.084.381.284.000	14.599.791.749.066	90,77	10.706.758.464.041
4. Pembayaran Bunga Utang		0	0	0,00	0
5. Subsidi		0	0	0,00	0
6. Hibah		0	0	0,00	0
7. Bantuan Sosial		0	0	0,00	0
8. Belanja Lain-lain		0	0	0,00	0

II. Pinjaman dan Hibah	**1.714.543.757.000**	**667.326.082.243**	**38,92**	**1.000.946.215.469**
1. Belanja Pegawai	0	0	0,00	0
2. Belanja Barang	8.534.349.000	2.714.986.310	31,81	1.419.565.100
3. Belanja Modal	1.706.009.408.000	664.611.095.933	38,96	999.526.650.369
4. Pembayaran Bunga Utang	0	0	0,00	0
5. Subsidi	0	0	0,00	0
6. Hibah	0	0	0,00	0
7. Bantuan Sosial	0	0	0,00	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja	**23.340.702.622.000**	**20.110.043.233.814**	**86,16**	**15.562.079.341.934**
C. Pembiayaan				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	0	0	0,00	0
1. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0,00	0
2. Non Perbankan Dalam Negeri	0	0	0,00	0
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	0	0	0,00	0
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	0	0	0,00	0
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0,00	0
Jumlah Pembiayaan (C.I + C.II)	0	0	0,00	0

III. NERACA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2011 *(Audited)* DAN 2010 *(Audited)*

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2011 *(Audited)*	31 DESEMBER 2010 *(Audited)*
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran		473.989.973	854.093.528
Kas di Bendahara Penerimaan		10.024.539.870	345.809.190.529
Kas Lainnya dan Setara Kas		1.873.343.972	126.491.895
Kas pada Badan Layanan Umum		132.850.346.828	93.038.372.556
Jumlah Kas dan Bank		145.222.220.643	439.828.148.508
Piutang			
Piutang Bukan Pajak		187.044.736.967	222.641.909.452
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak		(253.331.744)	0
Piutang Bukan Pajak (Netto)		*186.791.405.223*	*222.641.909.452*
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi		46.170.400	6.308.896.481
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		(230.852)	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		*45.939.548*	*6.308.896.481*
Uang Muka Belanja		511.735.738	3.372.081.629
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum		409.502.500	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum		(41.909.700)	0
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Netto)		*367.592.800*	0
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum		62.895.200	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum		(314.476)	0
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (Netto)		*62.580.724*	0
Jumlah Piutang		187.779.254.033	232.322.887.562
Persediaan			
Persediaan		749.249.628.830	1.050.708.835.328
Persediaan Badan Layanan Umum		1.170.208.683	768.924.273
Jumlah Persediaan		750.419.837.513	1.051.477.759.601
Jumlah Aset Lancar		**1.083.421.312.189**	**1.723.628.795.671**
Aset Tetap			
Tanah		49.298.586.833.502	14.677.800.582.743
Peralatan dan Mesin		13.345.181.983.197	9.931.624.671.639
Gedung dan Bangunan		5.578.033.760.765	6.990.892.130.747
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		47.945.880.057.181	31.688.821.624.773
Aset Tetap Lainnya		2.291.839.981.600	1.904.414.529.788
Konstruksi Dalam Pengerjaan		13.861.192.285.655	9.879.614.271.189
Tanah Badan Layanan Umum		1.223.489.280.480	1.065.197.712.958
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum		643.140.909.230	335.420.378.662
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum		1.199.196.156.350	433.894.968.413
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum		38.866.982.003	14.244.555.248

Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	11.326.948.158	4.861.299.540
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	52.457.751.434	21.285.498.700
Jumlah Aset Tetap	**135.489.192.929.555**	**76.948.072.224.400**
Aset Lainnya		
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	423.135.811	489.841.857
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1.312.745)	0
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	*421.823.066*	*489.841.857*
Aset Tak Berwujud	1.465.590.727.842	1.174.669.428.410
Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum	24.093.295.916	15.999.395.216
Aset Lain-lain	1.197.499.645.717	140.916.739.823
Aset Lain-lain Badan Layanan Umum	112.200.000	3.302.532.279
Jumlah Aset Lainnya	**2.687.717.692.541**	**1.335.377.937.585**
JUMLAH ASET	**139.260.331.934.285**	**80.007.078.957.656**
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Kepada Pihak Ketiga	131.518.928.284	139.725.858.192
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	116.103.388	0
Pendapatan Diterima Dimuka	19.480.696.134	12.249.090
Uang Muka dari KPPN	473.989.973	854.093.528
Pendapatan Yang Ditangguhkan	10.044.906.720	345.903.360.986
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**161.634.624.499**	**486.495.561.796**
JUMLAH KEWAJIBAN	**161.634.624.499**	**486.495.561.796**
EKUITAS DANA		
Ekuitas Dana Lancar		
Cadangan Piutang	187.267.518.295	228.950.805.933
Cadangan Persediaan	750.419.837.513	1.051.477.759.601
Dana yhd Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(131.633.900.472)	(139.693.536.754)
Dana Lancar Badan Layanan Umum	132.850.346.828	93.038.372.556
Dana Lancar Lainnya	1.851.845.922	0
Barang/Jasa Yang Harus Diterima	511.735.738	3.372.081.629
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	(19.480.696.134)	(12.249.090)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	**921.786.687.690**	**1.237.133.233.875**
Ekuitas Dana Investasi		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	135.489.192.929.555	76.948.072.224.400
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	2.687.717.692.541	1.335.377.937.585
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	**138.176.910.622.096**	**78.283.450.161.985**
EKUITAS DANA NETO	**139.098.697.309.786**	**79.520.583.395.860**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**139.260.331.934.285**	**80.007.078.957.656**

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2011	2010	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	473,989,973	854,093,528	(380,103,555)	(44.50)
Kas di Bendahara Penerimaan	10,024,539,870	345,809,190,529	(335,784,650,659)	(97.10)
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,873,343,972	126,491,895	1,746,852,077	1,380.99
Kas pada Badan Layanan Umum	132,850,346,828	93,038,372,556	39,811,974,272	42.79
Piutang Bukan Pajak	187,044,736,967	222,641,909,452	(35,597,172,485)	(15.98)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(253,331,744)	0	(253,331,744)	0.00
Piutang Bukan Pajak (Netto)	*186,791,405,223*	*222,641,909,452*	*(35,850,504,229)*	*(16.10)*
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	46,170,400	6,308,896,481	(6,262,726,081)	(99.26)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(230,852)	0	(230,852)	0.00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	*45,939,548*	*6,308,896,481*	*(6,262,956,933)*	*(99.27)*
Uang muka belanja	511,735,738	3,372,081,629	(2,860,345,891)	(84.82)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	409,502,500	0	409,502,500	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(41,909,700)	0	(41,909,700)	0.00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	*367,592,800*	*0*	*367,592,800*	*0.00*
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	62,895,200	0	62,895,200	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(314,476)	0	(314,476)	0.00
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	*62,580,724*	*0*	*62,580,724*	*0.00*
Persediaan	749,249,628,830	1,050,708,835,328	(301,459,206,498)	(28.69)
Persediaan Badan Layanan Umum	1,170,208,683	768,924,273	401,284,410	52.18
JUMLAH ASET LANCAR	**1,083,421,312,189**	**1,723,628,795,671**	**(640,207,483,482)**	**(37.14)**
ASET TETAP				
Tanah	49,298,586,833,502	14,677,800,582,743	34,620,786,250,759	235.87
Peralatan dan Mesin	13,345,181,983,197	9,931,624,671,639	3,413,557,311,558	34.37
Gedung dan Bangunan	5,578,033,760,765	6,990,892,130,747	(1,412,858,369,982)	(20.20)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	47,945,880,057,181	31,688,821,624,773	16,257,058,432,408	51.30
Aset Tetap Lainnya	2,291,839,981,600	1,904,414,529,788	387,425,451,812	20.34
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13,861,192,285,655	9,879,614,271,189	3,981,578,014,466	40.30
Tanah Badan Layanan Umum	1,223,489,280,480	1,065,197,712,958	158,291,567,522	14.86
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	643,140,909,230	335,420,378,662	307,720,530,568	91.74
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	1,199,196,156,350	433,894,968,413	765,301,187,937	176.37

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2011	2010	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum	38,866,982,003	14,244,555,248	24,622,426,755	172.85
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	11,326,948,158	4,861,299,540	6,465,648,618	133.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	52,457,751,434	21,285,498,700	31,172,252,734	146.44
JUMLAH ASET TETAP	**135,489,192,929,555**	**76,948,072,224,400**	**58,541,120,705,155**	**76.07**
ASET LAINNYA				
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	423,135,811	489,841,857	(66,706,046)	(13.61)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1,312,745)	0	(1,312,745)	0.00
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	*421,823,066*	*489,841,857*	*(68,018,791)*	*(13.88)*
Aset Tak Berwujud	1,465,590,727,842	1,174,669,428,410	290,921,299,432	24.76
Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum	24,093,295,916	15,999,395,216	8,093,900,700	50.58
Aset Lain-lain	1,197,499,645,717	140,916,739,823	1,056,582,905,894	749.79
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	112,200,000	3,302,532,279	(3,190,332,279)	(96.60)
JUMLAH ASET LAINNYA	**2,687,717,692,541**	**1,335,377,937,585**	**1,352,339,754,956**	**101.27**
JUMLAH ASET	**139,260,331,934,285**	**80,007,078,957,656**	**59,253,252,976,629**	**101.27**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	131,518,928,284	139,725,858,192	(8,206,929,908)	(5.87)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	116,103,388	0	116,103,388	0.00
Pendapatan Diterima di Muka	19,480,696,134	12,249,090	19,468,447,044	**,***.**
Uang Muka dari KPPN	473,989,973	854,093,528	(380,103,555)	(44.50)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	10,044,906,720	345,903,360,986	(335,858,454,266)	(97.09)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**161,634,624,499**	**486,495,561,796**	**(324,860,937,297)**	**(66.77)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**161,634,624,499**	**486,495,561,796**	**(324,860,937,297)**	**(66.77)**
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang	187,267,518,295	228,950,805,933	(41,683,287,638)	(18.20)
Cadangan Persediaan	750,419,837,513	1,051,477,759,601	(301,057,922,088)	(28.63)
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(131,633,900,472)	(139,693,536,754)	8,059,636,282	(5.76)
Dana Lancar BLU	132,850,346,828	93,038,372,556	39,811,974,272	42.79
Dana Lancar Lainnya	1,851,845,922	0	1,851,845,922	0.00
Barang/Jasa Yang Harus Diterima	511,735,738	3,372,081,629	(2,860,345,891)	(84.82)
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	(19,480,696,134)	(12,249,090)	(19,468,447,044)	**,***.**
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	**921,786,687,690**	**1,237,133,233,875**	**(315,346,546,185)**	**(25.49)**
EKUITAS DANA INVESTASI				

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2011	2010	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	135,489,192,929,555	76,948,072,224,400	58,541,120,705,155	76.07
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	2,687,717,692,541	1,335,377,937,585	1,352,339,754,956	101.27
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	**138,176,910,622,096**	**78,283,450,161,985**	**59,893,460,460,111**	**76.50**
JUMLAH EKUITAS DANA	**139,098,697,309,786**	**79,520,583,395,860**	**59,578,113,913,926**	**76.50**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**139,260,331,934,285**	**80,007,078,957,656**	**59,253,252,976,629**	**74.06**

Jakarta, Mei 2012

MENTERI PERHUBUNGAN

E. E MANGINDAAN

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2 KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2010 – 2014

a. VISI

Visi Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 adalah **"Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah."** *Pelayanan perhubungan yang*

handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Pelayanan perhubungan yang berdaya saing* diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. *Pelayanan perhubungan yang memberikan nilai tambah* diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

b. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi dengan mengacu kepada tiga pendekatan, yaitu: Pertama, pemulihan kondisi sarana dan prasarana perhubungan agar berfungsi seperti pada masa sebelum krisis ekonomi; Kedua, melakukan konsolidasi dengan reorientasi dan reposisi peran dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam kerangka *good governance*; Ketiga, melaksanakan pembangunan dalam rangka *peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan* jasa perhubungan. Oleh karena itu misi Kementerian Perhubungan sesuai dengan tiga pendekatan tersebut adalah:

1) Mempertahankan tingkat pelayanan jasa perhubungan :

Sejak terjadi krisis ekonomi yang didahului dengan krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, kinerja pelayanan jasa perhubungan semakin memburuk karena operator tidak mampu melakukan perawatan dan peremajaan armada, pemerintah hampir tidak memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan masyarakat pengguna jasa tidak memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan pemulihan kinerja pelayanan jasa perhubungan menuju kepada

kondisi normal, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana perhubungan.

2) **Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan (*regulatory reform*) dan penegakan hukum secara konsisten:**

Sesuai dengan prinsip *good governance* dipandang perlu melakukan restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan jasa perhubungan. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, mengarahkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan perbantuan. Reformasi di bidang regulasi (*regulatory reform*) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa perhubungan. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa perhubungan.

3) **Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan:**

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan perdesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

4) **Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan:**

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan, perbaikan pelayanan melalui penerapan teknologi transportasi sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa perhubungan senantiasa berpedoman kepada rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

c. TUJUAN

Pembangunan Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 2010-2014 bertujuan untuk mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

Dalam mewujudkan dukungan tersebut penyelenggaraan transportasi harus berjalan secara efektif dan efisien guna menunjang dan mendorong keberhasilan pembangunan nasional. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

d. SASARAN DAN PRIORITAS

1) SASARAN

Sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan diarahkan kepada upaya penyelenggaraan transportasi guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta adil dan demokratis. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum transportasi difungsikan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di perdesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk memperlancar mobilitas orang dan distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung perwujudan Indonesia yang aman dan damai, diupayakan penyediaan aksesibilitas transportasi di wilayah konflik, wilayah perbatasan dan wilayah terisolasi untuk mendorong kelancaran mobilitas orang, distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antar wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendukung Indonesia yang adil dan demokratis, pembangunan transportasi diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transportasi antar wilayah akan membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi

perbedaan harga antar wilayah, meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah, sehingga mendorong terciptanya kesempatan melaksanakan pembangunan antar wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperanserta dalam penyelenggaraan transportasi. Dengan memperhatikan arah penyelenggaraan transportasi seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada kurun waktu 2010-2014 adalah sebagai berikut:

(a) Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana perhubungan agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional;

(b) Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan (*regulatory reform*)) dibidang perhubungan dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;

(c) Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai;

(d) Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2) PRIORITAS

Pembangunan perhubungan tahun 2010-2014, dititikberatkan kepada pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan pembangunan angkutan jalan, angkutan perkotaan, angkutan kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara dengan prioritas sebagai berikut:

(a) Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global;

(b) Terwujudnya keselamatan transportasi sebagai implementasi dari program *Roadmap to Zero Accident*;

(c) Mendukung program pengentasan kemiskinan melalui upaya penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;

(d) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi terutama untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran: pengurangan backlog sarana dan prasarana perkeretaapian dan penambahan kapasitas terkait dengan peningkatan permintaan jasa transportasi;

(e) Penyediaan dana pendamping pinjaman dan hibah luar negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pinjaman secara bilateral;

(f) Pembangunan di daerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan pemulihan fungsi infrastruktur transportasi;

(g) Pembangunan kawasan perbatasan/pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI;

(h) Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya sehubungan dengan perubahan iklim terkait dengan isu pemanasan global *(global warming)*.

3) STRATEGI

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan perhubungan, yaitu:

(a) **STRATEGI PEMULIHAN DAN PENATAAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

Strategi ini diarahkan untuk melakukan pemulihan dan penataan penyelenggaraan perhubungan kembali ke posisi normal setelah terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan dilanjutkan dengan penataan Sistem Transportasi Nasional sejalan dengan perubahan lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional maupun global. Pemulihan dan penataan penyelenggaraan perhubungan dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan dibarengi dengan pelaksanaan reformasi dan

restrukturisasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan (*regulatory reform*), peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Perhubungan, dengan pemihakan kepada peranserta swasta dalam pengoperasian dan pembangunan infrastruktur perhubungan, serta mereposisi peran pemerintah dari operator dan pemilik (*owner*) menjadi regulator dan fasilitator.

(b) **STRATEGI PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN**

Strategi Pembangunan Perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat baik di seluruh pelosok tanah air maupun di manca negara. Pembangunan perhubungan dilaksanakan dengan berpedoman kepada 7 (tujuh) pilar sebagai berikut:

(1) Pembangunan perhubungan dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimumkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (*cost recovery*), baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang;

(2) Pembangunan perhubungan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hasil pembangunan perhubungan memiliki dayaguna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat;

(3) Pembangunan perhubungan difokuskan kepada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah;

(4) Pembangunan perhubungan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*);

(5) Pembangunan perhubungan dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat

melalui mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (*market failure*);

(6) Pembangunan perhubungan dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistik dan rasional;

(7) Pembangunan Perhubungan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan baik pada skala kecil, menengah, maupun skala besar.

2. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam penyelenggaraan transportasi, pelaksanaan fungsi penunjang (*servicing function*) dilakukan pada daerah yang telah berkembang dan maju. Kebijakan pelayanan pada daerah yang telah berkembang atau maju antara lain memberikan peluang bagi keterlibatan swasta untuk melaksanakan pelayanan dengan prinsip *least cost economy* terutama pada segmen usaha yang mampu mencapai *cost recovery*, sedangkan untuk segmen usaha yang tidak mampu mencapai *cost recovery*, pembangunan fasilitas pelayanan dilakukan oleh pemerintah. Untuk daerah terisolasi, terpencil, terbelakang dan kawasan perbatasan, pemerintah memberikan pelayanan transportasi melalui pelaksanaan fungsi pendorong (*promoting function*).

b. Pembangunan Perhubungan mendukung kebijakan otonomi daerah melalui penyediaan jasa perhubungan yang memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan daerah. Disamping itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk melakukan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian fasilitas perhubungan sesuai dengan kewenangannya.

c. Pembangunan perhubungan mendukung kelancaran mobilitas, distribusi dan pembangunan terutama pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sektor-sektor strategis lainnya, yang pada akhirnya turut menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan yang berkesinambungan.

d. Kebijakan pembangunan perhubungan berkelanjutan dilakukan dengan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, hemat energi serta meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan sektor perhubungan dapat dilakukan secara efisien.

e. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dilakukan dengan melibatkan partisipasi swasta dan melakukan restrukturisasi pada bidang usaha sesuai dengan tuntutan pasar domestik dan pasar global serta sesuai dengan semangat perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan reposisi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas SDM.

f. Kebijakan pembangunan perhubungan berkelanjutan dilakukan dengan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, hemat energi serta meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan sektor perhubungan dapat dilakukan secara efisien.

g. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dilakukan dengan melibatkan partisipasi swasta dan melakukan restrukturisasi pada bidang usaha sesuai dengan tuntutan pasar domestik dan pasar global serta sesuai dengan semangat perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan reposisi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas SDM.

h. Prinsip dasar kebijakan penetapan tarif jasa perhubungan terdiri dari 3 (tiga) aspek pertimbangan, yaitu:

   1) Sisi Operator selaku Penyedia Jasa:
      Pertimbangan finansial dengan pendekatan kepada faktor kelangsungan usaha dengan memperhitungkan biaya dari setiap jenis jasa perhubungan (*cost of service*) dan nilai jasa yang diproduksi dan penggunaan teknologi (*value of service*).
   2) Sisi Masyarakat selaku Pengguna Jasa:
      Pertimbangan sosial ekonomi dengan pendekatan kepada daya beli masyarakat dengan memperhitungkan kemampuan membayar (*ability to pay*) dan kemauan membayar (*willingness to pay*).
   3) Sisi Pemerintah selaku Regulator:
      Pertimbangan kebijakan nasional dengan lebih menekankan kepada stabilitas nasional, namun tetap dengan memperhitungkan tercapainya keadaan "*optimum allocation*

resources" dengan memperhatikan kriteria efisiensi dan kriteria pemerataan dalam pembangunan serta menjaga tingkat pelayanan (*level of service*) dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan jasa perhubungan.

3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2011

Sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan diarahkan kepada upaya penyelenggaraan transportasi guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta adil dan demokratis. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan transportasi difungsikan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di pedesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk memperlancar mobilitas orang, distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung perwujudan Indonesia yang aman dan damai, diupayakan penyediaan aksesibilitas transportasi di wilayah konflik, wilayah perbatasan dan wilayah terisolasi untuk mendorong kelancaran mobilitas orang, distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antar wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendukung Indonesia yang adil dan demokratis, pembangunan transportasi pada tahun 2011 diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transportasi antar wilayah akan membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah, meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah, sehingga mendorong terciptanya kesempatan melaksanakan pembangunan antar wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperanserta dalam penyelenggaraan transportasi. Dengan memperhatikan arah penyelenggaraan transportasi seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2011 adalah mewujudkan sasaran yang telah diformulasikan dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan 2010-2014 sebagai berikut:

a. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana perhubungan agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
b. Terwujudnya keberlanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan/ *regulatory reform)* dibidang perhubungan dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance;*
c. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai;
d. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan tahun 2011, skenario pagu anggaran setiap program pembangunan Kementerian Perhubungan tahun 2011 disusun berdasarkan 8 (delapan) prioritas sebagai berikut :

a. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global;
b. Terwujudnya keselamatan transportasi sebagai implementasi dari program *Roadmap to Zero Accident*;
c. Mendukung program pengentasan kemiskinan melalui upaya penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;
d. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi terutama untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran : pengurangan *backlog* sarana dan prasarana perkeretaapian; dan penambahan kapasitas terkait dengan peningkatan permintaan jasa transportasi;
e. Penyediaan dana pendamping pinjaman dan hibah luar negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pinjaman secara bilateral;
f. Pembangunan di daerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan pemulihan fungsi infrastruktur transportasi;

g. Pembangunan kawasan perbatasan/pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI;

h. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya sehubungan dengan perubahan iklim terkait dengan isu pemanasan global *(global warming)*.

4. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Arah kebijakan pembangunan sektor transportasi tahun 2011 adalah meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan jasa transportasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Upaya tersebut antara lain meliputi :

a. Meningkatkan keselamatan operasional baik sarana maupun prasarana transportasi;

b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi baik dikawasan perkotaan maupun daerah perbatasan, terisolir dan belum berkembang.

c. Penyediaan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas;

d. Melanjutkan reformasi peraturan perundangan agar dapat mendorong keikutsertaan investasi swasta dan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait;

e. Melakukan restrukturisasi kelembagaan terhadap penyelenggara transportasi baik ditingkat pusat maupun daerah;

f. Melakukan optimalisasi penggunaan dana pemerintah baik untuk operasional, pemeliharaan, rehabilitasi maupun investasi melalui penyusunan prioritas program yang diwujudkan dalam suatu kegiatan.

Arah kebijakan masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut:

a. Transportasi Darat

Arah kebijakan transportasi darat meliputi:

1) Peningkatan kondisi pelayanan angkutan umum jalan raya;
2) Meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai pendukung moda transportasi lainnya;
3) Melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil;
4) Melanjutkan kegiatan operasional unit pelaksana teknis dan tugas serta fungsi pemerintah lainnya;
5) Meningkatkan keselamatan transportasi darat secara komprehensif dan terpadu;

6) Pengembangan transportasi darat berkelanjutan;
7) Pemaduan pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota.

b. Transportasi Kereta Api

Arah kebijakan pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 2011 meliputi:

1) Penyiapan dan penguatan regulasi berupa penyelesaian peraturan perundangan serta penyusunan peraturan/pedoman pendukung lainnya termasuk regulasi dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian multioperator;
2) Melanjutkan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan termasuk untuk mewujudkan eksistensi Pemerintah sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian;
3) Meningkatkan kapasitas lintas dan kualitas pelayanan serta reaktivasi koridor-koridor yang sudah tidak dioperasikan;
4) Meningkatkan keselamatan angkutan melalui pemulihan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian serta pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian;
5) Melaksanakan audit kinerja prasarana dan sarana serta SDM operator perkeretaapian;
6) Meningkatkan peran angkutan perkeretaapian melalui perwujudan keterpaduan antar moda dan pengembangan KA perkotaan;
7) Meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan swasta di bidang perkeretaapian;
8) Meningkatkan SDM perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian nasional.

c. Transportasi Laut

Arah kebijakan pembangunan transportasi laut tahun 2010 difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, pembangunan sistem yang memperlancar dan mempermudah pelayanan serta peningkatan SDM dan pengembangan institusi sesuai amanat UU No. 17/2008 tentang Pelayaran. Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1) Membangun dan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang memiliki *waiting time* tinggi;
2) Membangun kapal-kapal perintis bagi daerah yang membutuhkan;

3) Membangun pelabuhan-pelabuhan kecil yang disinggahi kapal perintis;
4) Membangun dan meningkatkan kualitas terminal penumpang, terutama pada daerah tujuan wisata;
5) Membangun kapal patroli dan SBNP serta peralatan keselamatan lainnya;
6) Membangun sistem pelayanan perizinan yang memperlancar, mempermudah dan memberi kepastian waktu;
7) Membangun sistem pelayanan dan pendidikan terpadu bagi pelaut, bekerja sama dengan Badan Diklat Perhubungan;
8) Membangun sistem pengadaan barang/jasa yang transparan dan bersih;
9) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
10) Membentuk organisasi baru sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2008: Otoritas pelabuhan, Syahbandar, UPP dan *Sea and Coast Guard;*
11) Menerapkan sistem remunerasi baru;
12) Melimpahkan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan *feeder* kepada pemerintah daerah.

d. Transportasi Udara

Arah kebijakan pembangunan transportasi udara adalah:

1) Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO guna meningkatkan keselamatan penerbangan, baik selama penerbangan maupun di bandara wilayah Indonesia;
2) Mengembangkan dan meningkatkan prasarana transportasi udara di daerah rawan bencana alam dan daerah perbatasan serta daerah potensi ekonomi;
3) Peningkatan dan pemulihan kembali fungsi sarana dan prasarana transportasi udara sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh ICAO;
4) Pengembangan sistem, regulasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5) Menciptakan perusahaan penerbangan nasional yang efisien, efektif, dan kompetitif dalam pasar internasional;
6) Menciptakan iklim usaha jasa angkutan udara dalam persaingan sehat dan kondusif sehingga mempunyai kelangsungan hidup jangka panjang.

e. Penunjang Transportasi

Pada tahun 2010 arah kebijakan penunjang transportasi di lingkungan Sekretariat Jenderal meliputi:

1) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan penyiapan tugas pokok dan fungsi;
2) Memberikan kesempatan yang luas kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kompetensinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan di sektor transportasi;
3) Pengembangan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4) Reformasi dan restrukturisasi organisasi yang mampu mengantisipasi perkembangan sektor transportasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
5) Perencanaan dan penelaahan peraturan perundangan-undangan di bidang transportasi;
6) Koordinasi penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan perundang-undangan dibidang transportasi;
7) Penyusunan peraturan pelaksanaan perundang-undangan di bidang transportasi;
8) Pemberian pertimbangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan perumusan perjanjian;
9) Pemberian bantuan hukum;
10) Penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi;
11) Pengelolaan jaringan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;
12) Penyiapan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta konsultasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri;
13) Mewujudkan Pelayanan Umum yang Optimal yang antara lain meliputi : Terwujudnya pelayanan kepemimpinan dan keprotokolan yang handal dan dinamis; Terwujudnya pelayanan dan tertib administrasi yang sesuai dengan sistem dan prosedur; Terselenggaranya pelayanan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan (K3), sarana dan prasarana dengan baik; Terwujudnya pelayanan administrasi pembiayaan dan perjalanan dinas yang efektif dan efisien; Terselenggaranya peningkatan kesehatan pegawai yang memadai;

14) Mengembangkan kerja sama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran sehingga anggaran dapat terserap sesuai dengan rencana dan sesuai peraturan berlaku;
15) Mengarahkan dan mendorong agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terjadi KKN;
16) Melaksanakan *Action Plan* (rencana tindak) Kementerian Perhubungan untuk mencapai opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
17) Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan *action plan*;
18) Melakukan klarifikasi terhadap hasil inventarisasi BMN oleh Tim Keppres 17;
19) Intensifikasi dan ekstensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
20) Mendorong UPT yang tingkat pelayanan kepada publik tinggi untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU);
21) Penatausahaan, pembukuan, verifikasi dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan Kementerian Perhubungan;
22) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Anggaran yang tertib dan teratur termasuk evaluasi Pinjaman Hibah Luar Negeri;
23) Pengelola Anggaran yang berkualitas;
24) Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan BMN;
25) Melaksanakan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup sektor transportasi;
26) Perluasan jaringan informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memperluas difusi informasi kebijakan Kementerian Perhubungan melalui media radio, televisi dan media cetak dengan memanfaatkan teknologi internet akan pengembangan komunikasi interaktif lewat internet;
27) Pengembangan dan penyebaran informasi dan komunikasi secara terpadu melalui satu pintu yang mengintegrasikan masukan-masukan dari bagian Humas di setiap Direktorat Jenderal;

28) Pengembangan / peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) secara professional dengan melaksanakan Diklat bidang infokom yang professional dan pemanfaatan program, diklat dalam dan luar negeri bidang informasi;

29) Peningkatan sarana dan prasarana operasional infokom, melalui pengadaan sarana dan prasarana infokom sesuai perkembangan teknologi informasi. Upaya peningkatan sarana dan prasarana tersebut dilakukan pula pengembangan sistem pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;

30) Penyusunan standard kerja baku sebagai sarana pengendalian dan jaminan atas mutu penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informasi;

31) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan melalui peningkatan kerjasama dalam penyebaran informasi dan peningkatan sarana pelayanan informasi kepada masyarakat;

32) Peningkatan hubungan kerjasama dengan lembaga /unsur pers dan kelompok organisasi masyarakat. Upaya peningkatan ini dilakukan dengan melaksanakan jumpa pers dan liputan pers secara berkala serta peningkatan kualitas pemberitaan lewat media pers. Disamping itu juga perlu dilakukan pemanfaatan / pemberdayaan kelompok atau organisasi masyarakat dalam penyebaran informasi (kelompok informasi masyarakat, *media watch);*

33) Mengintegrasikan sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;

34) Menstandarisasi data dan mekanisme pertukaran data di lingkungan Kementerian Perhubungan;

35) Menerapkan tata kelola administrasi kepemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) di lingkungan Kementerian Perhubungan;

36) Melakukan pengembangan aplikasi dengan menyesuaikan kebutuhan pengolahan dan penyajian data dan informasi.

Pendapatan

PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2011 (*Audited*) ***netto*** sebesar Rp 1.442.751.670.667,- atau 389,53 persen diatas Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2011 sebesar Rp 370.383.536.750,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun

2010 (*Audited*) sebesar Rp 917.409.750.257,-, terdapat kenaikan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2011 (*Audited*) sebesar Rp.525.341.920.410,- atau 57,26 persen. Realisasi PNBP pada Kementerian Perhubungan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dan Pendapatan BLU.

Belanja

BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian Perhubungan gabungan (DIPA Umum dan BLU) Tahun 2011 (*Audited*) *netto* setelah dikurangi pengembalian belanja menjadi Rp. 20.110.043.233.814,- atau 86,16 persen dari pagu anggaran Rp 23.340.702.622.000,- (Rupiah Murni serta Pinjaman dan Hibah).

Realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.

Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belaja Modal Kementerian Perhubungan Tahun 2011 (*Audited*) dan Tahun 2010 (*Audited*)

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2010 *(Audited)*	Kenaikan/Penurunan
1.	Belanja Pegawai	1,326,418,456,631	1,158,162,941,133	168,255,515,498
2.	Belanja Barang	3,519,221,932,184	2,697,631,286,391	821,590,645,793
3.	Belanja Modal	15,264,402,844,999	11,706,285,114,410	3,558,117,730,589
	Jumlah	**20,110,043,233,814**	**15,562,079,341,934**	**4,547,963,891,880**

Realisasi belanja berdasarkan program yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan :

Tabel 2.
Realisasi Belanja Berdasarkan Program Kementerian Perhubungan Tahun 2011

(Dalam Rupiah)

Kode	Program	Anggaran setelah Revisi	Realisasi	%
101	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	371.892.940.000	315.225.357.248	84,76
102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perhubungan	36.138.705.000	33.943.652.297	93,93
103	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	36.441.660.000	30.455.983.803	83,57

106	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	123.698.553.000	103.872.113.324	83,97
107	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	60.773.001.000	55.338.089.995	91,06
108	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	1.908.195.599.000	1.700.369.046.563	89,11
109	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	925.067.547.000	861.231.960.062	93,10
305	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	214.945.888.000	176.647.994.196	82,18
803	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	31.279.534.000	23.772.358.362	75,99
805	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	753.566.433.000	624.666.146.088	82,90
806	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	1.972.242.508.000	1.909.026.349.784	96,79
807	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	4.666.596.082.000	3.630.865.134.689	77,81
808	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	5.850.731.919.000	4.899.421.155.513	83,74
809	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	4.430.856.075.000	4.063.027.190.275	91,70
004	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	136.568.900.000	117.884.782.072	86,32
605	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	1.821.707.278.000	1.564.295.919.543	85,87
	Jumlah	**23.340.702.622.000**	**20.110.043.233.814**	**86,16**

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2011 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Unit Eselon I beserta jenjang struktural di bawahnya seperti kantor/satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2011 (*Audited*) disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan Unit Eselon I (UAPPA-EI) dan data lainnya dari unit-unit yang terkait.

Daftar entitas pelaporan keuangan tingkat Unit Eselon I

Pada Tahun Anggaran 2011, Kementerian Perhubungan (UAPA) bertugas melakukan penggabungan dan pengkoordinasian laporan keuangan dari 8 (delapan) Unit Eselon I (UAPPA-E1), yaitu:

1. Sekretariat Jenderal sebanyak 18 kantor/satuan kerja;
2. Inspektorat Jenderal sebanyak 1 kantor/satuan kerja;
3. Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 82 kantor/satuan kerja;
4. Ditjen Perhubungan Laut sebanyak 358 kantor/satuan kerja;
5. Ditjen Perhubungan Udara sebanyak 166 kantor/satuan kerja;
6. Ditjen Perkeretaapian sebanyak 25 kantor/satuan kerja;
7. Badan Litbang Perhubungan sebanyak 5 kantor/satuan kerja;
8. Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebanyak 24 kantor/satuan kerja.

Kantor/Satuan Kerja tersebut terdiri dari 679 Kantor/satuan kerja pusat dan daerah .

Di dalam DIPA Umum Kementerian Perhubungan termasuk DIPA yang bersumber dari BLU sebesar Rp 209.370.903.000,- terdapat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yaitu STIP, BP3IP, BP2IP Surabaya, PIP Semarang, PIP Makassar, BPPTD Tegal dan ATKP Surabaya.

Dari total anggaran di atas, rincian anggaran satuan kerja BLU adalah sebagai berikut :

Tabel 3.
Rincian Anggaran Satker BLU

Tahun Anggaran	Jumlah Satker	JENIS SUMBER DANA	
		APBN	BLU
2010	5	356,615,668,000	112,315,412,000
2011	7	706,443,536,000	209,370,903,000

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Perhubungan adalah 679 satker. Dari jumlah tersebut satker yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 679 satker (100%), sedangkan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sejumlah 0 satker (0%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Rekapitulasi Jumlah Satker yang Menyampaikan Laporan Keuangan per Eselon 1

No	Kode Es. I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan										Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		UB		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	01	Setjen	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
2	02	Itjen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	03	Ditjen Hubdat	77	-	5	-	-	-	-	-	-	-	82
4	04	Ditjen Hubla	7	-	351	-	-	-	-	-	-	-	358
5	05	Ditjen Hubud	8	-	158	-	-	-	-	-	-	-	166
6	08	Ditjen KA	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
7	11	Badan Litbang	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
8	12	Badan PSDM	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Jumlah			165	-	514	-	-	-	-	-	-	-	679

Keterangan: M = Menyampaikan LK TM = Tidak menyampaikan LK

Selain mengelola Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (022), Kementerian Perhubungan juga mengelola Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp 1.550.134.956.000,- yang terdapat pada 3 (tiga) UAPPA-E1 terdiri dari :

1. Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 872.752.505.000,- untuk kegiatan PSO PT. Pelni (Satker Direktorat Jenderal Perhubungan Laut).
2. Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 639.609.146.000,- untuk kegiatan PSO PT. Kereta Api Indonesia (Satker Direktorat Jenderal Perkeretaapian).
3. Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp. 37.773.305.000,- berupa Bea Masuk Yang Ditanggung Pemerintah (Satker Direktorat Jenderal Perhubungan Udara).

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Kementerian Negara/Lembaga membukukan melalui SAI baik untuk transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan maupun belanja.

Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

   Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi Unit Eselon I. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja, dan Pembiayaan. Angka yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 (*Audited*) berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh KPPN.

2. Neraca

   Neraca Kementerian Perhubungan Tahun 2011 (*Audited*) disusun berdasarkan kompilasi Neraca Unit Eselon I. Data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya didasarkan pada Neraca Unit Eselon I. Neraca Kementerian Perhubungan Tahun 2011 (*Audited*) disusun melalui Sistem Akuntansi Instansi.

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Implementasi SAI pada Kementerian Perhubungan mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2010, 2009 dan 2008 Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan yang telah diperiksa oleh BPK-RI telah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), yang pada tahun 2007 dan 2006 BPK-RI Tidak Mengeluarkan Pendapat (*Disclaimer Opinion*). Selain hal tersebut seluruh kantor/satuan kerja di bawah Unit Eselon I telah menyelenggarakan SAI dalam menyusun laporan keuangan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan-permasalahan terutama organisasi (kelembagaan), khususnya UAPPA-W yang telah dibentuk oleh Unit Eselon I masih belum optimal, dan kualitas sumber daya manusia yang memahami pelaporan keuangan pada masing-masing unit akuntansi masih kurang, walaupun sudah ada kemajuan yang signifikan.

Permasalahan lain yang cukup berpengaruh dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan adalah implementasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada masing-masing kantor/satker masih belum berjalan optimal dan sistem aplikasi masih belum sempurna.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2011 adalah 679 satker. Dari jumlah tersebut satker yang telah menyampaikan laporan barang dan dikonsolidasikan sejumlah 679 satker (100%), sedangkan yang tidak menyampaikan laporan barang sejumlah 0 satker (0%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Rekapitulasi Jumlah Satker yang Menyampaikan Laporan BMN per Eselon I

No	Kode Es. I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan										Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		UB		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	01	Setjen	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
2	02	Itjen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	03	Ditjen Hubdat	77	-	5	-	-	-	-	-	-	-	82
4	04	Ditjen Hubla	7	-	351	-	-	-	-	-	-	-	358
5	05	Ditjen Hubud	8	-	158	-	-	-	-	-	-	-	166
6	08	Ditjen KA	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
7	11	Badan Litbang	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
8	12	Badan PSDM	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Jumlah			165	-	514	-	-	-	-	-	-	-	679

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Barang TM = Tidak menyampaikan Laporan Barang

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2011 (*Audited*) telah mengacu pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.
3. Buletin Teknis Nomor 1 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat.
4. Buletin Teknis Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang.
5. Buletin Teknis Nomor 8 tentang Akuntansi Utang.
6. Buletin Teknis Nomor 9 tentang Akuntansi Aset Tetap.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

8. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 38/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kementerian Perhubungan adalah :

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN.

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) melalui pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penerapan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada neraca belum dilakukan secara konsisten dan memadai pada neraca kantor/satker, disajikan secara bertahap pada kantor/satker yang telah siap sesuai kondisi piutang dan kualitasnya di lapangan. Hal ini karena PMK 201/PMK.06/2010 dan peraturan turunannya baru diterbitkan di akhir tahun 2011 (bulan Desember) yaitu Perdirjen Perbendaharaan Nomor 82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan belum disosialisasikan sepenuhnya baik oleh Kementerian Keuangan kepada masing-masing K/L maupun Kementerian Perhubungan kepada kantor/satker.

Diharapkan pada tahun 2012, penyisihan piutan tidak tertagih dapat diterapkan sepenuhnya pada neraca kantor/sater

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.
Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen
Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:
- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/ Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau

menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 (lima puluh satu) persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.
PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.
Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2011 berdasarkan harga perolehan.
Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan
(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Penyusutan aset tetap sesuai PSAP Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Bultek No. 5 tentang Penyusutan belum dapat diterapkan pada tahun 2011 karena belum adanya petunjuk teknis terkait penentuan masa manfaat aset dan metode penyusutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 Tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara dinyatakan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa asset tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai Tahun 2013.

Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya,

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.
Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
   Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
   Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang
   Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Hibah Kementerian Perhubungan ***netto*** Tahun 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 1.442.751.670.667,- setelah dikurangi pengembalian pendapatan sebesar Rp 24.975.805 ,-

Belanja Kementerian Perhubungan dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting kenegaraan. Belanja Kementerian Perhubungan meliputi (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang, (iii) Belanja Modal.

Pada Tahun 2011 Kementerian Perhubungan (BA 022) mendapat alokasi dana yang bersumber dari DIPA Umum dan DIPA BLU. Realisasi Belanja Kementerian Perhubungan gabungan (DIPA Umum dan DIPA BLU) ***netto*** Tahun 2011 (*Audited*) setelah dikurangi Pengembalian Belanja adalah sebesar Rp. 20.110.043.233.814,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.326.418.456.631,- Belanja Barang sebesar Rp. 3.519.221.932.184,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 15.264.402.844.999,-. Rincian Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan ***netto*** Tahun 2011 (*Audited*) disajikan dalam Tabel 6:

Tabel 6.
Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan
netto **Tahun 2011 (*Audited*)**

No	Uraian	Anggaran		Realisasi		% Real. Angg.
1	**Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah**	**Rp**	**370.383.536.750**	**Rp**	**1.442.751.670.667**	**389,53%**
	-Penerimaan Pajak	Rp	-	Rp	-	
	- Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp	370.383.536.750	Rp	1.442.751.670.667	**389,53%**
	-Penrimaan hibah	Rp	-	Rp	-	
2	**Realisasi Belanja Negara**	**Rp**	**23.340.702.622.000**	**Rp**	**20.110.043.233.814**	**86,16%**
	- Belanja Rupiah Murni	Rp	20.931.658.296.000	Rp	18.918.035.196.096	**90,38%**
	- Belanja Pinjaman Luar Negeri	Rp	1.635.598.469.000	Rp	650.189.614.102	**39,75%**
	-Belanja Rupiah Murni Pendamping	Rp	90.834.058.000	Rp	70.555.065.868	**77,67%**
	-Belanja PNBP	Rp	394.226.488.000	Rp	297.491.195.583	**75,46%**
	-Belanja BLU	Rp	209.440.023.000	Rp	156.635.694.024	**74,79%**
	-Belanja Hibah Luar Negeri	Rp	36.236.645.000	Rp	3.433.678.831	**9,48%**
	-Belanja Hibah Langsung LN	Rp	42.708.643.000	Rp	13.702.789.310	**32,08%**

Rincian realisasi belanja Kementerian Perhubungan yang sumber dananya berasal dari DIPA Umum periode Tahun 2011 *(Audited)* adalah sebesar Rp. 19.953.407.539.790,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.326.418.456.631,-, Belanja Barang sebesar Rp. 3.370.454.743.790,-, dan Belanja Modal sebesar Rp. 15.256.534.339.369,-.

Rincian realisasi Belanja Kementerian Perhubungan yang sumber dananya berasal dari DIPA BLU periode Tahun 2011 *(Audited)* adalah sebesar Rp. 156.635.694.024,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 0,-, Belanja Barang sebesar Rp. 148.767.188.394,-, dan Belanja Modal sebesar Rp. 7.868.505.630 ,-.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp 1.442 Miliar

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah *netto* Tahun 2011 *(Audited)* adalah sebesar Rp. 1.442.751.670.667,- atau 389,53 persen diatas estimasi yang ditetapkan Rp. 370.383.536.750,-. Estimasi pendapatan sebesar Rp. 370.383.536.750,- diperoleh berdasarkan penginputan estimasi pendapatan dalam DIPA masing-masing Kantor yang digabungkan oleh Eselon I selanjutnya menjadi estimasi pendapatan Kementerian. Dibandingkan dengan Tahun 2010 *(Audited)* realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2011 *(Audited)* mengalami kenaikan sebesar Rp. 525.341.910.410,- atau 57,26 persen.

Grafik 1.
Realisasi Pendapatan Tahun 2011 (*Audited*) dan Tahun 2010 *(Audited)* per Jenis Penerimaan

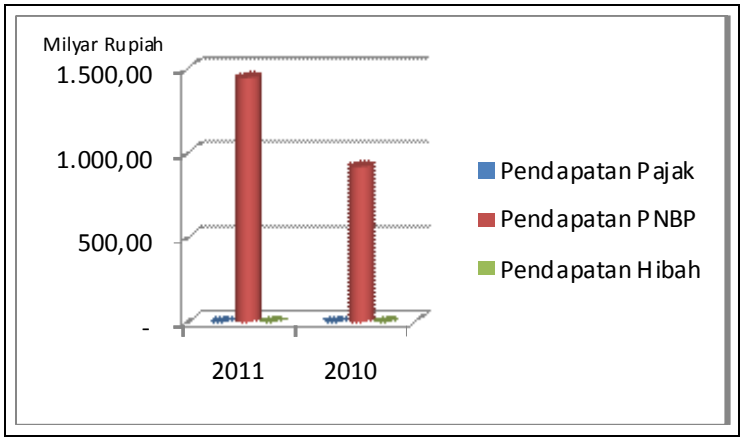

Realisasi PNBP Rp1.442 Miliar

B.2.1.2.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP *netto* Tahun 2011 *(Audited)* sebesar Rp. 1.442.751.670.667,- atau 389,53 persen diatas Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2011 sebesar Rp. 370.383.536.750,-. Dibandingkan dengan Tahun 2010 *(Audited)* realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2011 *(Audited)* mengalami kenaikan sebesar Rp. 525.341.910.410,- atau 57,26 persen. Realisasi PNBP pada Kementerian Perhubungan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dan Pendapatan BLU.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) *netto* Tahun 2011 *(Audited)* dan 2010 (*Audited*) menurut Tingkat Eselon 1 dapat dirinci dalam Tabel 7 :

Tabel 7.
Realisasi PNBP *netto* Tahun 2011 (*Audited*) dan 2010 (*Audited*)
Menurut Tingkat Eselon 1

(dalam Rupiah)

Uraian	2011 *(Audited)*	2010 *(Audited)*
Sekretariat Jenderal	289.457.457,-	371.487.268,-
Inspektorat Jenderal	414.896,-	0,-
Ditjen Perhubungan Darat	10.711.633.385,-	9.966.556.858,-
Ditjen Perhubungan Laut	835.345.186.591,-	478.453.130.843,-
Ditjen Perhubungan Udara	375.209.670.149,-	293.171.987.629,-
Ditjen Perkeretaapian	1.715.456.179,-	2.587.611.881,-
Badan Litbang Perhubungan	214.094.779,-	39.887.162,-
Badan Pengemb. SDM Perhubungan	219.265.757.231,-	132.819.098.616,-
Jumlah	**1.442.751.670.667,-**	**917.409.760.257,-**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Perhubungan diantaranya berasal dari :

1. Pada Ditjen Perhubungan Darat PNBP berasal dari Pendapatan Sewa, Pendapatan Jasa (berupa Pendapatan Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Satker Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor), Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-lain.
2. Pada Ditjen Perhubungan Laut jenis PNBP nya meliputi :
   a. Penerimaan jasa kepelabuhan seperti jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan alat, pelayanan jasa kepelabuhan lainnya, termasuk jasa pemanduan dan penundaan.
   b. Penerimaan jasa kenavigasian seperti jasa penggunaan SBNP/Uang Rambu, sewa fasilitas galangan navigasi, jasa Telekomunikasi Pelayaran, dan jasa pengujian kesehatan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran.

c. Penerimaan Uang Perkapalan (PUP) terdiri dari : pemeriksaan dan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal, pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur, pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat *Document of Compliance* (DOC) dan *Safety Management Certificate* (SMC), pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal, keselamatan kapal, pengesahan gambar kapal, penerbitan dokumen kepelautan dan dokumen kapal selain sertifikat, pengawasan barang berbahaya, pemeriksaan kapal asing/ *port state control* atas pemeriksaan ulang (*reinspection*).

3. Pada Ditjen Perhubungan Udara jenis PNBP nya meliputi :
   a. Pelayanan jasa yang dilakukan oleh penyelenggara Bandara Udara dan/atau penyelenggara navigasi penerbangan yang terdiri dari : (i) pelayanan jasa penerbangan (PJP); (ii) pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U); (iii) pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U); (iv) pelayanan jasa pemakaian garbarata; (v) pelayanan jasa pemakaian konter pelaporan; (vi) pelayanan jasa penumpukan barang dalam Gudang Lini I di bandar udara; (vii) pelayanan jasa atas penggunaan bandar udara di luar jam operasi; (viii) sewa-sewa dan tanda masuk kawasan terbatas di bandar udara.
   b. Pelayanan jasa yang dilakukan oleh Direktorat dan/atau Direktorat Jenderal yang terdiri dari : (i) sertifikat pesawat udara dan personel; (ii) pengujian kesehatan, (iii) jasa pelayanan pada Balai Elektronika Penerbangan; (iv) jasa pelayanan penerbitan sertifikat dan *rating* bidang elektronika dan listrik penerbangan; (v) jasa pelayanan pada Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan; (vi) dokumen penerbangan; (vii) jasa pelayanan penerbitan dan perpanjangan sertifikat di bidang keamanan dan keselamatan penerbangan; (viii) jasa pelayanan penerbitan izin di bidang angkutan udara; (ix) jasa pelayanan bidang teknik Bandar Udara.
4. Pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan PNBP nya merupakan penerimaan negara atas iuran peserta pendidikan terkait pelayaran dan penerbangan dari taruna/ siswa.

Beberapa Informasi tambahan dari Eselon I terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak diantaranya sebagai berikut :

1. Pada Inspektorat Jenderal terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp 414.896, dengan rincian sebagai berikut :

a. Senilai Rp 96,- merupakan potongan langsung pada Surat Perintah Membayar Nomor : 00011 tanggal 01 Pebruari 2011 berupa pembayaran kekurangan Gaji Pegawai Golongan II atas nama Sdr. Djuhana (almarhum) bulan September s.d. Desember 2010 (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Yang Lalu).
b. Senilai Rp 414.800,- dalam Surat Perintah Membayar Nomor : 00093 tanggal 07 April 2011 yang berupa pendapatan lain-lain adalah Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Tunjangan Beras Golongan I s.d. IV pegawai Inspektorat Jenderal bulan Januari 2010 s.d. Pebruari 2011.

2. Ditjen Perhubungan Laut :

Terdapat 3 Buah SSBP yang tidak diinput pada bulan September 2011 dan Oktober 2011 pada UPP Kuala Semboja hal ini dikarenakan UPP Kuala Semboja mempunyai jarak tempuh yang jauh dari Bank Persepsi sehingga dilakukan penyetoran 2 kali dalam satu bulan. Namun Itjen Kemenhub merekomendasikan untuk melakukan penyetoran dengan jarak Bank Persepsi terdekat dengan harapan dapat dilakukan penyetoran 1 minggu sekali. Sehingga dikarenakan berbeda bank persepsi bukti setor SSBP tidak dapat diinput ke dalam Aplikasi SAKPA dikarenakan terdapat perbedaan data SAI (Sakpa UPP Kuala Semboja) dan SAU (KPPN) dan KPPN menolak atas perbedaan data tersebut dan nilai SSBP dengan data sebagai berikut dikeluarkan dari Aplikasi SAKPA UPP Kuala Semboja :

Bulan Penyetoran	Tanggal	Nomor	No. NTPN	Jumlah
September	21 September 2011	1	1106090515041010	Rp 118.591.567
	29 September 2011	2	1305060701010705	Rp 51.157.359
			Total	**Rp 169.748.926**
Oktober	12 Oktober 2011	1	0505071413080401	Rp 96.609.824
			Total	**Rp 96.609.824**
			JUMLAH RAYA	**266.358.750**

3. Badan Pengembangan SDM Perhubungan :

Satker-Satker Non BLU di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) yang masih dikelola di luar mekanisme APBN, uraiannya adalah sebagai berikut :

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) merupakan salah satu unit kerja dilingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan sumber daya manusia perhubungan. BPSDMP melaksanakan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna mempersiapkan dan meningkatkan SDM sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional perhubungan.
Dalam pelaksanaan program diklat, BPSDMP telah diberikan anggaran yang tertuang dalam DIPA, namun dana tersebut dirasakan belum cukup untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh sertifikat kompetensi yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (IMO, ICAO, dll).

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Perhubungan dihadapkan pada permasalahan yang sulit. Disatu sisi dituntut harus menjalankan tugas pokok dan fungsi seoptimal mungkin dalam rangka melayani masyarakat, yaitu dengan melaksanakan diklat teknis dan fungsional guna memenuhi kebutuhan sertifikat pelaut sebagai syarat untuk bekerja diatas kapal baik kapal dalam negeri maupun kapal-kapal luar negeri.

Disisi lain dasar pemungutan biaya operasional pelaksanaan diklat tidak tercantum dalam PP 6 Tahun 2009. Biaya operasional tersebut sangat dibutuhkan untuk membayar honorarium pengajar, belanja bahan praktek dan lain-lain.

Dengan kondisi ini BPSDM masih memerlukan kontribusi dari masyarakat berupa penerimaan secara mandiri dari pihak ketiga yang dikelola sendiri diluar Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan, atas pungutan pihak ketiga (masyarakat dan pihak ketiga lainnya) tersebut, Satker/UPT dilingkungan BPSDMP yang menyelenggarakan program diklat transportasi melakukan pembukuan secara terpisah dari laporan keuangan yang bersumber dari APBN atau BLU, hal ini selalu menjadi temuan BPK.

Sebagai langkah perbaikan dan menindaklanjuti temuan BPK, BPSDMP bersama Biro Keuangan dan Perlengkapan dan Inspektorat Jenderal berkoordinasi secara intens dengan Ditjen Anggaran dan DJPB untuk membahas peraturan terkait penerimaan diluar mekanisme APBN baik tarif dan legalitasnya. Sedangkan untuk UPT dan Satker yang memenuhi kriteria menjadi Satker BLU akan segera diusulkan menjadi Satker BLU.

Selain itu Kementerian Perhubungan telah mengusulkan untuk mendapat ijin perlakuan khusus dari Menteri Keuangan terkait penggunaan langsung dana yang bersumber dari masyarakat dengan surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan Nomor : KU 002/3/19 Phb 2012 tanggal 18 Januari 2012.

Pada tahun 2011, masih terdapat satker BPSDM Perhubungan yang melakukan penerimaan di luar mekanisme APBN yaitu:

a) BP2IP Mauk sebesar Rp 9.111.571.921,00
b) STPI sebesar Rp 25.162.172.599,00
c) ATKP Surabaya sebesar Rp 4.298.426.000,00

Realisasi PNBP Lainnya Rp 1.238 Miliar

B.2.1.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP Lainnya ***netto*** Tahun 2011 *(Audited)* sebesar Rp. 1.238.719.897.630,- atau 702,11 persen di atas Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya Tahun 2011 sebesar Rp. 176.430.464.750,-. Dibandingkan Tahun 2010 *(Audited)* Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2011 *(Audited)* mengalami kenaikan sebesar Rp. 443.358.218.929,- atau 55,74 persen.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya Tahun 2011 *(Audited)* dan 2010 *(Audited)* menurut jenisnya dapat dirinci dalam Grafik 2 :

Grafik 2.
Realisasi PNBP Tahun 2011 (*Audited*) dan 2010 (*Audited*)
menurut jenisnya (dalam miliar rupiah)

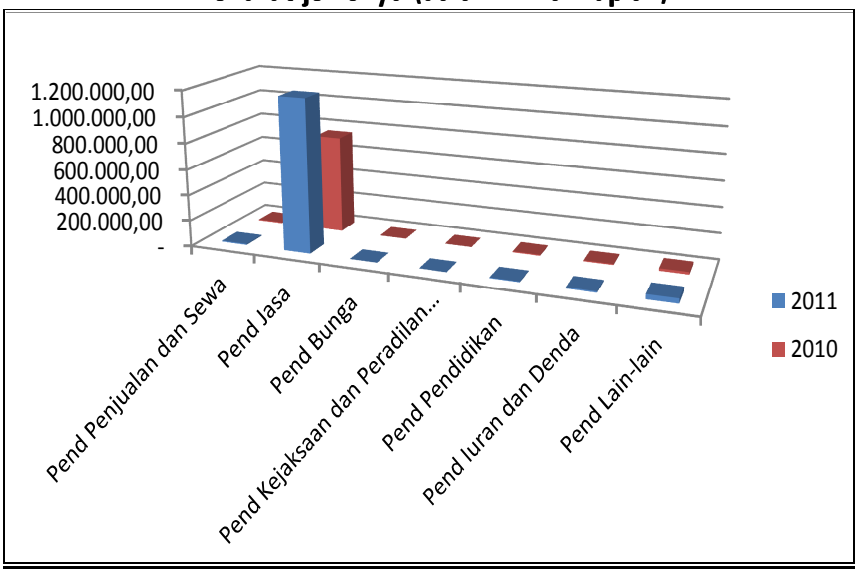

Realisasi Pendapatan BLU Rp 204 miliar

B.2.1.2.3. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU ***netto*** Tahun 2011 *(Audited)* sebesar Rp. 204.031.773.037,- atau 105,20 persen di atas Estimasi Pendapatan BLU Tahun 2011 sebesar Rp. 193.953.072.000,-. Dibandingkan Tahun 2010 *(Audited)* Pendapatan BLU Tahun 2011 *(Audited)* mengalami kenaikan sebesar Rp. 81.983.691.481 ,- atau 67,17 persen.

Rincian Realisasi Pendapatan BLU dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 8.
Realisasi Pendapatan BLU 2011 (dalam Rupiah)

Uraian	Estimasi		Realisasi		%
Pend. Jasa Layanan Umum	Rp	193.942.172.000	Rp	197.703.796.505	101,94
Pend. Hibah BLU	Rp	-	Rp	-	-
Pend. Hasil Kerja Sama BLU	Rp	900.000	Rp	3.489.022.400	387.669,16
Pend. BLU Lainnya	Rp	10.000.000	Rp	2.838.954.132	28.389,54
Jumlah	**Rp**	**193.953.072.000**	**Rp**	**204.031.773.037**	105,20

Kantor/Satker yang telah mendapat ijin Menteri Keuangan dan telah beroperasi sebagai satker BLU yaitu :

- Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 07/KMK.05/2009 tanggal 19 Januari 2009;
- Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 26/KMK.05/2009 tanggal 5 Pebruari 2009;
- Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 509/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009;
- Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009;
- Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Tegal dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 285/KMK.05/2010 tanggal 12 Juli 2010;
- Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 486/KMK.05/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 101/KMK.05/2011 tanggal 23 Maret 2011.

Status seluruh Satker BLU sebagaimana tersebut di atas adalah BLU penuh.

Tabel 9.
Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU 2011 dan 2010 (dalam Rupiah)

Uraian	2011		2010		Kenaikan/Penurunan		%
Pend. Jasa Layanan Umum	Rp	197.703.796.505	Rp	117.442.008.785	Rp	80.261.787.720	68,34
Pend. Hibah BLU	Rp	-	Rp	287.690.005	Rp	(287.690.005)	-100,00
Pend. Hasil Kerja Sama BLU	Rp	3.489.022.400	Rp	2.933.529.675	Rp	555.492.725	18,94
Pend. BLU Lainnya	Rp	2.838.954.132	Rp	1.384.853.091	Rp	1.454.101.041	105,00
Jumlah	**Rp**	**204.031.773.037**	**Rp**	**122.048.081.556**	**Rp**	**81.983.691.481**	67,17

Tabel 10.
Realisasi Pendapatan BLU 2011 Berdasarkan Satker
(dalam Rupiah)

Uraian	Estimasi		Realisasi		%
BP3IP JAKARTA	Rp	38.569.000.000	Rp	48.080.934.088	124,66
STIP JAKARTA	Rp	52.967.333.000	Rp	54.644.763.177	103.16
PIP SEMARANG	Rp	43.576.783.000	Rp	28.643.481.598	65,73
PIP MAKASSAR	Rp	27.468.800.000	Rp	27.958.107.645	101,78
BPPTD TEGAL	Rp	-	Rp	6.418.960.777	100,00
BP2IP SURABAYA	Rp	30.871.156.000	Rp	32.338.411.052	104,75
ATKP SURABAYA	Rp	-	Rp	5.947.114.700	100,00
Jumlah	**Rp**	**193.453.072.000**	**Rp**	**204.031.773.037**	105,47

Estimasi pendapatan sejumlah Rp. 193.453.072.000,- tidak memperhitungkan ATKP Surabaya dan BPPTD Tegal karena dokumen sumber berupa DIPA BLU pada kedua satker tersebut belum direvisi menjadi estimasi pendapatan BLU.

Karakteristik Pendapatan BLU yang diperoleh diantaranya adalah Pendapatan APBN, Pendapatan Jasa Layanan, Pendapatan Hibah, serta Pendapatan Usaha Lainnya.

Sampai dengan tanggal Laporan Keuangan ini disusun, hanya 3 (tiga) Satker BLU yang telah selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang diaudit oleh KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry (ARH & J), Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar yang diaudit oleh KAP Mansyur Sain, dan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang yang diaudit oleh KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso. Ketiganya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

B.2.1.3 HIBAH

Hibah pada Kementerian Perhubungan terdapat pada Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagai berikut :

a. Ditjen Perhubungan Darat

NO	NAMA SATKER	NEGARA	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan	Perancis (SNCF)	Integrated Public Transportation Masterplan for Bandung Metropolitan Area (BMA)	Selesai Tahun 2010, namun belum ada BAST karena masih proses pengecekan. Biaya € 600.000,00
2	Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan	Jerman (GTZ)	Sustainable Urban Transportation Improvement Project (SUTIP)	Masih dalam proses Agreement di Ditjen Hubdat.
3	Direktorat Bina Sarana Tr nsportasi Perkotaan	Jepang (JICA)	Jabodetabek Public Transportation Policy Implementation Strategy	Selesai Maret 2012

b. Ditjen Perhubungan Laut

NO	NAMA SATKER	NEGARA	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Multi Negara (Aids to Navigation Fund)	Bantuan pemeliharaan dan penggantian peralatan kenavigasian Indonesia di Selat Malaka (Maintenance & Replacement of Aids to Navigation in the Strait of Malacca)	Register 70878801. Sudah disahkan pendapatan sebesar Rp. 14.028.658.958,- (USD 1.576.145,12) dan belanja sebesar Rp. 12.856.969.310,-
2	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Jepang	Vessel Traffic System (VTS) Selat Malaka	Register 70991901. Nilai hibah pengadaan VTS secara keseluruhan sebesar ¥ 1.092.430.000 (sudah ada BAST) dan telah diinput dalam SIMAK BMN sebesar Rp. 111.427.860.000,-
3.	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Jepang	Vessel Traffic System (VTS) Selat Malaka Phase 2	Nomor register 71247101.
4.	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Norad	Consultancy Services for VTS	Nomor Register 71604001. Yang sudah disahkan sebesar Rp. 845.820.000,-
5.	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Multi Negara (World Bank)	Marine Electronic Highway (MEH)	Register 70659501 Belum ada realisasi. kontrak tgl 4 maret 2011 nomor kontrak 01/PP/PKP/III-11 tgl. 4 Maret 2011

Keterangan :

1. Hibah *Maintenance & Replecement Of Aids To Navigation In The Straits Of Malacca & Singapore* (*Aids To Navigation Fund* | ANF).

   a. Dalam rangka kerjasama 3 Negara Pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) maka dengan dukungan *International Maritime Organization (IMO)* dalam wadah *Tripartite Technical Expert Group (TTEG*), telah dibentuk forum kerjasama ***Cooperative Mechanism*** yang didasarkan pada kesepakatan *Ministerial Meeting* di Batam tahun 2005 untuk mengaplikasikan ***article 43 UNCLOS 1982*** yang mendorong peran serta *User States* dan *Stakeholders* dalam peningkatan keselamatan & perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.

   b. *Cooperative Mechanism* memiliki 3 kompenen, yaitu :

      1) ***Cooperation Forum (CF)***:

         Komponen CM yang bertujuan untuk meningkatkan dialog dan diskusi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan di Selat Malaka & Singapura, serta untuk mengidentifikasi dan menyusun prioritas proyek dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka & Singapura.

2) ***Project Coordination Committee (PCC)***:

Komponen CM yang bertujuan untuk mengkoordinasikan implementasi berbagai kegiatan proyek yang dilaksanakan dalam kerangka CM.

3) ***Aids to Navigation Fund (ANF)***:

Komponen CM yang bertujuan untuk menghimpun kontribusi dari *user states* dan *stakeholders* dalam mengelola dan memelihara Sarana Bantu Navigasi di selat Malaka & Singapura. Untuk periode 2008-2011 Sekretariat ANF adalah Malaysia.

c. Kerjasama ***Cooperative Mechanism*** menyiapkan 6 *Project* yang dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu :

1) *Project-1* : *Removal of wrecks in the Traffic Separation Scheme in The Straits of Malacca and Singapore.* (diusulkan oleh Malaysia).

2) *Project-2* : *Co-operation and capacity building on hazardous and noxious substance (HNS) preparedness and response in The Straits of Malacca and Singapore. (diusulkan oleh Malaysia).*

3) *Project-3* : *Demonstration project of class B Automatic Identification System (AIS) transponder on small ships. (diusulkan oleh Singapura).*

4) *Project-4* : *Setting up tide, current and wind measurement systems for the Straits of Malacca and Singapore to enhance navigational safety and marine environment protection. (diusulkan oleh Singapura).*

5) *Project-5* : *Replacement and maintenance of aids to navigation in the Straits of Malacca and Singapore. (diusulkan oleh Indonesia).*

6) *Project-6* : *Replacement of aids to navigation damaged by the tsunami disaster of December 2004*. (diusulkan oleh Indonesia).

Project-5 bertujuan untuk melakukan pemeliharaan dan penggantian SBNP di sepanjang *Traffic Separation Scheme* (TSS) Selat Malaka dan Selat Singapura, dan implementasinya dimulai tahun 2009, dengan dana yang dihimpun dari *User States* dan *Stake Holders* dalam wadah ***Aids to Navigation Funds*** **(ANF),** untuk persiapan pelaksanaan *Project-5* akan dilaksanakan ***Assessment Survey*** SBNP Indonesia di sepanjang TSS.

Cooperative Mechanism direncanakan selama 10 tahun dan dana hibah untuk Indonesia selama 10 tahun (2009 s.d 2018) direncanakan sebesar USD 32.038.213,00.

d. Realisasi penerimaan hibah sampai saat ini sebagai berikut :
   1) TA 2009 / 2010 dana hibah yang masuk ke rekening satker sebesar USD 2.763.115,00
   2) Realisasi TA 2009 / 2010 sebesar USD 2.753.441,10 sehingga saldo per 31 Desember 2010 sebesar USD 9.673,90
   3) TA 2011 realisasi belanja yang telah disahkan sebesar Rp 12.856.969.310,- saldo posisi 31 Desember 2011 USD 120.220,95 (Rekening ANF pada Bank BNI Cabang Harmoni)

c. Ditjen Perhubungan Udara

NO	NAMA SATKER	NEGARA	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	Jepang (JICA)	Project for Strenghtening Capacity on Ensuring Safe and Efficient Aircraft Operation	Register hibah 70671901. Data tidak diperoleh dari donor
2	Direktorat Bandar Udara	Jepang (JICA)	Project for the Masterplan Study on the Multiple Airport Development for Jakarta Metropolitan Area	Register hibah 71458801. Realisasi penyerapan anggaran tidak dapat diketahui karena tidak adanya laporan penyerapan dari donor, secara informal diketahui telah dilakukan penyerapan sebesar JP¥ 149,000,000, namun belum dapat disahkan sebagai penyerapan karena belum surat notice of disbursement dari pihak donor.
3	Direktorat Keamanan Penerbangan	Belanda (ORET) Belanda (INK BANK)	Procurement of ARFF Equipment Belanda *(Grant)* Procurement of ARFF Equipment Belanda *(Loan)*	Register (hibah) 71118801 dan register (loan) 40101901. Pengadaan dan pengiriman 30 unit PKP-PK di 29 Bandara (Hibah 39,8%, loan 60,2%). Telah disampaikan surat Direktur Keamanan Penerbangan nomor AU/1316/DKP.171/II/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 tentang Status the Procuretmen and Delivery of 30 Unit Airport Rescue and Fire Fighting Vehicles kepada Kabag Penyelesaian Transaksi Pinjaman Luar Negeri Bank Indonesia sebagai bahan kelengkapan administrasi untuk penerbitan SP3
4	Direktorat Navigasi	Jepang (JICA)	Project for Improvement Aviation Safety Policy (Hibah)	Register 71043301. Data tidak diperoleh dari donor
5	Direktorat Navigasi Penerbangan	USA (USTDA)	Restructuring and Regulatory Reform for Civil Aviation Authority Project	Register 70923301. Kontrak baru ditandatangani pada akhir September 2010. Dalam tahap pengumpulan data-data terkait studi dimaksud

6	Direktorat Keamanan Penerbangan	Jepang (JICA)	Airport Security System Improvement	Register 71287101. Grant Agreement sudah ditandatangani pada tanggal 8 November 2010. Kontrak konsultan sudah ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2010 dan kontrak pengadaan barang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2011.
7	Direktorat Keamanan Penerbangan	Australia (AusAID)	Assistance for Security at Denpasar Airport	Merupakan kerjasama keamanan penerbangan antara Ditjen Hubud dengan Pemerintah Australia berupa penempatan atau bantuan tenaga ahli dibidangan keamanan penerbangan. Kerjasama tertuang dalam MoU bidang Transportasi antara Pemerintah RI dgn Pemerintah Australia serta dalam Lombok Treaty 2008. Data realisasi tidak diperoleh dari donor.

d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

NO	NAMA SATKER	NEGARA	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Indonesia (Pemkot Madiun)	Hibah tanah untuk pembangunan Lembaga Pendidikan Perkeretaapian	Hibah tanah dan sertifikat tanah belum dibalik nama atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sudah ada Berita Acara Serah Terima dan sudah diinput dalam SIMAK BMN.
2	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal	Indonesia (Pemkot Tegal)	Hibah tanah untuk Pengembangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal menjadi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan	Hibah tanah dan sertifikat tanah belum dibalik nama atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sudah ada Berita Acara Serah Terima dan sudah diinput dalam SIMAK BMN

Kesulitan dalam pelaporan dan pengungkapan hibah khususnya hibah langsung terutama karena pihak donor hanya menyampaikan laporan tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan dan tidak pernah melaporkan aspek realisasi keuangan khususnya kepada Satker terkait dan umumnya merupakan pembayaran langsung dari donor kepada konsultan/*expert*.

Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan, sedangkan Kemenhub hanya mencatat hibah dari sisi Belanja dan pencatatan aset yang diterima sesuai BAST hibah serta mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Realisasi Belanja Negara Rp 20,11 Triliun

B.2.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Kementerian Perhubungan gabungan (DIPA Umum dan BLU) *netto* Tahun 2011 *(Audited)* setelah dikurangi pengembalian belanja menjadi Rp. 20.110.043.233.814,- atau 86,16 persen dari pagu anggaran Rp. 23.340.702.622.000,- (Rupiah Murni serta Pinjaman dan Hibah).

Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Rupiah Murni dan Belanja Pinjaman dan Hibah.

Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti Grafik 3:

Grafik 3.
Komposisi Alokasi Belanja TA 2011 *(Audited)* dan 2010 *(Audited)*

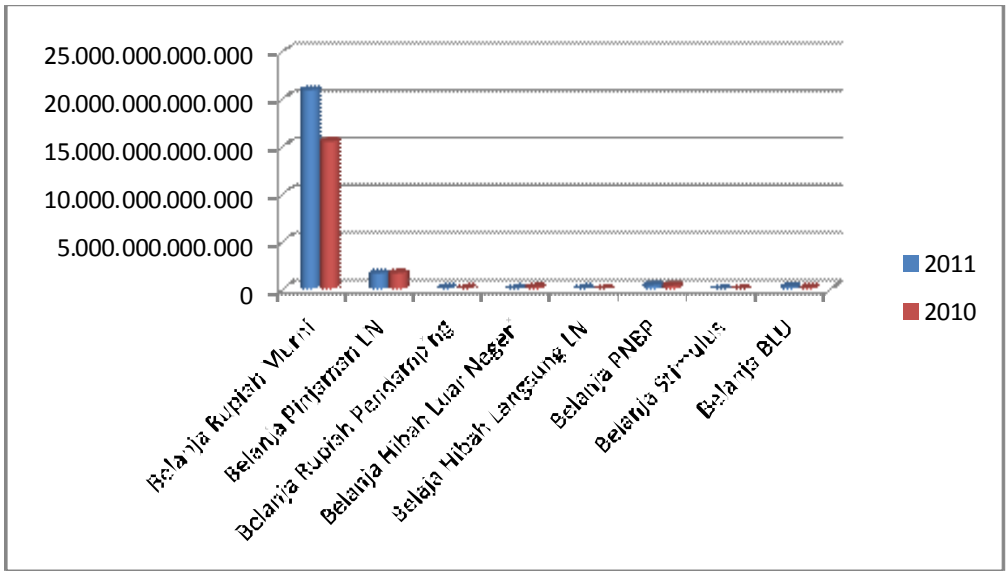

Realisasi Belanja ***netto*** Tahun 2011 *(Audited)* dan 2010 *(Audited)* menurut Tingkat Eselon 1 dapat dirinci dalam Tabel 11 :

Realisasi Belanja TA 2011 Rp 20,11 Triliun

Tabel 11.
Realisasi Belanja *netto* Tahun 2011 *(Audited)* dan 2010 *(Audited)* *netto*
Menurut Tingkat Eselon 1

Uraian	2011 (*Audited*)	2010 (*Audited*)
Sekretariat Jenderal	349.167.959.545,-	287.101.614.682,-
Inspektorat Jenderal	54.228.342.165,-	56.495.756.314,-
Ditjen Perhubungan Darat	2.012.865.982.668,-	1.720.361.328.200,-
Ditjen Perhubungan Laut	6.599.823.732.516,-	3.955.969.420.676,-
Ditjen Perhubungan Udara	4.924.259.150.337,-	3.943.108.219.881,-
Ditjen Perkeretaapian	3.686.203.224.684,-	3.416.966.124.064,-
Badan Litbang Perhubungan	117.884.782.072,-	81.081.638.938,-
Badan Diklat Perhubungan	2.365.610.059.827,-	2.100.995.239.179,-
Jumlah	**20.110.043.233.814,-**	**15.562.079.341.934,-**

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Kementerian Perhubungan gabungan (DIPA Umum dan BLU) ***netto*** Tahun 2011 *(Audited)* setelah dikurangi pengembalian belanja menjadi Rp. 20.110.043.233.814,- atau 86,16 persen dari pagu anggaran Rp. 23.340.702.622.000,- (Rupiah Murni serta Pinjaman dan Hibah).

Realisasi belanja *bruto* sebesar Rp. 20.117.377.019.153,- terdapat pengembalian belanja sebesar Rp. 7.333.785.339,- sehingga realisasi *netto* sebesar Rp. 20.110.043.233.814,- terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Komposisi realisasi Belanja *netto* menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini :

Grafik 4.
Komposisi Realisasi Belanja *netto* menurut Jenis Belanja TA 2011

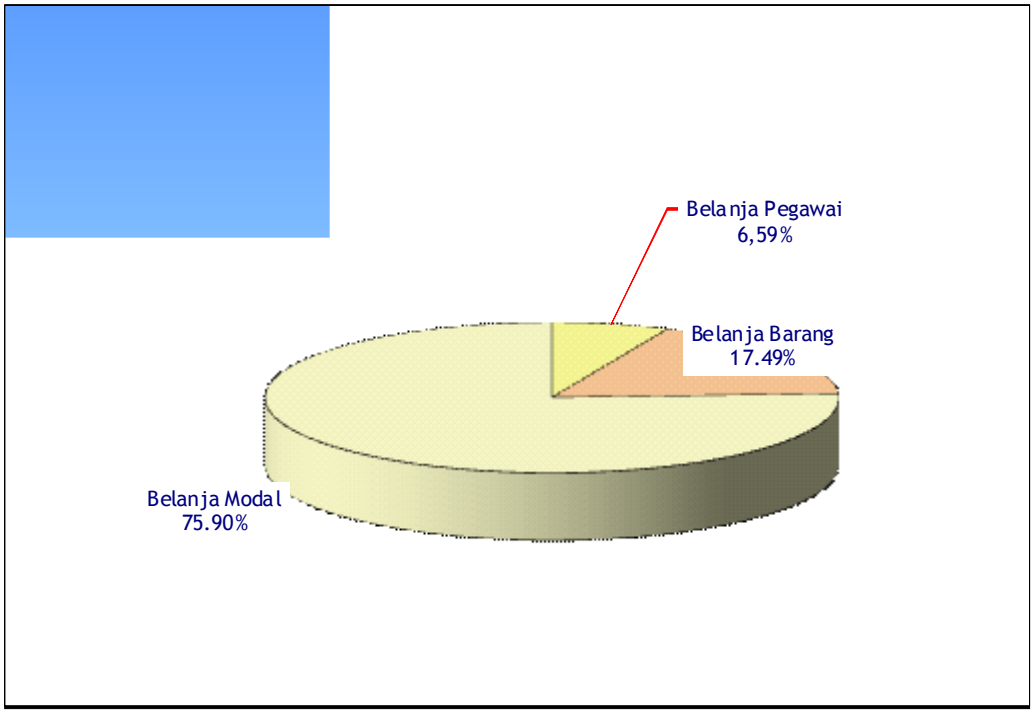

Belanja Pegawai Rp 1,3 Triliun

B.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai ***bruto*** Kementerian Perhubungan Tahun 2011 *(Audited)* adalah sebesar Rp 1.326.900.341.114,- atau 96,23 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 1.378.885.219.000,- (Rupiah Murni serta Pinjaman dan Hibah).
Pada Tahun 2010 terdapat realisasi belanja pegawai sebesar Rp 1.159.040.976.744,- sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp 167.859.364.370,-.
Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 12.
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2011 *(Audited)* dan 2010 *(Audited)*

Uraian		31-Des-11		31-Des-10	% naik (turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp	1.258.172.986.964	Rp	1.087.981.244.968	15,64
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	Rp	-	Rp	-	
Belanja Honorarium	Rp	20.366.737.500	Rp	34.902.353.250	(41,65)
Belanja Lembur	Rp	33.112.459.150	Rp	26.762.514.500	23,73
Belanja Vakasi	Rp	15.248.157.500	Rp	9.394.864.026	62,30
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	Rp	-	Rp	-	0,00
Total	**Rp**	**1.326.900.341.114**	**Rp**	**1.159.040.976.744**	14,48

Terdapat pengembalian belanja pegawai pada tahun 2011 *(Audited)* dan 2010 *(Audited)* sebesar Rp 481.884.483,- dan Rp 878.035.611,-.

Belanja Barang Rp 3,5 Triliun

B.2.2.1.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang ***bruto*** Kementerian Perhubungan Tahun 2011 *(Audited)* adalah sebesar Rp. 3.521.465.724.736,- atau 84,42 persen dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.171.426.711.000,- (Rupiah Murni serta Pinjaman dan Hibah).
Pada Tahun 2010 terdapat realisasi belanja barang ***bruto*** sebesar Rp. 2.699.193.858.094,- sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 822.271.866.642,-. Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Tabel 13.
Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun 2011 *(Audited)* dan 2010 *(Audited)*

Uraian		31-Des-11		31-Des-10	% naik/ (turun)
Belanja Barang Operasional	Rp	519.303.833.457	Rp	341.925.331.896	51,88
Belanja Barang Non Operasional	Rp	1.419.924.473.042	Rp	1.097.322.916.610	29,40
Belanja Jasa	Rp	203.979.789.284	Rp	133.102.260.863	53,25
Belanja Pemeliharaan	Rp	741.044.781.202	Rp	650.012.543.815	14,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp	447.518.532.588	Rp	358.044.592.534	24,99
Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp	40.927.126.769	Rp	34.237.780.358	19,54
Belanja Barang BLU	Rp	148.767.188.394	Rp	84.548.432.018	75,95
Jumlah	**Rp**	**3.521.465.724.736**	**Rp**	**2.699.193.858.094**	30,46

Terdapat pengembalian belanja barang pada tahun 2011 *(Audited)* dan Tahun 2010 *(Audited)* sebesar Rp 2.243.792.552,- dan Rp 1.562.571.703,- .

Belanja Modal Rp 15,269 Triliun

B.2.2.1.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal ***bruto*** Kementerian Perhubungan Tahun 2011 *(Audited)* adalah sebesar Rp. 15.269.010.953.303,- atau 85,83 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 17.790.390.692.000,- (Rupiah Murni serta Pinjaman dan Hibah).

Pada Tahun 2010 (*Audited*) terdapat realisasi Belanja Modal *bruto* sebesar Rp. 11.711.633.810.648,- sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.557.377.142.655,-

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut :

Tabel 14.

Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2011 *(Audited)* dan 2010 *(Audited)*

Uraian		31-Des-11		31-Des-10	% naik/ (turun)
Belanja Modal Tanah	Rp	490.148.917.233	Rp	90.084.307.875	444,10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	4.208.378.547.516	Rp	3.261.326.085.535	29,04
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	2.349.377.000.695	Rp	1.928.498.293.552	21,82
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	7.464.170.169.305	Rp	5.920.938.233.171	26,06
Belanja Modal Fisik Lainnya	Rp	749.067.812.924	Rp	508.357.419.065	47,35
Belanja Modal BLU	Rp	7.868.505.630	Rp	2.429.471.450	223,88
Jumlah	**Rp**	**15.269.010.953.303**	**Rp**	**11.711.633.810.648**	30,37

Terdapat pengembalian belanja modal pada tahun 2011 *(Audited)* dan Tahun 2010 *(Audited)* sebesar Rp 4.608.108.304,- dan Rp. 5.348.696.238,-.

Hal-hal penting terkait Belanja Modal diantaranya :

1. Terdapat pula *subsequent event* yaitu adanya SP3 yang diterima setelah tanggal neraca pada Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 88.766.872.096,-. Pada Ditjen Perhubungan Laut terdapat 8 (delapan) SP3 pada Satker *Maritime Telecommunication System Development Project* senilai Rp 64.101.445.776,- dan 1 (satu) SP3 pada Direktorat Kenavigasian senilai Rp 1.023.309.396,-. Pada Ditjen Perkeretaapian terdapat 1 (satu) SP3 pada Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian senilai Rp 2.268.045.303,-, 6 (enam) SP3 pada Satker Prasarana Kereta Api Jabotabek senilai Rp 20.823.459.760,- dan 1 (satu) SP3 Satker Perencanaan Teknis dan Pengawasan Perkeretaapian senilai Rp 550.611.861,-
2. Terdapat Realisasi Belanja Modal (peralatan dan mesin) Sebesar Rp. 3.729.091.300,- yang tidak menjadi aset tetap, hal ini karena anggaran yang direalisasikan untuk pembayaran biaya perawatan dan penitipan 16 unit kapal patroli kelas III dan juga telah dilakukan audit oleh BPKP atas penyelesaian tagihan biaya penitipan dan perawatan kapal patroli kelas III pada kegiatan di Bidang Penjagaan Laut DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan TA. 2011.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

B.3.1. KENDALA-KENDALA/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN

Pada tahun 2011 realisasi belanja bruto sebesar Rp. 20.117.377.019.153,- terdapat pengembalian belanja sebesar Rp. 7.333.785.339,- sehingga realisasi netto sebesar Rp. 20.110.043.233.814,- atau 86,16% dari anggaran sebesar Rp. 23.340.702.622.000,-.

Dalam pelaksanaan anggaran terdapat permasalahan sebagai berikut :

a. Untuk kegiatan yang bersumber dana PHLN dan hibah terkendala dengan prosedur pelaksanaan lelang dan administrasi pencairan yang harus menyesuaikan dengan ketentuan dari masing-masing negara donor dan seringkali donor hanya melaporkan pelaksanaan pekerjaan namun tidak melaporkan terkait realisasi keuangan;
b. Masih ada dana yang diblokir (tanda bintang);
c. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan disebabkan antara lain belum adanya kesepakatan dengan PEMDA, ketidakpastian data dukung, sengketa tanah dan bencana alam;
d. Penerbitan SP3 dari KPPN VI (KPPN khusus) yang melewati tahun anggaran sehingga cukup mempengaruhi realisasi;
e. Terdapatnya pagu minus disebabkan adanya Inpres Nomor 7 Tahun 2011 dan Tindak Lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 106/KMK.02/2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011.
f. Tingginya tingkat kehati-hatian para pengelola Anggaran dalam melakukan pelelangan.
g. Kurangnya pemahaman pengelola anggaran terhadap peraturan/ketentuan yang berlaku.
h. Adanya pergantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Selain itu terdapat pula pemekaran beberapa Satker di Kementerian Perhubungan diantaranya pada Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara, dengan rincian sebagai berikut :

a. Ditjen Perhubungan Laut :
    1) Adpel Tanjung Priok menjadi Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok;
    2) Adpel Belawan menjadi Otoritas Pelabuhan Belawan dan Syahbandar Pelabuhan Belawan;
    3) Adpel Makassar menjadi Otoritas Pelabuhan Makassar dan Syahbandar Pelabuhan Makassar;
    4) Adpel Tanjung Perak menjadi Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak dan Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Ditjen Perhubungan Udara :

Terdapat beberapa Satker Baru yaitu :

1) Otoritas Bandara Wilayah VI (Sumatera Barat);
2) Otoritas Bandara Wilayah VIII (Sulawesi Utara);
3) Otoritas Bandara Wilayah IX (Papua Barat);
4) Otoritas Bandara Wilayah X (Papua).

B.3.2. CATATAN PENTING DARI MASING-MASING ESELON I

A. DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Realisasi penyerapan DIPA TA.2011 terhadap pagu setelah Penghematan senilai Rp.2.095.941.061.000,- posisi per 31 Desember 2011, Keuangan **Rp.2.012.865.982.668,- (96,04 %)** ; Fisik = 100,00 %, terdiri dari :

Rincian per Jenis Belanja :

	URAIAN	REALISASI	PROSENTASI TERHADAP PAGU PEMANFAATAN
1	Belanja Pegawai	31.599.500.346	84,24
2	Belanja Barang	315.200.422.742	90,27
3	Belanja Modal	1.666.066.059.580	97,76
	Jumlah	**2.012.865.982.668**	**96,04**

1) Jumlah Paket Kontrak Strategis

a. Total Kontrak : 258 Paket
b. Sudah Kontrak : 256
c. Belum Kontrak : 2 Paket, terdiri dari :
d. Kegiatan tidak dilaksanakan : 2 Paket

(*TA. IBRD Road Safety Awareness 4843/INO-SRIP* pada Satker Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat, dan Pembebasan Tanah Pel. Penyeb. Hunimoa pada Satker Pengembangan LLASDP Maluku).

2) Kegiatan yang Bertanda Bintang

Terdapat dana blokir setelah penggunaan hasil penghematan senilai Rp. 9.565.416.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembangunan kapal 5000 GT Lts Merak Bakauheni senilai Rp. 9.515.416.000,- pada Satker Pengembangan Sarana Transportasi SDP.

b. Dana Non Alokasi senilai Rp. 50.000.000- pada Satker Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi.

3) Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan

Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 7.300.000.000,- terdiri dari :

a. Pembebasan Tanah Pel. Penyeb. Hunimoa pada Satker Pengembangan LLASDP Maluku senilai Rp.1.700.000.000,- dikarenakan BPN Maluku Tengah terbitkan sertifikat baru.
b. Kegiatan Pelatihan PPNS Bidang SDP senilai Rp.600.000.000,- karena peserta tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kem Hukum dan HAM (peserta yang mendaftar 16 orang sedang yang memenuhi persyaratan 9 peserta).
c. IBRD *Road Safety Awareness* 4843/IND-SRIP senilai Rp.5.000.000.000,- dikarenakan lelang ulang (PHLN).

4) Pagu Minus

Pada Laporan Realisasi Belanja per Satker pada Ditjen Perhubungan Darat terdapat beberapa Pagu Minus, disebabkan adanya Inpres No.7 Tahun 2011 dan Tindak Lanjut Keputusan Menteri Keuangan No. 106/KMK.02/2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011 antara Lain:

1. Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tenggara
   Terdapat pagu minus senilai Rp. 280.545.000,-
2. Satker Pengembangan LLAJ Gorontalo
   Terdapat pagu minus senilai Rp. 93.887.000,-
3. Satker Pengembangan LLAJ Papua Barat
   Terdapat pagu minus senilai Rp. 72.113.000,-
4. Satker Penunjang Keperintisan.
   Terdapat pagu minus senilai Rp. 80.925.000,-
5. Satker Pengembangan Sarana Transportasi SDP.
   Terdapat pagu minus senilai Rp. 382.704.000,-

Untuk penyelesaian pagu minus pada Satker di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat yang ditujukan kepada Sesjen Kemenhub Cq Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan No. KU.002/2/2/DJPD/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 perihal Penyelesaian Pagu Minus DIPA TA. 2011 di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

B. DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

1. Kendala dan Hambatan / Masalah Masih Rendahnya Realisasi Daya Serap Anggaran
   a. Untuk kegiatan bersumber dana PHLN pada umumnya terkendala dengan prosedur pelaksanaan lelang dan administrasi pencairan yang harus menyesuaikan dengan ketentuan dari masing-masing Negara Donor;
   b. Untuk kegiatan Rupiah Murni disebabkan hal-hal sebagai berikut :
      1) Perbedaan persepsi dengan Kementerian Keuangan dalam pembahasan pelaksanaan anggaran;
      2) Keterlambatan pelaksanaan karena menunggu proses teknis yang dilakukan oleh instansi lain seperti dalam hal audit dan pengesahan desain;
      3) Keterlambatan pelaksanaan akibat kendala cuaca buruk seperti pada kegiatan Keperintisan dan konstruksi fasilitas pelabuhan;
      4) Keterlambatan pelaporan realisasi anggaran oleh beberapa UPT/Satker Ditjen Perhubungan Laut.
   c. Tingginya tingkat kehati-hatian para pengelola anggaran dalam melakukan pelelangan
   d. Adanya penghematan 10% dan adanya transisi dari Keppres No. 80 Tahun 2003 menjadi Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
   e. Dalam proses pelelangan untuk kegiatan fisik terdapat 2 paket pelelangan yaitu konstruksi fisik & supervisi/ pengawasan. Karena Supervisi harus dilakukan dengan sistem pelelangan prakualifikasi, maka akan memakan waktu lebih lama.
   f. Saat penyusunan RKA-KL, kelengkapan TOR/Desain/RAB tidak sesuai dengan kondisi di lapangan;
   g. Menunggu *predge sounding* pada kegiatan pengerukan alur pelayaran;
   h. Menunggu pengesahan revisi desain pada kegiatan faspel laut;
   i. Menunggu terbentuknya *Port Management Unit* (PMU) sebagai tim ahli dalam persiapan proses lelang untuk kegiatan Belawan *Port* (PHLN) 2011.
   j. Tidak siapnya SDM pada masing-masing UPT/Satker, masih berorientasi sebagai manajemen perkantoran bukan sebagai manajerial proyek/pelaksana kegiatan pembangunan.
   k. Kekurangan SDM bersertifikat/SDM yang bersedia menjadi panitia lelang.
   l. Persetujuan gambar desain untuk pekerjaan lanjutan harus meminta persetujuan kembali kepada Direktorat Teknis terkait.
   m. Belum diserahterimakan pekerjaan tahun lalu, sehingga untuk pekerjaan tahap lanjutnya belum dapat dikerjakan.
   n. Masih terdapat masalah status tanah yang belum selesai.

2. Langkah – Langkah Percepatan Pelaksanaan Anggaran

   a. Pada tanggal 20 Januari 2011 Ditjen Perhubungan Laut telah mengadakan acara kegiatan pengarahan dan pembekalan kepada para Pengelola anggaran (KPA/PPK) TA. 2011 di Lingkungan Ditjen Perhubungan dan telah diterbitkan Instruksi Dirjen Perhubungan Laut No.UK.11/3/8/DJPL.11 tanggal 21 Januari 2011 tentang Prosedur Pencairan Blokir/Tanda Bintang & Realokasi Kegiatan Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dengan arahan antara lain sebagai berikut :

      1) Agar KPA/PPK segera mengusulkan penghapusan blokir dengan batas akhir tanggal 15 Februari 2011;

      2) Agar KPA/PPK segera Melaksanakan Proses Pelelangan, apabila belum melaksanakan pelelangan sampai dengan 31 Desember 2011, maka kegiatan tersebut akan diusulkan realokasi kegiatan kepada pihak terkait (DPR RI/ Kementerian Keuangan/Setjen Kemenhub).

   b. Telah dikeluarkan surat Dirjen Perhubungan Laut kepada seluruh UPT/Satker di lingkungan Ditjen Hubla No. KN.37/1/14/DJPL.11 pada tanggal 17 Februari 2011 untuk melakukan langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2011.

   c. Telah dilaksanakan revisi Rencana Penarikan Uang (RPU) di lingkungan Ditjen Hubla secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan;

   d. Telah dilakukan sosialisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran kepada para UPT dan Satker di lingkungan Ditjen Hubla dengan melibatkan Kementerian Keuangan sebagai narasumber.

KEGIATAN KONTRAK STRATEGIS TA. 2011

(dalam ribuan)

NO	KEGIATAN	VOLUME		PAGU
	Subsidi operasional angkutan laut perintis	**61**	**try**	**279,235,736**
1	Subsidi operasional angkutan laut perintis pangkalan Meulaboh	1	try	5,787,204
2	Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tanjung Pinang	1	try	5,793,985
3	Subsidi angkutan laut perintis pangkalan Teluk Bayur	2	try	10,135,063
4	Subsidi operasional angkutan laut perintis pangkalan P.Baai	1	try	5,071,647
5	Subsidi angkutan laut perintis pangkalan Surabaya	1	try	5,101,380
6	Subsidi angkutan laut perintis pangkalan Tanjung Wangi	1	try	5,101,380
7	Subsidi angkutan laut perintis pangkalan Bima	1	try	5,114,013
8	Subsidi angkutan laut perintis pangkalan Kupang	4	try	17,871,025
9	Subsidi pengoperasian kapal perintis pangkapan Sintete	2	try	8,853,392
10	Subsidi operasional angkutan laut perintis pangkalan Sukamara	1	try	4,618,191
11	Subsidi operasional angkutan laut perintis pangkalan Kotabaru	1	try	3,960,859
12	Subsidi pengoperasian kapal perintis pangkalan Bitung	2	try	10,857,069
13	Subsidi pengoperasian angkutan laut perintis pangkalan Tahuna	1	try	5,115,997
14	Subsidi operasional angkutan laut perintis Pangkalan Tilamuta	1	try	5,035,248
15	Subsidi pengoperasian kapal perintis pangkalan Kolonedale	1	try	5,000,700
16	Subsidi Operasional Angkutan Laut Pangkalan Pagimana	1	try	5,082,380
17	Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis pangkalan Kendari	2	try	7,968,859
18	Subsidi Operasional Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ujung Pandang	1	try	3,960,429
19	Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis pangkalan Mamuju	1	try	4,275,788
20	Subsidi Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ambon	5	try	22,886,901
21	Subsidi Angkutan Laut Perintis Pangkalan Saumlaki	2	Try	11,027,851
22	Subsidi operasional Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tual	2	try	10,748,352
23	Subsidi Operasional Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ternate	3	Try	14,743,473
24	Subsidi Operasional Angkutan Laut Perintis Pangkalan Sanana	1	Try	5,031,610
25	Subsidi Operasional Angkutan Laut Perintis Pangkalan Babang	1	Try	5,009,635
26	Subsidi operasional angkutan laut perintis pangkalan Jayapura	5	try	20,701,675
27	Subsidi operasional angkutan laut perintis pangkalan Merauke	6	try	21,625,974
28	Subsidi pengoperasian kapal perintis pangkalan Biak	3	try	12,951,489
29	Subsidi Operasional Angkutan Laut Perintis Pangkalan Sorong	3	try	12,703,616
30	Subsidi operasi angkutan laut perintis pangkalan Manokwari	4	try	17,100,551
	Kegiatan PHLN			
	Satker Sementara Fungsi Pelabuhan dan Pengerukan Pusat Jakarta			
1	- Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan (prioritas nasional)	2	pkt	25,000,000
	Satker Sementara Pengembangan Fasilitas Kenavigasian			
2	- VTS Selat Malacca-Singapura (Grant JICA)	1	pkt	60,000,000
3	- Maintenance and Replacement of Aids to Navigation in the Strait of Malacca and Singapore (ANF)	2	pkt	39,745,243
4	- Marine Electronic Highway (MEH) Project	1	pkt	12,000,000
5	- Ship Reporting System Project (INDOSREP)	1	pkt	64,000,000
	Satker Sementara Maritime Telecommunication System Development Project			
6	- Maritime Telecomunication System Development Project (Phase IV) IP-5202	1	pkt	90,000,000
	Satker Sementara Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok - Jakarta			
7	- Lanjutan Pembangunan Urgent Rehabilitation of Tg. Priok Port	1	pkt	214,650,757
	Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan			
1	pembangunan dan pengembangan Faspel Pamenang (selesai)	2	pkt	20,456,575
2	Penyelesaian pembangunan Faspel Pulau Ende	2	pkt	14,650,000
3	Penyelesaian pembangunan faspel laut Banggai tahap IV	2	pkt	10,000,000
4	Penyelesaian pembangunan Faspel Laut Pasang Kayu	2	pkt	21,874,400
5	Penyelesaian pembangunan Faspel Laut Budong-Budong	2	pkt	13,693,000
6	Penyelesaian pembangunan Faspel Laut Ahmad Yani-Ternate	2	pkt	9,778,000
7	Penyelesaian pembangunan Dermaga Umum - Sorong	2	pkt	15,000,000
8	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Arar/Sorong Tahap III	2	pkt	29,980,000
	kegiatan Pembangunan Kapal Perintis			
	Satker Sementara Fungsi Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Jakarta			
1	Lanjutan pembangunan Kapal Perintis 500 DWT (100%) - multiyears 2010 s/d 2011	2	pkt	10,955,850
2	Lanjutan pembangunan Kapal Perintis GT 1200 (100%) - multiyears 2010 s/d 2011	2	pkt	80,930,670
3	Pembangunan Kapal Perintis 500 DWT tahap I - multiyears 2011 s/d 2012 (...%)	2	pkt	7,000,000
4	Pembangunan Kapal Perintis 750 DWT tahap I - multiyears 2011 s/d 2012 (...%)	2	pkt	9,000,000
5	Pembangunan Kapal Perintis GT 1200 tahap I - multiyears 2011 s/d 2012 (...%)	2	pkt	32,800,000
	Kegiatan Pembangunan Kapal			
	Satker Sementara Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Pusat Jakarta			
1	Lanjutan Pembangunan Kapal Kelas I A tahap II - multiyears 2010 s/d 2012 (...%)	2	pkt	80,000,000
2	Lanjutan Pembangunan Kapal Kelas I B tahap II - multiyears 2010 s/d 2012 (...%)	2	pkt	60,000,000
3	Pembangunan Kapal Patroli Kelas I B tahap I - multiyears 2011 s/d 2013 (...%)	2	pkt	73,179,730

Page 1
Page 2

3. Semua kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai dan berakhir setiap tahun anggaran berjalan (tidak ada kontrak *multi years*).
4. Paket Kontrak Kegiatan-kegiatan Strategis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut :
   a. Jumlah paket kontrak : 416 Paket terdiri dari :
      Dana Rupiah Murni (RM) : 405 paket
      Dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) : 11 paket
   b. Sampai dengan 31 Desember 2011 telah dikontrakan sebanyak 407 paket terdiri dari :
      Dana Rupiah Murni (RM) : 399 paket
      Dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) : 8 paket
   c. Kegiatan yang belum bisa dikontrakan posisi 31 Desember 2011 sebanyak 9 paket terdiri dari :
      Dana Rupiah Murni (RM) : 6 paket
      Dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) : 3 paket
   d. Posisi 9 paket yang belum kontrak antara lain :
      Kegiatan terkena penghematan : 4 Paket
      Kegiatan yang belum dapat dikontrakkan : 5 Paket
      1) 4 paket Kegiatan yang terkena penghematan disebabkan antara lain :
         - Kegiatan Pembangunan Faspel Laut Muko-Muko pagu dana sebesar Rp. 15 Miliar tidak dilaksanakan karena status tanah yang belum selesai proses pembebasannya, dan telah direalokasi untuk dana pemanfaatan (2 Paket);
         - Kegiatan Pengerukan alur pelayaran Probolinggo pagu dana sebesar Rp. 8,71 Miliar, tidak dilaksanakan karena sesuai perhitungan volume dari *Engineer Estimate* (EE) pagu tidak mencukupi, dan telah direalokasi untuk dana pemanfaatan (2 Paket);

      2) 5 paket Kegiatan yang belum dapat dikontrakkan disebabkan antara lain :
         - Kegiatan Pembangunan Faspel Laut serasan pagu dana sebesar Rp. 10 Miliar, tidak dilaksanakan karena proses sanggah banding yang berlarut-larut, sisa waktu tidak mencukupi. (2 Paket);
         - Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan (PHLN) pagu dana sebesar Rp. 25 Miliar, belum dapat dikontrakkan karena sampai saat ini proses perbaikan usulan dokumen lelang ke IDB, persetujuan TOR PMU *expert* masih belum selesai untuk kegiatan *Workshop* (2 Paket).
         - Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (PHLN) sebesar Rp. 208.793.702.000,-, belum dapat dikontrakkan karena sampai saat ini proses evaluasi *Legal Contract* di Biro Hukum belum selesai (1 Paket).

C. DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

Terdapat Perbedaan Pagu anggaran antara yang ditetapkan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan yang disajikan dalam laporan keuangan. Perbedaan disebabkan revisi pagu anggaran belum diterima oleh UPT/Satker yang bersangkutan (masih berbentuk Daftar Revisi Anggaran/DRA belum berbentuk DIPA Revisi) dan hasil rekonsiliasi dengan KPPN setempat masih mengakui pagu anggaran sesuai dengan pagu yang disajikan dalam laporan keuangan ini. Perbedaan tersebut terdapat pada UPT/ Satker sebagai berikut :

No.	UPT/Satker	Pagu berdasar DJA	Pagu Berdasar SAK	Selisih
1	Bandara Rokot Sipora	38.745.531.000	31.056.308.000	7.689.223.000
2	Bandara Lalos Toli-Toli	24.165.097.000	26.687.247.000	(2.522.150.000)
3	Bandara Pogugol Buol	11.928.279.000	12.007.641.000	(79.362.000)
4	Bandara Kuabang kao	10.312.616.000	10.382.678.000	(70.062.000)
5	Bandara Wamena	80.707.570.000	80.491.041.000	216.529.000
6	Bandara Moanamani	4.051.015.000	4.340.103.000	(289.088.000)
7	Bandara Wasior	5.009.263.000	5.064.113.000	(54.850.000)
Total		**174.919.371.000**	**170.029.131.000**	**4.890.240.000**

D. DITJEN PERKERETAAPIAN

1. Realisasi Belanja per 31 Desember 2011 merupakan realisasi anggaran DIPA TA 2011 dari 25 (dua puluh lima) satuan kerja/kantor yang berada di 10 (sepuluh) wilayah/propinsi dalam lingkup Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari WA Tahun 2010 yang terbit sampai dengan 31 Desember 2011.
2. Terdapat Realisasi Belanja Hibah Pada Satker Peningkatan Fasilitas Sarana dan Keselamatan sebesar EUR 336.320, yang berupa *Railway Inspector Training* di Jerman pada tanggal 21 November s/d 16 Desember 2011 namun sampai saat ini belum terbit SP3 nya.
3. Terdapat Rincian Surat Perintah Pembukuan / Pengesahan (SP3) yang terbit pada Tahun 2011 sebagai berikut :

No.	No.WA	Loan	Tgl WA	Kurs	Realisasi WA		No. SP3	Tgl SP3	Realisasi SP3
Satker Perencanaan Teknis dan Pengawasan Perkeretaapian									
1	00054	IP-489	15-Mar-11	106.2517	JPY	13.307.000	000821U	22-Jun-11	1.432.885.783
2	00055	IP-489	15-Mar-11	106.2517	JPY	8.298.198	000822U	22-Jun-11	881.697.750
3	00253	IP-540	25-Apr-11	102.5823	JPY	13.113.112	000936U	24-Jun-11	1.385.741.223
4	02026	IP-540	17-Dec-10	102.5823	JPY	15.599.697	000772U	21-Jun-11	1.600.252.800
5	00190	IP-536	5-Apr-11	106.2517	JPY	53.934.606	000934U	24-Jun-11	5.709.754.703
6	00192	IP-536	5-Apr-11	106.2517	JPY	28.175.254	000935U	24-Jun-11	3.000.664.572
7	00396	IP-489	20-May-11	105.3448	JPY	11.627.584	001046U	01-Jul-11	1.236.787.739
8	00398	IP-489	20-May-11	105.3448	JPY	5.875.838	001041U	01-Jul-11	616.963.000
9	00446	IP-540	27-May-11	105.3448	JPY	12.156.215	001145U	06-Jul-11	1.292.476.738

10	00448	IP-540	27-May-11	105.3448	JPY	22.131.044	001161U	07-Jul-11	2.323.759.677
11	00528	IP-489	10-Jun-11	105.3448	JPY	5.741.343	001455U	21-Jul-11	612.566.562
12	00526	IP-489	10-Jun-11	105.3448	JPY	2.925.930	001456U	21-Jul-11	308.231.500
13	00766	IP-540	14-Jul-11	105.3448	JPY	9.410.970	002165U	14-Sep-11	991.396.800
14	00770	IP-489	15-Jul-11	105.2604	JPY	6.001.343	002163U	14-Sep-11	650.701.316
15	00769	IP-489	15-Jul-11	105.2604	JPY	2.928.276	002164U	14-Sep-11	308.231.500
16	00749	IP-540	14-Jul-11	109.5545	JPY	31.190.858	002820U	05-Okt-11	3.413.685.244
17	01061	IP-540	22-Aug-11	111.22115	JPY	19.033.814	002383U	13-Okt-11	2.114.847.923
18	01928	IP-540	16-Dec-11	116.3254	JPY	14.422.453	046412X	31-Dec-11	1.677.597.861
19	01927	IP-540	2-Dec-11	116.22375	JPY	28.690.220	046813X	31-Dec-11	3.334.484.956
20	02176	IP-540	16-Dec-11	116.22375	JPY	3.640.676	046969	31-Dec-11	423.319.732
21	01058	IP-540	22-Aug-11	111.1324	JPY	3.951.004	002948U	11-Okt-11	439.048.930
Satker Prasarana Perkeretaapian Jabotabek									
1	00025	KFW 260266973 GERMANY	31-Dec-09	12.068,29	EUR	8.575.589	000729U	21-Jun-11	2.723.008.418
2	00025	KFW 260266973 GERMANY	31-Dec-09	12.164,97	EUR	8.575.589	000730U	21-Jun-11	2.034.770.300
3	00025	KFW 260266973 GERMANY	31-Dec-09	12.343,68	EUR	8.575.589	001163U	07-Jul-11	46.659.091
4	00025	KFW 260266973 GERMANY	31-Dec-09	12.382,58	EUR	8.575.589	001176U	08-Jul-11	8.339.079.581
5	00025	KFW 260266973 GERMANY	31-Dec-09	12.184,71	EUR	8.575.589	001399U	20-Jul-11	834.813.473
6	00025	KFW 260266973 GERMANY	31-Dec-09	12.145,89	EUR	8.575.589	001400U	20-Jul-11	1.412.997.847
7	00025	KFW 260266973 GERMANY	31-Dec-09	12.184,71	EUR	8.575.589	001401U	20-Jul-11	6.838.186.216
8	00025	KFW 260266973 GERMANY	31-Dec-09	12.341,43	EUR	8.575.589	001652U	04-Agt-11	6.522.355.909
9	00025	KFW 260266973 GERMANY	31-Dec-09	12.096,36	EUR	8.575.589	002694U	04-Okt-11	10.638.177.087
10	00970	IP-490	5-Aug-11	111,84	JPY	95.119.354	002816U	05-Okt-11	1.596.864.016
11	00969	IP-490	5-Aug-11	107.1074	JPY	7.213.977	003032U	13-Okt-11	772.670.379
12	01196	IP-490	15-Sep-11	116.8418	JPY	2.806.673	003530U	01-Nop-11	327.936.725
13	01854	IP-490	23-Nov-11	116.3947	JPY	6.033.418	046128X	30-Des-11	702.257.965
14	01852	IP-490	23-Nov-11	116..3947	JPY	2.557.685	046129X	30-Des-11	297.701.084
15	01856	IP-490	24-Nov-11	116.3601	JPY	356.074	046130X	30-Des-11	41.391.516
16	01855	IP-490	24-Nov-11	116.36015	JPY	1.255.801	046131X	30-Des-11	145.979.277
17	01853	IP-490	23-Nov-11	116.3949	JPY	434.657	046141X	30-Des-11	50.591.897
18	01973	IP-490	8-Dec-11	115.997	JPY	288.160.067	046407X	31-Des-11	33.392.311.003
19	02160	IP-490	6-Dec-11	116.60585	JPY	243.819.121	046803X	31-Des-11	28.430.735.850
20	02161	IP-490	16-Dec-11	116.60585	JPY	6.917.218	046802X	31-Des-11	804.299.764
21	01974	IP-490	8-Dec-11	116.0834	JPY	21.739.665	046408X	31-Des-11	2.523.614.769
Satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Utara Jawa									
1	01846	IP-489	29-Dec-10	107.0699	JPY	4.317.947	001393U	19-Jul-11	462.322.396
2	00972	IP-489	8-Aug-11	107.7652	JPY	85.383.211	002693U	04-Okt-11	9.201.341.970

3	00609	IP-489	24-Jun-11	107.8927	JPY	328.913	002051U	08-Sep-11	35.487.328
4	00610	IP-489	24-Jun-11	106.1252	JPY	87.411.967	002018U	07-Sep-11	9.276.619.086
5	00949	IP-489	4-Aug-11	111.8403	JPY	2.717.788	002692U	04-Okt-11	303.654.578
6	00417	IP-489	23-May-11	103.8883	JPY	113.659.932	001340U	18-Jul-11	11.807.938.484
7	00419	IP-489	20-May-11	106.3667	JPY	3.837.972	001334U	18-Jul-11	408.232.416
8	00839	IP-489	12-Aug-10	106.58615	JPY	1.804.519	8611495C	11-Okt-10	8.043.561.656
9	00319	IP-489	2-May-11	105.676	JPY	648.706	001339U	18-Jul-11	68.552.655
10	00074	IP-489	17-Mar-11	107.4996	JPY	164.457	001338U	18-Jul-11	17.679.061
11	00071	IP-489	17-Mar-11	107,92	JPY	127.786.360	001333U	18-Jul-11	13.790.356.818
12	00078	IP-489	17-Mar-11	107.9173	JPY	151.571.921	001331U	18-Jul-11	16.357.229.956
13	00022	IP-489	8-Mar-11	107.4996	JPY	164.620	001332U	08-Jul-11	17.678.954
14	02359	IP-489	29-Dec-11	1086533	JPY	96.267.253	001394U	19-Jul-11	10.459.759.277
15	02352	IP-489	29-Dec-11	109.32435	JPY	1.569.648	001365U	18-Jul-11	171.429.326
Satker Pengembangan Fasilitas Perawatan Prasarana Perkeretaapian									
1	01422	KFW 200266973 GERMANY	17-Oct-11	12.376,98	EUR	124653,63	004593U	01-Des-11	1.542.835.485
2	02003	KFW 200566612 GERMANY	9-Dec-11	11833.035	EUR	125085.14	046189X	30-Dec-11	1.480.136.839
3	00536	KFW 200266973 GERMANY	15-Jun-11	12.182,97	EUR	339.905	001701U	08-Agt-11	4.141.062.901
Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian									
1	01872	KFW 200266973 GERMANY	25-Nov-11	12172.54	EUR	734.086,35	046053X	30-Des-11	8.935.695.458
Satker Pengembangan Sarana Perkeretaapian									
1	02368	KFW 200266973 GERMANY	29-Dec-11	12.403,82	EUR	174.431,00	000408U	08-Jun-11	607.172.942
2	00013	KFW 200266973 GERMANY	13-May-08	12.203,18	EUR	17.546.540,28	000744U	20-Jun-11	33.047.325.229
3	02368	KFW 200266973 GERMANY	29-Dec-11	12.203,18	EUR	174.431,00	000407U	08-Jun-11	1.566.165.033
4	00413	KFW 200266973 GERMANY	20-May-11	12.203,18	EUR	31.925,00	001141U	06-Jul-11	392.890.759
5	00013	KFW 200266973 GERMANY	13-May-11	12.203,18	EUR	17.546.540,28	001395U	19-Jul-11	10.547.132.815
6	00013	KFW 200266973 GERMANY	13-May-08	12.203,18	EUR	17.546.540,28	001396U	19-Jul-11	13.343.931.069
7	00013	KFW 200266973 GERMANY	13-May-08	12.203,18	EUR	17.546.540,28	003003U	13-Okt-11	3.169.570.401
8	01128	KFW 200266973 GERMANY	26-Aug-11	12.203,18	EUR	160,0630	003446U	27-Okt-11	1.925.179.341
9	01867	KFW 200266973 GERMANY	24-Nov-11	12.203,18	EUR	160.063,00	045876X	11-Des-11	1.962.579.661

Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Prasarana Perkeretaapian									
1	01769	IP-548	18-Nov-11	116.6969	JPY	11.200.610	046028X	30-Des-11	1.307.076.483
2	01471	IP-548	20-Oct-11	114.87565	JPY	25.206.817	004259U	24-Nop-11	2.895.649.487
3	01475	IP-548	20-Nov-11	114.87610	JPY	11.535.213	004260U	24-Nop-11	1.325.120.315
4	01232	IP-548	21-Sep-11	1169308	JPY	43.882.240	003833U	10-Nop-11	5.131.185.428
5	01234	IP-548	21-Sep-11	116.6601	JPY	44.936.977	003834U	10-Nop-11	5.242.352.277
6	01002	IP-548	12-Aug-11	110.8764	JPY	11.799.499	003199U	18-Okt-11	1.308.280.462
7	01000	IP-548	12-Aug-11	111.22115	JPY	19.436.820	003198U	18-Okt-11	2.161.785.472
8	00739	IP-548	13-Jul-11	106.0863	JPY	12.512.558	002795U	05-Okt-11	1.327.411.082
9	00740	IP-548	13-Jul-11	109.5545	JPY	17.922.900	002794U	05-Okt-11	1.963.534.348
10	00521	IP-548	9-Jun-11	106.69395	JPY	22.883.323	001452U	21-Jul-11	2.441.512.120
11	00520	IP-548	9-Jun-11	106.0280	JPY	12.205.794	001451U	21-Jul-11	1.294.155.995
12	00370	IP-548	11-May-11	105.8958	JPY	12.932.763	001003U	28-Jun-11	1.369.560.222
13	00369	IP-548	11-May-11	104.69865	JPY	27.122.152	001002U	28-Jun-11	2.839.652.699
14	00093	IP-548	18-Mar-11	110.2722	JPY	12.441.248	000827U	22-Jun-11	1.371.923.797
15	00094	IP-548	18-Mar-11	106.8318	JPY	22.359.505	000826U	22-Jun-11	2.388.706.166
16	00073	IP-548	17-Mar-11	108.0252	JPY	13.553.265	000824U	22-Jun-11	1.464.094.198
17	00068	IP-548	17-Mar-11	106.8318	JPY	13.949.880	000823U	22-Jun-11	1.490.290.790
18	00032	IP-548	9-Mar-11	106.2576	JPY	2.764.412	000869U	22-Jun-11	293.739.794
19	00030	IP-548	9-Mar-11	106.8318	JPY	4.700.023	000820U	22-Jun-11	502.111.917
20	00208	IP-548	13-Apr-11	102.5937	JPY	13.690.917	000774U	21-Jun-11	1.404.601.933
21	00207	IP-548	13-Apr-11	105.28205	JPY	21.909.551	000773U	21-Jun-11	2.306.682.443
								JUMLAH SP3	**347.144.447.798**

4. Pengembalian Belanja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2011 sebesar Rp. 54.947.720,- adalah pengembalian dari Belanja Pegawai (pengembalian belanja gaji dan tunjangan PNS serta belanja honorarium), Belanja Barang (pengembalian belanja barang operasional, belanja barang non operasional dan belanja perjalanan Dalam Negeri), Belanja Modal (pengembalian belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal jalan dan jaringan).

   Pengembalian Belanja TA 2011 diantaranya karena adanya kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga dikarenakan target realisasi fisik konstruksi tidak tercapai.

   Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Jenis Belanja TA. 2011

Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Pengembalian Belanja	
1	2	3	
51	Belanja Pegawai	Rp.	2.070.220,-
52	Belanja Barang	Rp.	37.677.500,-
53	Belanja Modal	Rp.	15.200.000,-
57	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,-
Dst.	Dst	Rp.	0,-
	Jumlah	Rp.	54.947.720,-

5. Realisasi Belanja Ditjen Perkeretaapian Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 3.686.203.224.684,- atau 77,98% dari anggaran sebesar Rp 4.727.369.083.000,- yang terdiri dari Anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 3.315.416.659.962,- atau 89,09 % dari anggaran sebesar Rp 3.721.232.494.000,- dan realisasi anggaran Pinjaman dan Hibah sebesar Rp 370.786.564.722,- atau sebesar 36,85% dari anggaran sebesar Rp 1.006.136.589.000,-

6. Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada DIPA TA 2011 Ditjen Perkeretaapian sebagai berikut:
   a. Satker perencanaan Teknis dan Pengawasan Perkeretaapian:
      1) Penyusunan Pradesain Pembangunan Jalur KA Bandara Soekarno Hatta
      2) *Engineering Services For Jakarta MRT Project* (IP-536)
      3) *Engineering Services Railway Double Tracking* Kutoarjo-Kroya pkt A & B (IP-540)
      4) *Review design* dan supervisi Pemb.Jalur Ganda Segmen III lintas Cikampek - Cirebon (IP-489)
   b. Pada Kantor Administrator TPK Gede Bage Bandung Pembebasan lahan lorong 21,22,23 di Kec.Koja (Jakut) anggaran tidak terserap karena waktu untuk negosiasi tidak mencukupi karena tanda bintang baru disetujui pencairannya 20 November 2011
   c. Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Prasarana Perkeretaapian:
      1) Jasa Konsultasi Elektrifikasi Padalarang – Cicalengka
      2) Jasa Konsultasi Desain Pembangunan Jalur Ganda Cirebon –Kroya Segmen I dan III (IP-548)
   d. Satker Pengembangan Fasilitas Perawatan Prasarana Perkeretaapian:
      1) *Procurement of track materials 1.000 Km and Turn-outs 200 unit* (*Loan China)*
      2) *Procurement of track materials 1.000 Km and Turn-outs 200 unit (Loan China)*
      3) Jasa Konsultansi *Track Maintenance Improvement Programme (Loan KfW)*
      4) *Track Maintenance Improvement Programme (Loan KfW)*
      5) *Track Benchmarking and Surveying* (RMP)
   e. Pembangunan depo Depok (IP-490) dan Infrastructure Jabotabek (Loan KfW) pada Satuan Kerja Prasarana Kereta Api Jabotabek:
   f. Pembangunan *Double-Double Track* Manggarai-Cikarang (IP-508) termasuk jasa konsultan sebesar Rp. 356.366.000.000,- pada Satuan Kerja Pembangunan *Double-double Track* dikarenakan Paket B1 masih dalam proses lelang, menunggu persetujuan evaluasi administrasi dan teknis dari JICA.
   g. Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa Tahap III (Kroya - Kutoarjo) dan penggantian Jembatan Baja (*Box Culvert*) lintas Purwosari-Wonogiri Pada Satker Peningkatan Jalan KA Lintas Selatan Jawa.
   h. Modifikasi Stasiun Cirebon (IP-489) dikarenakan baru terealisasi WA dan modifikasi Stasiun Cirebon dengan anggaran rupiah Murni pendamping pada Satker Peningkatan Jalan Lintas Utara Jawa.
   i. Satker Pengembangan Sarana perkeretaapian:
      1) Pengadaan 10 *train set* (*loan* KFW)
      2) Pengadaan Kereta kelas Ekonomi (K3) dilengkapi AC
      3) Pengadaan kereta Pembangkit dilengkapi fasilitas restorasi (MP3)

j. Pekerjaan Pembangunan Jalan KA *Shortcut Double Track* antara Cibungur-Tanjungrasadan pengembalian SPM untuk kegiatan Jalan KA, rel dan persinyalan pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Barat.
k. Lanjutan pekerjaan Peningkatan Persinyalan Elektrik dan Penataan *Track Layout* di stasiun Kisaran pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Utara.
l. Perbaikan Tubuh Ban, *Track* dan Pembuatan/Normalisasi Saluran lintas Baturaja-Prabumulih pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Selatan.
m. Pembangunan Jalan KA *Partial Double Track* antara Tulung Buyut-Blambangan Umpu (lanjutan) pada Satker Pengembangan perkeretaapian Lampung.
n. Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Keselamatan:
   1) Pengadaan peralatan Balai Yasa dan *Railways inspector Training* (*Loan* KfW) keduanya masih dalam poisis WA pada.
   2) Prediksi sisa pengadaan tanah (tdk terserap)
   3) sisa kontrak (Kegiatan Strategis) + APBNP
   4) sisa kontrak (Non Kegiatan Strategis; a/l kontrak supervisi)
o. Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian:
   1) Belanja Perjalanan Dinas
   2) Blokir non alokasi Belanja Barang
   3) Sisa Belanja Barang

E. BADAN LITBANG PERHUBUNGAN

1. Pada satuan kerja di lingkungan Badan Litbang Perhubungan terdapat kegiatan yang diberi tanda bintang yaitu pakaian dinas dan belanja operasional lainnya, namun akun telah direvisi dengan sisa dana blokir sebesar Rp. 28.030.000,-.
2. Rendahnya realisasi pada Badan Litbang Perhubungan (86,23 %) antara lain disebabkan :
   a) Kesalahan akun sehingga harus dilakukan revisi;
   b) Adanya kegiatan survei asal dan tujuan transportasi Nasional 2011 yang anggarannya cukup besar yaitu 31,5 % dari DIPA yang baru dilaksanakan pada Triwulan IV;
   c) Tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan anggaran yang sebelumnya diblokir mengingat persetujuan pembukaan blokir baru tanggal 6 Desember 2011.
3. Penghematan dan pemanfaatan anggaran tahun 2011 pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Litbang Perhubungan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan)

Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran Semula	Pagu Anggaran Menjadi	Dana Blokir/ Bintang
288752	Sekretariat Badan Litbang Phb	79.554.300	82.530.306	7.325.631
414267	Puslitbang Phb Darat dan KA	15.847.000	14.641.404	4.600
288944	Puslitbang Phb Laut	13.016.600	12.166.600	5.030
288951	Puslitbang Pbh Udara	13.406.600	12.486.600	5.700
634171	Puslibang MTM	14.744.400	17.743.990	1.003.000
	Jumlah	136.568.900	136.568.900	8.343.961

Penghematan anggaran tersebut tidak menyebabkan perubahan total pagu anggaran Badan Litbang Perhubungan.

Persetujuan pembukaan blokir tanda bintang tersebut, baru diterima pada tanggal 6 Desember membuat satuan kerja di lingkungan Badan Litbang Perhubungan tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan anggaran sehingga menyebabkan penurunan persentasi realisasi anggaran tahun 2011.

F. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Terdapat perubahan pagu anggaran tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :
   a. APBN-P (Reward dan ABT) sebesar Rp. 18.330.155.000,- terdiri dari :
      - ABT pada Satker Sekretariat BPSDMP
      - Reward pada satker ATKP Makassar
   b. BLU sebesar Rp. 61.917.973.000,-
   c. Penghematan awal anggaran dari 18 UPT/Satker sebesar Rp. 122.308.961.000,- setelah dikeluarkan anggaran penghematan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut sebesar Rp. 36.541.016.000,- menjadi sebesar Rp. 85.767.945.000,-
   d. Pemanfaatan hasil penghematan anggaran;
   e. Penggunaan dana PNBP Satker ATKP Medan sebesar Rp. 153.300.000,-

2. Realisasi DIPA TA. 2011 sampai dengan posisi 31 Desember 2011 sebesar Rp. 2.365.610.059.827,- atau sebesar 84,78 %, tidak optimalnya penyerapan anggaran tersebut dikarenakan hal – hal sebagai berikut :
   a. Adanya kegiatan yang bertanda bintang atau blokir
   b. Kegiatan tidak dilaksanakan
   c. Sisa Kontrak
   d. Sisa dana kegiatan
   e. Sisa dana BLU yang akan menjadi saldo awal kas tahun berikutnya.

3. Kendala/hambatan pelaksanaan anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan disebabkan hal-hal sebagai berikut :
   a. Tingginya tingkat kehati-hatian para pengelola anggaran;
   b. Terdapat perbedaan PAGU DIPA TA. 2011 pada Satker Pusbang SDM Phb. Laut bahwa semula diusulkan penghematan pagu sebesar Rp. 36.541.016.000,- dan telah disetujui DPR untuk penghematannya namun dalam perjalanannya setelah dibahas di DJA untuk Satker yang lain DIPA Revisinya telah diterbitkan sebagai dokumen sumber khusus untuk Pusbang SDM Phb. Laut DIPA Revisi tidak diterbitkan oleh Kanwil DJPB Jakarta.
   c. Kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
   d. Adanya kegiatan yang pelaksanaannya terkendala masalah lahan;
   e. Adanya keterlambatan pengiriman bahan baku dan kendala cuaca.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Neraca per 31 Desember 2011 *(Audited)* adalah Aset sebesar Rp 139.260.331.934.285.- Kewajiban sebesar Rp 161.634.624.499,- dan Ekuitas Dana sebesar Rp 139. 098.697.309.786,-.

Tabel 15.
Komposisi Neraca per 31 Desember 2011 *(Audited)*

Uraian	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
Aset	139,260,331,934,285	80,007,078,957,656	59,253,252,976,629
Kewajiban	161,634,624,499	486,495,561,796	(324,860,937,297)
Ekuitas Dana	139,098,697,309,786	79,520,583,395,860	59,578,113,913,926

Jumlah Aset per 31 Desember *2011 (Audited)* sebesar Rp 139.260.331.934.285,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 1.082.113.588.520,- Aset Tetap sebesar Rp 135.489.192.929.555,- dan Aset Lainnya sebesar Rp 2.687.717.692.541,-.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 *(Audited)* sebesar Rp 161.634.624.499,- merupakan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 161.634.624.499,-.

Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2011 *(Audited)* sebesar Rp 139.098.697.309.786,- terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 921.786.687.790,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 138.176.910.622.096,-.

Grafik komposisi neraca dapat disajikan di bawah ini:

Grafik 5.
Komposisi Neraca

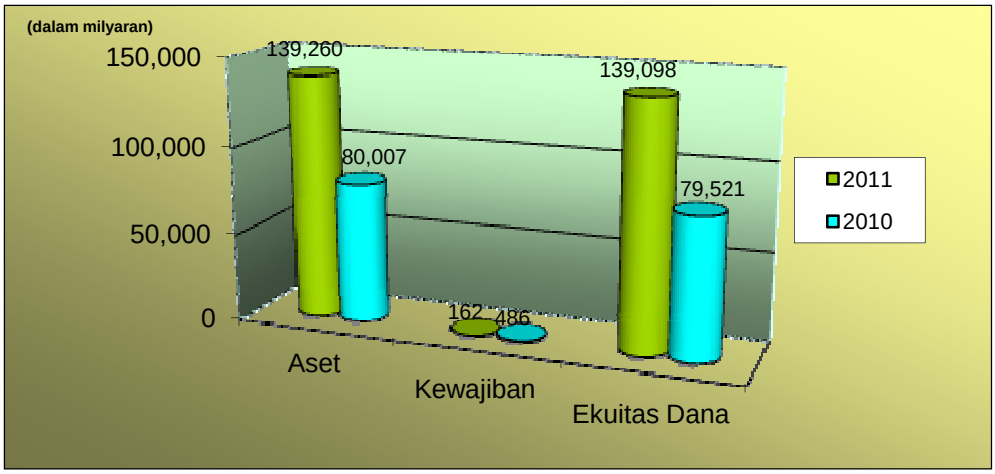

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

ASET

Aset Lancar

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 473,99 juta

C.2.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 473.989.973,- dan sebesar Rp 854.093.528,-.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 16.
Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I

Kode	Uraian Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan/Penurunan
01	Sekretaris Jenderal	225,898,562	357,710,031	(131,811,469)
02	Inspektorat Jenderal	11,495,000	0	11,495,000
03	Ditjen Perhubungan Darat	12,207,000	18,681,000	(6,474,000)
04	Ditjen Perhubungan Laut	177,431,196	204,162,810	(26,731,614)
05	Ditjen Perhubungan Udara	36,451,764	273,539,687	(237,087,923)
08	Ditjen Perkeretaapian	5,862,100	0	5,862,100
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	4,644,351	0	4,644,351
Total		473,989,973	854,093,528	-380,103,555

Daftar Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran setelah tanggal neraca adalah sebagai berikut :

Tabel 17.
Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010 *(Audited)*

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
01	Sekretaris Jenderal	357.710.031	357.710.031	0
03	Ditjen Perhubungan Darat	18.681.000	18.681.000	0
04	Ditjen Perhubungan Laut	204.162.810	204.162.810	0
05	Ditjen Perhubungan Udara	273.539.687	273.539.687	0
Jumlah		**854.093.528**	**854.093.528**	**0**

Tabel 18.
Penyetoran Saldo per 31 Desember 2011 *(Audited)*

Kode	Uraian Eselon I	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara	Sisa Kas Yang Belum Disetor Ke Kas Negara
01	Sekretaris Jenderal	225,898,562	67,276,168	158,622,394
02	Inspektorat Jenderal	11,495,000	11,495,000	0
03	Ditjen Perhubungan Darat	12,207,000	12,207,000	0
04	Ditjen Perhubungan Laut	177,431,196	177,431,196	0
05	Ditjen Perhubungan Udara	36,451,764	36,451,764	0
08	Ditjen Perkeretaapian	5,862,100	5,862,100	0
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	4,644,351	4,644,351	0
	Total	**473,989,973**	**315,367,579**	**158,622,394**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp 10.02 miliar

C.2.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per *31 Desember 2011 (Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* sebesar Rp 10.024.539.870,- dan sebesar Rp 345.809.190.529,-.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas negara.

Tabel 19.
Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per eselon I

Kode	Uraian Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan/Penurunan
03	Ditjen Perhubungan Darat	1.452.000	107.190.000	(105.738.000)
04	Ditjen Perhubungan Laut	3.732.335.536	336.754.172.371	(333.021.836.835)
05	Ditjen Perhubungan Udara	4.715.325.031	427.609.486	4.287.715.545
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	1.575.427.303	8.520.218.672	(6.944.791.369)
Total		10.024.539.870	345.809.190.529	(335.784.650.659)

Tabel 20.
Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010 *(Audited)*

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
03	Ditjen Perhubungan Darat	107.190.000	107.190.000	0
04	Ditjen Perhubungan Laut	336.754.172.371	336.754.172.371	0
05	Ditjen Perhubungan Udara	427.609.486	427.609.486	0
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	8.520.218.672	7.185.000	8.513.033.672
Total		345.809.190.529	337.296.156.857	8.513.033.672

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2010 sebesar Rp 8.513.033.672,- merupakan saldo masyarakat (pungutan) di luar mekanisme APBN yang tidak disetor ke Kas Negara dan digunakan langsung di tahun 2011 saldonya nihil.

Tabel 21.
Penyetoran Saldo per 31 Desember 2011 *(Audited)*

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
03	Ditjen Perhubungan Darat	1,452,000	1,452,000	0
04	Ditjen Perhubungan Laut	3,732,335,536	3,732,335,536	0
05	Ditjen Perhubungan Udara	4,715,325,031	4,715,325,031	0
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	1,575,427,303	0	1,575,427,303
Total		10,024,539,870	8,449,112,567	1,575,427,303

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan saldo dana masyarakat (pungutan) diluar mekanisme APBN yang belum dipergunakan dikelola secara manual dan tetap dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

Terdapat koreksi audit atas saldo Kas di Bendahara Penerimaan satker Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Mauk yang disetorkan ke kas Negara pada tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp 6.125.953,-.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 22
Pungutan Diluar Mekanisme APBN
yang Belum Disetor ke Kas Negara

UPT/Satker	Saldo
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Medan	166,000,000
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makasar	1,081,150,400
Sekolah Tinggi Tranportasi Darat Bekasi	322,150,950
Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Mauk	6,125,953
Total	**1,575,427,303**

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp 1,94 miliar

C.2.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per *31 Desember 2011 (Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 1.873.343.972,- dan sebesar Rp 126.491.895,-

Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai. Beberapa kemungkinan .adanya kas pada Bendahara Pengeluaran dapat terjadi karena:

a. Adanya pendapatan yang telah diterima sebelum tanggal neraca namun sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke kas negara, meliputi:
   1) Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca yang belum menerapkan Treasury National Pooling(TNP).
   2) Pungutan pajak yang belum disetor ke kas umum negara pada tanggal neraca.
   3) Pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung pada rekening Bendahara Pengeluaran.
   4) Pengembalian belanja yang belum disetor ke kas Negara.

   Terhadap akun tersebut kontra akunnya ialah akun kredit Pendapatan yang Ditangguhkan (212411).

b. Adanya kewajiban satker kepada pihak lain, yaitu Jika ada Dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran seperti uang honor atau SPPD yang belum dibagikan kepada pihak lain.
   Terhadap akun tersebut kontra akunnya ialah akun kredit Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (211291).

Tabel 23.
Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
03	Ditjen Perhubungan Darat	1,000	244,127	(243,127)
04	Ditjen Perhubungan Laut	1,872,387,079	125,397,839	1,746,989,240
05	Ditjen Perhubungan Udara	955,893	849,929	105,964
	Total	**1,873,343,972**	**126,491,895**	**1,746,852,077**

Tabel 24.
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	31-Des-11	31-Des-10
Sisa SPM yang belum dibayarkan	Rp 1.000	
Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara	Rp 20.881.850	Rp 93.790.457
Utang kepada pihak ketiga	Rp 615.200	
Kas Lainnya di K/L dari hibah	Rp 1.851.845.922	Rp 32.701.438
Jumlah	**Rp 1.873.343.972**	**Rp 126.491.895**

Kas Lainnya di K/L dari hibah merupakan rekening penampungan ANF dan Norad pada satker Pengembangan Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut. Berdasarkan Surat Pengesahan Hibah Langsung sisa dana yang ada di rekening (Kas Lainnya dan Setara Kas) sebesar Rp 1.919.991.523,-, namun berbeda dengan rekening Koran ANF dan Norad yang berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2011 (Rp 9.068,-) saldonya sebesar Rp 1.851.845.922,- sehingga terdapat selisih kurs sebesar Rp 68.145.601,- Terhadap selisih kurs telah dilakukan koreksi audit.

Terhadap saldo kas lainnya dan setara kas tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas Negara atau telah dibayarkan kepada pihak lain setelah tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25.
Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010 ke Kas Negara

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
03	Ditjen Perhubungan Darat	244.127	244.127	0
04	Ditjen Perhubungan Laut	92.696.401	92.696.401	0
05	Ditjen Perhubungan Udara	849.929	849.929	0
Total		**93.790.457**	**93.790.457**	**0**

Tabel 26.
Pembayaran Saldo Kas per 31 Desember 2010
Kepada Pihak Lain

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Pembayaran kepada pihak lain	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
04	Ditjen Perhubungan Laut	32.701.438	32.701.438	0
Total		**32.701.438**	**32.701.438**	**0**

Tabel 27.
Penyetoran Saldo per 31 Desember 2011 ke Kas Negara

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
04	Ditjen Perhubungan Laut	1,871,771,879	19,925,957	1,851,845,922
05	Ditjen Perhubungan Udara	955,893	0	955,893
Total		**1,872,727,772**	**19,925,957**	**1,852,801,815**

Tabel 28.
Pembayaran Saldo Kas per 31 Desember 2011
Kepada Pihak Lain

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Pembayaran kepada pihak ketiga	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
03	Ditjen Perhubungan Darat	1,000	1,000	0
04	Ditjen Perhubungan Laut	615,200	615,200	0
Total		**616,200**	**616,200**	**0**

Selain itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengelola dana bank dalam rangka menampung dana Revolving Fund Committee (RFC). Penjelasan dana RFC sebagai berikut :

1. Pembentukan dana Revolving Fund (dana yang dikelola secara bergiliran selama 5 tahun sekali) berdasarkan atas Memorandum of Understanding (MOU) antara Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Singapura disatu pihak dengan The Malacca Straits Council (MSC) atas nama asosiasi-asosiasi non pemerintah Jepang dipihak lain yang ditandatangani pada tanggal 11 Pebruari 1981, untuk menanggulangi pencemaran minyak dari kapal di selat Malaka dan selat Singapura.
2. Dana tersebut selanjutnya diserahkan untuk dikelola secara bergiliran sesuai huruf abjad selama 5 (lima) tahun oleh 3 (tiga) negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Periode financial ditetapkan sejak tanggal 1 April sampai 31 Maret. *Authority* dari pihak Indonesia yang ditunjuk untuk mengelola dana tersebut adalah Ditjen Perhubungan Laut. Sesuai hasil pertemuan *RFC Tech* tanggal 30 september – 1 Oktober 2010, Indonesia mendapat giliran untuk mengelola dana *RFC* per tanggal 1 April 2011 s.d. 31 Maret 2016 yang sebelumnya dikelola *Maritime and Port Authority of Singapore (MPA).*
3. Dana RFC dalam pengelolaannya dapat bertambah maupun berkurang jumlahnya, tergantung fluktuasi tingkat suku bunga bank pada saat dana RFC tersebut dikelola. Dalam pengelolaannya terdapat dua jenis penggunaan dana yaitu dana pokok RFC dan pendapatan dari hasil bunga dari dana pokok RFC. Dana pokok RFC hanya dapat digunakan oleh 3 (tiga) negara Pantai jika terjadi pencemaran minyak dari kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura. Sedangkan dana hasil bunga dari dana pokok RFC digunakan untuk membiayai kegiatan administrasi pengelolaan dana RFC serta membiayai pertemuan-pertemuan reguler RFC serta kegiatan lain dibawah kerangka RFC.
4. Sesuai dengan *Rules and Procedures* dalam MOU, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebagai *Authority* kepengelolaan RFC diantaranya adalah membuka rekening bank guna menampung dana RFC.

5. Pembukaan rekening RFC tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dengan surat persetujuan nomor S-9983/MK.5/2011 tanggal 26 Oktober 2011. Pembukaan rekening dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2011 dengan nomor rekening 6786788106 pada Bank BNI Kantor Layanan Abdul Muis/ Kantor Cabang Utama Harmoni dengan posisi saldo 31 Desember 2011 Rp. 42.382.250.472,-.
6. Serah terima kepengelolaan *RFC Fund* dari Pemerintah Singapura kepada Pemerintah Indonesia untuk periode tahun 2011 s.d. 2016 telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2012 di Singapura.

Kas pada BLU Rp 132,85 miliar

C.2.4 Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 (*Audited)* adalah sebesar Rp 132.850.346.828,- dan Rp 93.038.372.556,-. Terdapat kenaikan sebesar Rp 39.811.974.272,- Kas pada BLU ini merupakan saldo penerimaan kas yang berasal dari pendapatan BLU yang belum digunakan, terdapat pada 7 (tujuh) Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tabel 29.
Besarnya Saldo Kas pada masing-masing BLU

Badan Layanan Umum	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan/Penurunan
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	35,981,347,353	22,710,082,374	13,271,264,979
Balai Diklat Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surab	11,384,123,049	-	11,384,123,049
BP3IP	59,567,583,853	42,833,281,555	16,734,302,298
Akademi Teknik Keselamatan Penerbanga	2,615,141,470	-	2,615,141,470
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	9,100,190,715	10,270,794,313	(1,170,603,598)
Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar	11,902,272,585	16,471,195,817	(4,568,923,232)
BPPTD Tegal	2,299,687,803	753,018,497	1,546,669,306
Jumlah	132,850,346,828	93,038,372,556	39,811,974,272

Pada Tahun 2011 terdapat 4 (empat) rekening pada BP2IP Surabaya yang dibuka tanpa persetujuan Menteri Keuangan, namun pada posisi 31 Desember 2011 tinggal 1 (satu) rekening yang masih digunakan dengan saldo Rp 1.307.723.664,52. Saldo tersebut telah dicatat dalam neraca dan rekening telah ditutup pada tanggal 23 Februari 2012.

Piutang Bukan Pajak Rp 187.04 miliar

C.2.5 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 187.044.736.967,- dan sebesar Rp 222.641.909.452,-. Terdapat penurunan saldo Piutang Bukan Pajak sebesar Rp 35.597.172.4851,-

Tabel 30.
Piutang Bukan Pajak per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	39,834,547	44,790,892	(4,956,345)
03	Ditjen Perhubungan Darat	5,974,061	4,815,840	1,158,221
04	Ditjen Perhubungan Laut	162,028,662,846	161,459,516,437	569,146,409
05	Ditjen Perhubungan Udara	8,659,909,275	60,604,044,283	(51,944,135,008)
08	Ditjen Perkeretaapian	16,088,586,238		16,088,586,238
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	221,770,000	528,742,000	(306,972,000)
	Total	**187,044,736,967**	**222,641,909,452**	**(35,597,172,485)**

Atas Piutang Bukan Pajak sebesar Rp 187.044.736.967,- dapat dijelaskan :

Piutang bukan pajak Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2011 *(Audited)* sebesar Rp 39.834.547,- merupakan piutang yang berasal dari sewa rumah dinas satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal.

Piutang Bukan Pajak Ditjen Perhubungan Darat merupakan piutang Jasa Pelabuhan pada UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangau senilai Rp. 5.974.061,-

Piutang Bukan Pajak Ditjen Perhubungan Laut secara total per 31 Desember 2011 *(Audited)* sebesar Rp 162.028.662.846,-. Piutang sebesar Rp 161.838.385.053,- merupakan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Jasa Kepelabuhan dan Kenavigasian). Sedangkan piutang sebesar Rp 190.277.793,- pada Disnav Sibolga merupakan jaminan pelaksanaan kegiatan tahun 2011 yang diakui sebagai piutang berdasarkan rekomendasi KPPN setempat.

Terdapat Piutang Bukan Pajak yang menjadi pengecualian senilai Rp 9.261.071.618,70 dan US102,585.09 atau setara Rp 10.191.313.215,-. Piutang ini menjadi pengecualian karena :

1. Pengakuan kembali penghapusan Piutang Bukan Pajak eks-PT. Pertamina Tahun 2005 dan 2006 karena dokumen tidak tersedia senilai Rp 1.341.415.370,70 dan USS 16,621.94 yang terakumulasi pada 13 satker Ditjen Perhubungan Laut setara dengan Rp 1.492.143.123,-
2. Pengakuan kembali pengahapusan Piutang Bukan Pajak eks-PT. Pelni Tahun 2005 dan 2008 karena dokumen tidak tersedia senilai Rp 1.580.875.330,- yang terakumulasi pada 55 satker Ditjen Perhubungan Laut.
3. Belum teridentifikasi wajib bayarnya Rp 6.338.780.918,- dan US$ 85,963.15 pada 5 satker Ditjen Perhubungan Laut setara Rp 7.118.294.762,-
   (Kurs tengah BI US$ 1 = Rp 9.068,-)

Terdapat Piutang Bukan Pajak yang tidak dapat dibayarkan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu oleh Pihak Debitor PT. ASDP (Persero) dan Perusahaan Penyeberangan Swasta Lainnya (7 Perusahaan) yang tergabung dalam GAPASDAP (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) sebesar Rp. 17.856.195.215,- dan $ 391,09. Piutang tersebut tidak dibayarkan karena debitor tidak mau mengakui utangnya kepada Ditjen Perhubungan Laut dengan alasan PP No 14 Tahun 2000 tidak menyebutkan jenis dan tariff untuk kapal penyeberangan. Kementerian Perhubungan telah menyerahkan piutang tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan surat nomor KU.202/38/22 Phb 11 tanggal 22 Maret 2011 dan sampai posisi 31 Desember 2011 belum ada progress dan tindak lanjut dari Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN).

Piutang Bukan Pajak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara diantaranya senilai Rp 5.130.341.105,00 pada Satker Bandar Udara Achmad Yani yang merupakan Bang Garansi yang dicairkan pada TA 2012 karena pekerjaan pengurukan tahap V (termasuk pengawasannya) tidak selesai.

Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya terdapat pada Satker Pengembangan Sarana Perkeretaapian berupa :

1. Piutang senilai Rp 15.165.984.712,00 merupakan Bank Garansi yang dicairkan pada TA 2012 karena pekerjaan repowering tiga rangkaian KRL yang tidak selesai.
2. Piutang senilai Rp 922.601.526,00 merupakan Bank Garansi yang dicairkan pada TA 2012 karena pekerjaan pengadaan tiga unit lokomotif Diesel Hydroulik tidak selesai.

Piutang Bukan Pajak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan senilai Rp. 221.770.000,- merupakan kewajiban dari Tunggakan Pembayaran Uang Makan Taruna pada Satker PIP Makassar.

Tabel 31.
Daftar Klasifikasi Piutang Kementerian Perhubungan

Klasifikasi	Jumlah (Rp)
Klasifikasi Lancar	183.290.919.979
Klasifikasi Kurang Lancar	265.302.213
Klasifikasi Diragukan	95.508.720
Klasifikasi Macet	3.393.006.055
Total	**187.044.736.967**

Tabel 32.
Piutang Bukan Pajak Berdasarkan Umur Piutang Tahun Anggaran 2011

Kode	Eselon I	Umur Piutang				Saldo Piutang
		Belum Jatuh Tempo	(1 - 2) Bulan	(2 - 3) Bulan	> 3 Bulan	
01	Sekretaris Jenderal	761,737	39,072,810			39,834,547
03	Ditjen Perhubungan Darat	5,974,061				5,974,061
04	Ditjen Perhubungan Laut	158,888,808,525	5,859,403		3,133,994,918	162,028,662,846
05	Ditjen Perhubungan Udara	8,306,789,418		95,508,720	257,611,137	8,659,909,275
08	Ditjen Perkeretaapian	16,088,586,238				16,088,586,238
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan		220,370,000		1,400,000	221,770,000
	Total	183,290,919,979	265,302,213	95,508,720	3,393,006,055	187,044,736,967

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp 253, 33 juta

C.2.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar minus Rp 253.331.744,- dan sebesar Rp 0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Pada Tahun 2010 Kementarian Perhubungan belum menerapkan Penyisihan Piutang Tak Tertagih namun telah menerapkan kualitas piutang sesuai PMK 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. **Penerapan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada neraca belum dilakukan secara konsisten dan memadai pada neraca kantor/satker, disajikan secara bertahap pada kantor/satker yang telah siap sesuai kondisi piutang dan kualitasnya di lapangan.** Hal ini karena PMK 201/PMK.06/2010 dan peraturan turunannya baru diterbitkan di akhir tahun 2011 (bulan Desember) yaitu Perdirjen Perbendaharaan Nomor 82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan belum disosialisasikan sepenuhnya baik oleh Kementerian Keuangan kepada masing-masing K/L maupun Kementerian Perhubungan kepada kantor/satker.

Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih didasarkan atas kualitas piutang yaitu piutang lancar sebesar 5%, piutang tidak lancar 10%, piutang diragukan sebesar 50% dan piutang macet sebesar 100%. Untuk piutang yang telah diserahkan ke DJKN tidak dibentuk penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100% (macet) karena telah direklasifikasi ke asset lain-lain.

Tabel 33.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretariat Jenderal	(3,911,090.00)	0	(3,911,090)
04	Ditjen Perhubungan Laut	(5,859,403)	-	(5,859,403)
05	Ditjen Perhubungan Udara	(243,561,251)	-	(243,561,251)
	Total	(253,331,744)	-	(253,331,744)

Piutang Bukan Pajak (netto) Rp 186,79 miliar

C.2.7 Piutang Bukan Pajak *(Netto)*

Jumlah Piutang Bukan Pajak Netto per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* sebesar Rp 186.791.405.223,- dan Rp 222.641.909.452,-

Tabel 34.
Piutang Bukan Pajak *(Netto)* per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretariat Jenderal	35,923,457.00	44,790,892	(8,867,435)
03	Ditjen Perhubungan Darat	5,974,061	4,815,840	1,158,221
04	Ditjen Perhubungan Laut	162,022,803,443	161,459,516,437	563,287,006
05	Ditjen Perhubungan Udara	8,416,348,024	60,604,044,283	(52,187,696,259)
08	Ditjen Perkeretaapian	16,088,586,238		16,088,586,238
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	221,770,000	528,742,000	(306,972,000)
	Total	186,791,405,223	222,641,909,452	(35,850,504,229)

Bagian Lancar TP/TGR Rp 46.17 juta

C.2.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi merupakan tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2011 (*Audited*) dan 31 Desember 2010 (*Audited*) adalah sebesar Rp 46.170.400,- dan Rp 6.308.896.481,- .

Terdapat tuntutan perbendaharaan pada 4 bendahara penerima yang diselesaikan secara damai dengan rincian sebagai berikut :

a. Markus Palijama (Bendahara Penerima Kanpel Jailolo)
b. Moksen Kudubun (Bendahara Penerima Kanpel Gebe).
c. Abdul Hakim (Bendahara Penerima UPP Amamapare)
d. Mardiansa Tasiam (Bendahara Penerima UPP Pomako)

Tabel 35.
Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
03	Ditjen Perhubungan Darat	0	488.455.105	(488.455.105)
04	Ditjen Perhubungan Laut	46.170.400	1.325.381.795	(1.279.211.395)
05	Ditjen Perhubungan Udara	0	206.575.620	(206.575.620)
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	0	4.288.483.961	(4.288.483.961)
	Total	46.170.400	6.308.896.481	(6.262.726.081)

Terdapat denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp. 2,2 Miliar pada LLASDP Kep. Riau berdasarkan hasil Riksus Itjen Kementerian Perhubungan akan dibayarkan dan disetor ke Kas Negara secara bertahap dan tidak disajikan sebagai piutang karena masih menunggu hasil keputusan Kejaksaan (belum ditetapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak. Nilai yang telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 200.000.000 pada tanggal 18 Januari 2012.

Penyisihan piutang tak tertagih –BL TP TGR minus Rp.230.852

C.2.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2011 (*Audited*) dan per 31 Desember 2010 (*Audited*) adalah sebesar minus Rp 230.852,- dan sebesar Rp 0,-

Tabel 36.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BL TP/TGR per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	(230,852)		(230,852)
	Total	(230,852)	-	(230,852)

Penyisihan piutang yang diterapkan adalah 5‰ atas kualitas lancar.

BL TP/TGR Rp 45.94 juta

C. 2.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2011 (*Audited*) dan per 31 Desember 2010 (*Audited*) adalah sebesar Rp 45.939.548,- dan Rp 6.308.896.481,-

Tabel 37.
Bagian Lancar TP/TGR (Netto) per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
03	Ditjen Perhubungan Darat	0	488,455,105	(488,455,105)
04	Ditjen Perhubungan Laut	45,939,548	1,325,381,795	(1,279,442,247)
05	Ditjen Perhubungan Udara	0	206,575,620	(206,575,620)
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	0	4,288,483,961	(4,288,483,961)
	Total	45,939,548	6,308,896,481	(6,262,956,933)

Uang Muka Belanja Rp511.74 juta

C.2.11 Uang Muka Belanja

Jumlah Uang Muka Belanja per 31 Desember 2011 (*Audited*) dan per 31 Desember 2010 (*Audited*) adalah sebesar Rp 511.735.738 dan sebesar Rp 3.372.081.629,-

Tabel 38.
Uang Muka Belanja per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	57,200,000	49,500,000	7,700,000
05	Ditjen Perhubungan Udara	454,535,738	3,322,581,629	(2,868,045,891)
	Total	511,735,738	3,372,081,629	(2,860,345,891)

Uang muka belanja pada Ditjen Perhubungan udara berasal dari transaksi atas jaminan pekerjaan yang masih ada, terdapat pada Bandara Medan Baru dan Adbandara Polonia senilai Rp 454.535.738,-. Sedangkan pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 57.200.000,- untuk sewa gedung kantor di Adpel Lhokseumawe.

Piutang Kegiatan Operasional BLU Rp. 409.50 juta

C. 2.12 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2011 (*Audited*) dan per 31 Desember 2010 (*Audited*) adalah sebesar Rp 409.502.500,- dan Rp 0,-. yang terdapat pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

Tabel 39.
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum berdasarkan Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	409.502.500	-	409.502.500
	Total	409.502.500	-	409.502.500

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum yang terdapat pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran sebagai berikut :

No	Uraian	Rupiah
1	Piutang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	
	a. ANT I	11.000.000
	b. ATT I	22.000.000
	c. ANT II	123.550.000
	d. ATT II	98.800.000
	e. ANT III	59.200.000
	f. ATT III	46.800.000
	g. Refresing D.IV ATT	1.600.000
2	Piutang Jasa Layanan Pendidikan Diploma IV	
	a. Permakanan	19.565.000
	b. Uang Semester VII Nautika	7.872.500
	c. Uang Semester VII Teknika	11.440.000
	d. Uang Semester VIII KALK	1.900.000
	e. Uang Wisuda	5.775.000
	Total	409.502.500

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU minus Rp 41.91 juta

C.2.13 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2011 (*Audited*) dan per 31 Desember 2010 (*Audited*) adalah sebesar minus Rp 41.909.700,- dan Rp 0,-. Yang terdapat pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

Tabel 40.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan Operasional BLU

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	(41.909.700)	-	(41.909.700)
	Total	(41.909.700)	-	(41.909.700)

Piutang Kegiatan Operasional BLU (netto) Rp. 367.59 juta

C.2.14 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)

Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto) pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran per 31 Desember 2011 dan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 367.592.800,- dan Rp 0,- .

Tabel 41.
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	367.592.800	-	367.592.800
	Total	367.592.800	-	367.592.800

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU Rp. 62.89 juta

C.2.15 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Jumlah Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2011 (*Audited*) dan per 31 Desember 2010 (*Audited*) adalah sebesar Rp 62.895.200,- dan sebesar Rp 0,- yang terdapat pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran berupa piutang sewa ruangan untuk kantin dan rumah dinas.

Tabel 42.
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	62.895.200	-	62.895.200
	Total	62.895.200	-	62.895.200

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU minus Rp314.476

C.2.16 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2011 (*Audited*) dan per 31 Desember 2010 (*Audited*) adalah sebesar minus Rp 314.476,- dan Rp 0,- Yang terdapat pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

Tabel 43.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	(314.476)	-	(314.476)
	Total	(314.476)	-	(314.476)

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU (netto) Rp.62.58 juta

C.2.17 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (Netto)

Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto) pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran per 31 Desember 2011 dan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 62.580.724,- dan Rp 0,-

Tabel 44.
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	62.580.724	-	62.580.724
	Total	62.580.724	-	62.580.724

Persediaan Rp 750.42 miliar

C.2.18 Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2011 (*Audited*) dan 31 Desember 2010 (*Audited*) adalah sebesar Rp 750.419.837.513,- dan sebesar Rp.1.051.477.759.601,-. Nilai Persediaan tersebut sudah termasuk Persediaan Badan Layanan Umum sebesar Rp 1.170.208.683,- yang terdapat pada 5 (lima) satker Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tabel 45.
Rincian Persediaan per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	842,210,116	211,007,785	631,202,331
02	Inspektorat Jenderal	12,684,025	110,886,675	(98,202,650)
03	Ditjen Perhubungan Darat	645,357,066,865	940,403,943,746	(295,046,876,881)
04	Ditjen Perhubungan Laut	55,143,865,450	66,175,838,681	(11,031,973,231)
05	Ditjen Perhubungan Udara	43,717,119,655	39,718,189,830	3,998,929,825
08	Ditjen Perkeretaapian	2,947,952,550	2,072,992,850	874,959,700
11	Badan Litbang Perhubungan	8,775,861	2,415,230	6,360,631
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	2,390,162,991	2,782,484,804	(392,321,813)
	Total	750,419,837,513	1,051,477,759,601	(301,057,922,088)

Nilai persediaan yang disajikan pada neraca per eselon I merupakan nilai berdasarkan hasil laporan keuangan masing-masing eselon I yang sudah dilakukan stock opname.

Tabel 46.
Rincian Persediaan masing-masing satker Badan Layanan Umum

BLU	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	201,557,050	60,990,175	140,566,875
BP3IP	785,136,258	588,270,198	196,866,060
Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar	120,599,495	119,663,900	935,595
ATKP Surabaya	678,930	0	678,930
Balai Diklat Ilmu Pelayaran Surabaya	62,236,950	0	62,236,950
Total	1,170,208,683	768,924,273	401,284,410

Nilai persediaan Badan Layanan Umum yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Laporan Keuangan masing-masing Badan Layanan Umum yang sudah dilakukan stock opname.

Tabel 47.
Daftar Persediaan per 31 Desember 2011 (*Audited*)

Uraian	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan/(Penurunan)
Barang Konsumsi	34.085.665.811	30.594.378.813	3.491.286.998
Amunisi	71.501.324	76.625.000	(5.123.676)
Bahan Untuk Pemeliharaan	1.781.462.846	2.003.851.505	(222.388.659)
Suku Cadang	43.034.036.133	53.532.912.304	(10.498.876.171)
Persediaan Untuk di Jual /diserahkan Kepada Masyarakat	599.439.651.531	938.686.046.724	(339.246.395.193)
Pita Cukai, Materai dan Leges	456.000	1.145.500	(689.500)
Bahan Baku	40.168.137.082	11.391.810.407	28.776.326.675
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	99.257.450	270.763.117	(171.505.667)
Persediaan lainnya	31.739.669.336	14.920.226.231	16.819.443.105
Jumlah	**750.419.837.513**	**1.051.477.759.601**	**(301.057.922.088)**

Perlakuan Persediaan pada Ditjen Perhubungan Darat khusus Aset Tetap yang akan diserahkan ke Pemda atau masyarakat yang akan disajikan dalam neraca diatur dalam Instruksi Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.4320/KU.006/DRJD/2010 tentang Perlakuan (*Treatment*) Akuntansi Terhadap Hasil Pekerjaan Belanja Modal di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

Aset Tetap

Aset Tetap Rp 135.49 triliun.

C.2.19 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 135.489.192.929.555,- dan sebesar Rp 76.948.072.224.400,-.

Tabel 48.
Posisi Aset Tetap

No.	Uraian	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
1	Tanah	50,522,076,113,982	15,742,998,295,701	34,779,077,818,281
2	Peralatan dan Mesin	13,988,322,892,427	10,267,045,050,301	3,721,277,842,126
3	Gedung dan Bangunan	6,777,229,917,115	7,424,787,099,160	(647,557,182,045)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	47,984,747,039,184	31,703,066,180,021	16,281,680,859,163
5	Aset Tetap Lainnya	2,303,166,929,758	1,909,275,829,328	393,891,100,430
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13,913,650,037,089	9,900,899,769,889	4,012,750,267,200
	Jumlah	135,489,192,929,555	76,948,072,224,400	58,541,120,705,155

Posisi Aset Tetap tersebut sudah termasuk Aset Tetap yang ada pada 7 (tujuh) satker Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 3.168.478.027.655,- pada 31 Desember 2011 dan sebesar Rp 1.874.904.413.521 pada 31 Desember 2010.

Tabel 49.
Posisi Aset Tetap Badan Layanan Umum

No.	Uraian	31-Des-11	30-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
1	Tanah	1.223.489.280.480	1.065.197.712.958	158.291.567.522
2	Peralatan dan Mesin	643.140.909.230	335.420.378.662	307.720.530.568
3	Gedung dan Bangunan	1.199.196.156.350	433.894.968.413	765.301.187.937
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.866.982.003	14.244.555.248	24.622.426.755
5	Aset Tetap Lainnya	11.326.948.158	4.861.299.540	6.465.648.618
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	52.457.751.434	21.285.498.700	31.172.252.734
	Jumlah	3.168.478.027.655	1.874.904.413.521	1.293.573.614.134

Grafik 6.
Posisi Aset Tetap

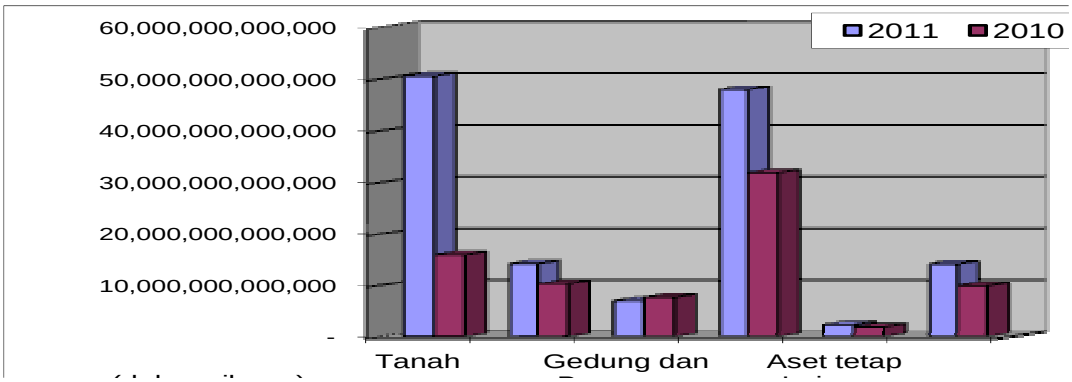

Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 50.
Daftar Perbandingan Aset Tetap antara
Neraca dan SIMAK BMN per *31 Desember 2011 (Audited)*

No.	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca	Aset Tetap dalam SIMAK BMN	Selisih
1	Tanah	50.522.076.113.982	Rp 50.522.076.113.982	0
2	Peralatan dan Mesin	13.988.322.892.427	Rp 13.987.153.572.427	1.169.320.000
3	Gedung dan Bangunan	6.777.229.917.115	Rp 6.773.432.262.115	3.797.655.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.984.747.039.184	Rp 47.984.747.039.184	0
5	Aset Tetap Lainnya	2.303.166.929.758	Rp 2.301.695.802.757	1.471.127.001
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.913.650.037.089	Rp 13.913.650.037.089	0
	Jumlah	**Rp 135.489.192.929.555**	**Rp 135.482.754.827.554**	**Rp 6.438.102.001**

Terdapat perbedaan posisi Aset Tetap per 31 Desember 2011 *(Audited)* dengan SIMAK - BMN sebesar Rp 6.438.102.001 yang terdapat pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 1.471.127.001,- dan Badan pengembangan SDM Perhubungan sebesar RP 4.966.975.000,- Posisi pada Neraca tercatat sebesar Rp 135.489.192.929.555,- sedangkan pada SIMAK-BMN tercatat sebesar Rp 135.482.754.827.554,-.

Pada Ditjen Perhubungan Laut disebabkan karena adanya pekerjaan pembangunan/renovasi aset gedung kantor yang bukan merupakan aset Ditjen Perhubungan Laut namun merupakan aset PT. Pelindo yang dipinjam pakai oleh Ditjen Perhubungan Laut sebagai Kantor Syahbandar Utama Surabaya. Dan Syahbandar Utama Surabaya akan berkoordinasi dengan PT. Pelindo mengenai pencatatan aset (renovasi gedung kantor) apakah akan dicatat oleh Syahbandar Utama Surabaya atau akan diserahterimakan hasil renovasi gedung kantor ke PT. Pelindo untuk dicatat sebagai aset (renovasi gedung kantor dan perbaikan pelataran parkir) . Selain itu adanya renovasi aset gedung kantor berupa penebangan pohon dan perbaikan pelataran parkir yang dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Hubla, tidak menambah nilai aset tetap pada Neraca SIMAK-BMN namun hanya dicatat pada Aset Tetap Neraca. Kantor Pusat Ditjen Hubla masih menelusuri data atas pekerjaan renovasi gedung kantor dan perbaikan pelataran parkir untuk dilakukan pencatatannya ke dalam Neraca SIMAK-BMN.

Tabel 51.
Perbedaan SIMAK_BMN dan SAKPA Pada Ditjen Perhubungan Laut

NO	Kode SATKER	NAMA SATKER	SAKPA	SIMAK	SELISIH
1	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	35.684.131.677	35.621.882.676	62.249.001
2	413428	SYAHBANDAR UTAMA SURABAYA	1.408.878.000	-	1.408.878.000
	JUMLAH				1.471.127.001

Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan senilai Rp 4.966.975.000,00 merupakan hibah dari PT. Garuda Indonesia yang telah dicatat dalam neraca namun belum diinput dalam aplikasi SIMAK-BMN berupa aset Peralatan dan Mesin serta aset Gedung dan Bangunan karena belum teridentifikasi secara detail.

Pada tahun 2011 aset Inspektorat Jenderal mengalami mutasi kurang sebesar Rp 497.184.250,- karena adanya penghapusan aset sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor : KP.906 Tahun 2011 tanggal 15 Nopember 2011 aset yang dihapuskan adalah :

a) Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 304.183.000,-;

b) Aset Hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) oleh Tim Keppres sesuai Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor : BA.34/WKN.07/KP.01.02/2008 tanggal 06 Nopember 2008 sebesar Rp 188.701.070,- sehingga berjumlah Rp 304.183.000,- + Rp 188.701.070,- = Rp 492.884.070,-;

Terdapat perbedaan Penghapusan sebesar Rp 4.300.180,- karena sesuai Surat Keputusan Nomor KP. 906 Tahun 2011 tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp 497.184.250,- dengan nilai perolehan, sedangkan aset peralatan dan mesin hasil Inventarisasi penilaian Tim Keppres sebesar Rp 492.884.070,-

Tanah Rp.50.52 triliun

C.2.19.1 Tanah

Nilai tanah per *31 Desember 2011 (Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 50.522.076.113.982,- dan Rp 15.742.998.295.701,-. Nilai ini sudah termasuk nilai Tanah yang ada pada satker Badan Layanan Umum yang ada pada di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 1.223.489.280.480,-.

Mutasi Tanah sebesar Rp 34.779.077.818.281,- dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 52.
Rincian Mutasi Tanah

Saldo Awal	**15,742,998,295,701**
Penambahan :	
Penambahan Saldo Awal	27,132,123,614
Pembelian	54,761,961,168
Transfer Masuk	1,486,766,752
Hibah (Masuk)	9,315,450,000
Penyelesaian Pembangunan	232,854,132,669
Reklasifikasi Masuk	35,925,719,309,336
Pengembangan Nilai Aset	3,555,376,720
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	267,178,308
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	105,308,091,409
Pengembangan Melalui KDP	115,032,920,000
	36,475,433,309,976
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-99,695,500
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-3,940,200,000
Penghapusan	-8,224,500,000
Transfer Keluar	-462,601,880,609
Reklasifikasi Keluar	-1,194,499,175,564
Koreksi Pencatatan	-25,845,950,822
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-2,500,000
Pengurangan saldo awal	-1,141,589,200
	-1,696,355,491,695
Mutasi	**34,779,077,818,281**
Saldo Akhir	**50,522,076,113,982**

Tabel 53.
Rincian Tanah per Eselon I

Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
Sekretaris Jenderal	269.353.603.500	269.353.603.500	0
Ditjen Perhubungan Darat	495.331.713.669	495.331.713.669	0
Ditjen Perhubungan Laut	1.036.851.461.781	994.415.984.517	42.435.477.264
Ditjen Perhubungan Udara	11.239.077.230.363	11.529.559.345.906	(290.482.115.543)
Ditjen Perkeretaapian	36.031.814.484.472	1.085.129.075.934	34.946.685.408.538
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	1.449.647.620.197	1.369.208.572.175	80.439.048.022
Total	50.522.076.113.982	15.742.998.295.701	34.779.077.818.281

Tanah senilai Rp 50.522.076.113.982,00 tersebut seluas 313.083.844 m^2 . Atas tanah seluas tersebut perlu dijelaskan bahwa :

1. Tanah sekurang-kurangnya seluas 2.225.430 m^2 yang belum bersertifikat.
2. Tanah sekurang-kurangnya seluar 560.500 m^2 belum jelas kepemilikannya pada :
   a. Bandar Udara Kuala Pembuang seluas 450.000 m^2
   b. Bandar Udara Dewadaru seluas 100.500 m^2
   c. Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang seluas 10.000 m^2

3. Tanah sekurang-kurangnya seluas 582.710 m^2 dikuasai pihak lain pada :
   a. Distrik Navigasi Semarang seluas 1.620 m^2
   b. Distrik Navigasi Surabaya seluas 581.090 m^2
4. Tanah sekurang-kurangnya seluas 48.614 m2 belum diketahui lokasinya pada :
   a. Otoritas Bandar Udara Juanda seluas 25.834 m^2
   b. Distrik Navigasi Surabaya seluas 22.780 m^2
5. Tanah sekurang-kurangnya seluas 60.275 m^2 dalam sengketa dengan pihak lain pada :
   a. Administrator Pelabuhan Tarakan seluas 525 m^2
   b. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Uban seluas 59.750 m^2

Terdapat koreksi audit BPK RI terhadap tanah berupa :

1. Koreksi catat atas hibah tanah dari Pemkot Madiun kepada BPSDM untuk pembangunan Lembaga Pendidikan Perkeretaapian sejumlah 19 bidang seluas 181.385 m^2 senilai Rp 9.069.250.000,- sesuai BA No. 030/3985/401.101/2011 tanggal 5 Desember 2011 dan BA No. 030.3988.401.101/2011 tanggal 5 Desember 2011.
2. Koreksi nilai tanah sebesar Rp 15.884.776.880,- karena adanya penginputan hasil IP yang dilakukan secara sensus berdasarkan data PT. KAI .

Pada Ditjen Perhubungan Udara, Pembayaran atas Belanja Modal Tanah kepada H. ANDI BASO BASTIAN Jl. Argapura Kanon, Jayapura sebesar Rp. 11.821.808.000,- atas uang Pinjaman/gugatan atas ganti rugi tanah Bandara Sentani No.19/MP3/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 dan Perjanjian Nomor : 02/PERJANJIAN/KUM/PPK/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tidak dicatat dalam penambahan Aset Tanah.

Terdapat Transfer Keluar dari Kantor Pusat Setditjen Perhubungan Udara sebesar Rp.2.158.051.653.442,- kepada:

- PT. Angkasa Pura I (Persero) terkait dengan adanya Berita Acara Serah Terima Operasional Hasil Kegiatan dari Satuan kerja pengembangan Bandar Udara Juanda Surabaya tanggal 31 Januari 2011 No. AU/08883/KU.060/I/2011 dan BA. 410/KU.20/2011-DU sebesar Rp. 2.158.011.653.442,-.
- Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap sebesar Rp. 40.000.000,- berupa mesin foto copy ex proyek Palembang yang tercatat di Kantor Pusat Setditjen Perhubungan Udara.

Ditjen Perkeretaapian masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap diantaranya :

Permasalahan pengadaan tanah/pembebasan antara lain :

- Satker Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Selatan telah membayar kepada PT Gembala Sriwijaya untuk pembebasan tanah sebesar Rp. 1.564.763.582 dan uang yang masih dititipkan pada Pengadilan Kayu Agung sebesar Rp. 337.487.500,-
- UPT Terminal Peti Kemas Gedebage Bandung

  Terdapat permasalahan pembebasan tanah dan bangunan Pasoso di Lorong 21,22,23 Kec. Koja Tanjung Priuk Jakarta Utara seluas 5.878 M^2. Tahun Anggaran 2011 sudah dilakukan pembayaran kepada 2 KK seluas 273 M^2 (sisa 40 KK) adapun langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

  1. Membentuk Panitia terpadu yang terdiri dari unsur-unsur terkait terdiri dari, Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Walikota Jakarta Utara, BPN Jakarta Utara, Dinas Perumahan Jakarta Utara, Dinas Pertanian dan Kehutanan Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Kelurahan Koja dan Kantor Administrator Terminal Peti Kemas Gedebage Bandung tertanggal 01 Nopember 2011;
  2. Melakukan rapat-rapat baik dengan Panitia maupun warga serta menginventarisasi, mengukur dan mendata tanah/bangunan;
  3. Membuat daftar nominatif hasil inventarisasi pengukuran, pendataan tanah bangunan dan tanaman;
  4. Melakukan rapat-rapat negosiasi dan Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman di Lorong 21,22,23 di Jakarta Utara;
  5. Tim Menyepakati harga:

     Tanah di Lorong 21,22 dan 23 sebesar Rp. 3.000.000,- per meter dan Tanah di Jalan Jampea sebesar0 Rp .5.750.000,- per meter.

     Harga tersebut diatas masih dibawah besaran ganti rugi yang telah dinilai oleh Jasa Konsultasi Penilaian Harga Tanah (Appraisal) Kantor Jasa Penilai Publik (KJJPP) Samsul Hadi Wahyono Adi Hendra Gunawan dan rekan sebesar Rp. 3.200.000,- dan tanah di jalan Jampea sebesar Rp. 6.3100.000,-

     Untuk besaran Ganti Rugi bangunan dan tanaman disesuaikan dengan harga yang diberikan oileh Dinas Instansi terkait.
  6. Yang menyetujui untuk dibayar sebesar Rp. 3.000.000,- Per Meter sebanyak 22 KK sedangkan di Jampea dibayar sebesar Rp. 5.750.000,- per Meter sebanyak 1 KK.

Peralatan dan Mesin Rp 13.99 triliun

C.2.19.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan mesin per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 13.988.322.892.427,- dan Rp 10.267.045.050.301,-. Nilai ini sudah termasuk nilai tanah yang ada pada satker Badan Layanan umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 643.140.909.230,-.

Mutasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp 3.721.277.842.126,- dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 54.
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Awal	**10,267,045,050,301**
Penambahan :	
Penambahan Saldo Awal	1,182,837,876,563
Pembelian	690,107,702,524
Transfer Masuk	152,087,962,408
Hibah (Masuk)	124,790,951,991
Penyelesaian Pembangunan	2,763,291,422,744
Reklasifikasi Masuk	943,054,439,271
Perolehan Lainnya	2,161,000,000
Uraian Transaksi Tidak Ada	9,754,201,756
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	180,207,901
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks	1,281,480
Pengembangan Nilai Aset	56,748,825,558
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	1,022,478,885
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	69,412,000
Pengembangan Melalui KDP	75,803,389,420
Hibah (Masuk)	1,169,320,000
	6,003,080,472,501
Pengurangan Nilai Aset	-217,742,060
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-41,616,404,285
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	14,268,578,535
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-11,579,965,478
Penghapusan	-5,173,732,804
Transfer Keluar	-1,326,908,818,831
Hibah (Keluar)	-227,337,348,614
Reklasifikasi Keluar	-571,334,389,460
Koreksi Pencatatan	-95,579,897,085
Penghapusan semu karena reklasifikasi dar	-1,231,800
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-16,321,678,493
	-2,281,802,630,375
Mutasi	**3,721,277,842,126**
Saldo Akhir	**13,988,322,892,427**

Tabel 55.
Rincian Peralatan dan Mesin per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	230.974.395.157	200.572.370.211	30.402.024.946
02	Inspektorat Jenderal	17.273.738.740	13.949.679.240	3.324.059.500
03	Ditjen Perhubungan Darat	1.161.761.215.173	610.832.876.153	550.928.339.020
04	Ditjen Perhubungan Laut	3.120.509.085.319	3.038.360.174.049	82.148.911.270
05	Ditjen Perhubungan Udara	4.594.725.151.118	3.010.767.366.006	1.583.957.785.112
08	Ditjen Perkeretaapian	2.312.410.436.472	1.479.659.001.586	832.751.434.886
11	Badan Litbang Perhubungan	16.034.007.230	14.603.008.880	1.430.998.350
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	2.534.634.863.218	1.898.300.574.176	636.334.289.042
	Total	**13.988.322.892.427**	**10.267.045.050.301**	**3.721.277.842.126**

Pada semester II tahun 2011, terdapat transfer peralatan dan mesin antara :

- Puslitbang MTM dan Sekretariat Badan Litbang Perhubungan senilai Rp. 107.224.990,-
- Puslitbang Perhubungan Darat dan Puslitbang MTM senilai Rp. 129.108.000,-.

Pada penginputan tranfer dari Puslitbang MTM kepada Sekretariat Badan Litbang Perhubungan terjadi reklasifikasi pada aplikasi SIMAK BMN dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel berupa meja kerja kayu dengan nilai aset sebesar Rp. 249.000,- (transfer keluar).

Gedung & Bangunan Rp.6.78 triliun

C.2.19.3 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 6.777.229.917.115,- dan sebesar Rp 7.424.787.099.160,- Nilai Gedung dan Bangunan ini sudah termasuk nilai Gedung dan Bangunan yang ada pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 1.199.196.156.350,-.

Mutasi Gedung dan Bangunan sebesar minus Rp 647.557.182.045,- dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 56.
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Awal	**7,424,787,099,160**
Penambahan :	
Penambahan Saldo Awal	66,456,512,696
Pembelian	39,862,223,359
Transfer Masuk	81,967,750,893
Hibah (Masuk)	290,000,000
Penyelesaian Pembangunan	1,193,592,425,099
Reklasifikasi Masuk	104,761,348,859
Perolehan Lainnya	244,347,000
Uraian Transaksi Tidak Ada	347,266,000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	1,331,555,000
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks	20,807,779,760
Pengembangan Nilai Aset	26,720,443,777
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	43,648,173,144
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	37,181,101,029
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	633,797,000
Pengembangan Melalui KDP	145,168,959,990
Hibah (masuk)	3,797,655,000
	1,766,811,338,606
Pengurangan Nilai Aset	-19,440,660
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-8,588,203,122
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-6,596,391,920
Penghapusan	-6,072,358,902
Transfer Keluar	-1,221,203,502,224
Reklasifikasi Keluar	-124,092,230,266
Koreksi Pencatatan	-4,406,260,586
Penghapusan semu karena reklasifikasi dar	-840,558,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-12,509,180,682
Pengurangan Saldo Awal	-1,030,040,394,289
	-2,414,368,520,651
Mutasi	**-647,557,182,045**
Saldo Akhir	**6,777,229,917,115**

Tabel 57.
Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I

Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
Sekretaris Jenderal	371.186.142.517	362.914.105.222	8.272.037.295
Ditjen Perhubungan Darat	385.468.324.083	588.272.865.945	(202.804.541.862)
Ditjen Perhubungan Laut	1.534.384.772.406	1.292.353.236.434	242.031.535.972
Ditjen Perhubungan Udara	1.419.844.242.529	2.758.454.529.750	(1.338.610.287.221)
Ditjen Perkeretaapian	1.003.779.378.514	985.404.162.195	18.375.216.319
Badan Pengambangan SDM Perhubungan	2.062.567.057.066	1.437.388.199.614	625.178.857.452
Total	6.777.229.917.115	7.424.787.099.160	(647.557.182.045)

Pada satker Sekretariat Badan Litbang Perhubungan telah melaksanakan renovasi dan pembangunan gedung berupa:

- Renovasi ruang kerja di lantai 3 senilai = Rp. 129.839.529,-
- Pembangunan gardu listrik senilai = Rp. 577.570.620,-

Penambahan nilai aset dan pembangunan gedung ini sampai akhir tahun belum dilakukan serah terima kepada Ditjen Perhubungan Laut sebagai pemilik aset.

Jalan Irigasi dan Jaringan Rp47.98 triliun

C.2.19.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 47.984.747.039.184,- dan Rp 31.703.066.180.021,- Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan ini sudah termasuk nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ada pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 38.866.982.003,-.

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 16.281.680.859.163,- dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 58.
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Awal	**31,703,066,180,021**
Penambahan :	
Penambahan Saldo Awal	26,481,079,546
Pembelian	43,358,701,355
Transfer Masuk	359,255,736,108
Penyelesaian Pembangunan	4,172,172,150,364
Reklasifikasi Masuk	20,953,759,820,660
Perolehan Lainnya	23,534,829,699
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	263,465,598
Pengembangan Nilai Aset	45,808,031,350
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	45,284,728,158
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	60,101,282,341
Pengembangan Melalui KDP	762,398,933,152
	26,492,418,758,331
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-5,997,556,168
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-4,898,992,928
Penghapusan	-5,121,914,124
Transfer Keluar	-1,347,656,364,127
Hibah (Keluar)	-6,129,876,000
Reklasifikasi Keluar	-932,455,036,852
Koreksi Pencatatan	-7,888,750,668,862
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-2,166,858,734
Pengurangan saldo awal	-17,560,631,373
	-10,210,737,899,168
Mutasi	**16,281,680,859,163**
Saldo Akhir	**47,984,747,039,184**

Tabel 59.
Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Eselon I

Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
Sekretaris Jenderal	18.528.751.842	11.042.049.242	7.486.702.600
Inspektorat Jenderal	17.490.000	-	17.490.000
Ditjen Perhubungan Darat	842.922.039.539	760.106.808.315	82.815.231.224
Ditjen Perhubungan Laut	4.802.963.653.768	4.490.723.885.466	312.239.768.302
Ditjen Perhubungan Udara	9.515.884.913.163	8.785.956.141.866	729.928.771.297
Ditjen Perkeretaapian	32.616.483.548.012	17.495.066.883.836	15.121.416.664.176
Badan Litbang Perhubungan	172.476.700	172.476.700	0
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	187.774.166.160	159.997.934.596	27.776.231.564
Total	47.984.747.039.184	31.703.066.180.021	16.281.680.859.163

Pada Ditjen Perhubungan Udara, Bandar Udara Cakrabhuwana Cirebon periode 01 Januari 2011 sd 30 Juni 2011 melaksanakan Pembayaran Hutang TA 2009 Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Landas Pacu (20 m x 30 m), Pelebaran Apron (10 m x 120 m) + (10 m x 36 m) Termasuk Marking dan Pembuatan Box Culvert 125 m' serta Normalisasi dan Pemantapan Bahu Landasan pada PT. Intireka Karsa Pamurtya sebesar Rp. 43.035.000 dimana aset tersebut sudah tercatat/ diakui sejak TA 2009 dan pada TA 2011 dilakukan jurnal neraca sehingga terjadi selesih jumlah belanja modal antara SAKPA dan SIMAK-BMN sebesar (Rp. 1.753.749.925 – Rp 1.710.714.925) Rp. 43.035.000.

Aset Tetap Lainnya
Rp.2.3 triliun

C.2.19.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per *31 Desember 2011 (Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 2.303.166.929.758,- dan sebesar Rp 1.909.275.829.328,-. Nilai Aset Tetap Lainnya ini sudah termasuk nilai Aset Tetap Lainnya pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan Rp 11.326.948.158,-
Mutasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 393.891.100.430,- dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 60.
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal	**1.909.275.829.328**
Penambahan :	
Penambahan Saldo Awal	1.213.525.482.237
Pembelian	69.237.334.124
Transfer Masuk	2.388.600.800
Penyelesaian Pembangunan	316.121.184.732
Reklasifikasi Masuk	50.096.474.370
Uraian Transaksi Tidak Ada	156.500.000
Pengembangan Nilai Aset	37.383.350.350
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	1.235.580.294
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	12.138
Pengembangan Melalui KDP	8.099.632.139
Renovasi gedung kantor bukan milik	1.471.127.001
	1.699.715.278.185
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-18.827.281.435
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-2.492.154
Penghapusan	-46.627.445
Transfer Keluar	-52.706.681.235
Hibah (Keluar)	-2.858.310.000
Reklasifikasi Keluar	-8.414.102.000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-46.456.160
Pengurangan Saldo Awal	-1.222.922.227.326
	-1.305.824.177.755
Mutasi	**393.891.100.430**
Saldo Akhir	**2.303.166.929.758**

Tabel 61.
Rincian Aset Tetap Lainnya per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	6,088,150,361	4,548,482,481	1,539,667,880
02	Inspektorat Jenderal	163,636,785	163,636,785	0
03	Ditjen Perhubungan Darat	102,321,431,921	85,368,155,773	16,953,276,148
04	Ditjen Perhubungan Laut	63,933,327,521	55,158,229,404	8,775,098,117
05	Ditjen Perhubungan Udara	1,360,450,789,304	1,242,282,597,306	118,168,191,998
08	Ditjen Perkeretaapian	731,205,156,163	493,834,240,841	237,370,915,322
11	Badan Litbang Perhubungan	1,943,006,835	989,625,186	953,381,649
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	37,061,430,868	26,930,861,552	10,130,569,316
	Total	2,303,166,929,758	1,909,275,829,328	393,891,100,430

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp 13.91 triliun

C.2.19.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 13.913.650.037.089,- dan Rp 9.900.899.769.889,-. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini sudah termasuk Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan Rp 52.457.751.434,-.

Tabel 62.
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan menurut Jenisnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / Penurunan
Tanah Dalam Pengerjaan	299,793,738,953	168,172,346,832	131,621,392,121
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	2,890,380,947,672	2,464,372,801,119	426,008,146,553
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	3,351,593,432,949	2,843,048,982,576	508,544,450,373
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	7,251,380,622,075	4,319,192,672,633	2,932,187,949,442
Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	120,501,295,440	106,112,966,729	14,388,328,711
Total	13,913,650,037,089	9,900,899,769,889	4,012,750,267,200

Tabel 63.
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP	31-Dec-10	Penambahan	KDP Yang Menjadi Aset Definitif	Reklasifikasi	31-Dec-11
Tanah Dalam Pengerjaan	168,172,346,832	415,627,954,709	283,747,840,588	(258,722,000)	299,793,738,953
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	2,464,372,801,119	3,576,779,650,675	3,162,616,308,050	11,844,803,928	2,890,380,947,672
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2,843,048,982,576	2,136,786,064,481	1,669,701,671,846	41,460,057,738	3,351,593,432,949
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	4,319,192,672,633	7,556,732,402,270	4,616,932,594,842	(7,611,857,986)	7,251,380,622,075
Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	106,112,966,729	218,361,440,937	154,538,830,456	(49,434,281,770)	120,501,295,440
Total	**9,900,899,769,889**	**13,904,287,513,072**	**9,887,537,245,782**	**(4,000,000,090)**	**13,913,650,037,089**

Tabel 64.
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
03	Ditjen Perhubungan Darat	2.601.104.363.769	2.458.437.478.462	142.666.885.307
04	Ditjen Perhubungan Laut	6.909.219.413.302	3.751.982.558.676	3.157.236.854.626
05	Ditjen Perhubungan Udara	1.067.240.432.118	889.327.702.929	177.912.729.189
08	Ditjen Perkeretaapian	2.046.858.255.321	1.605.738.872.089	441.119.383.232
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	1.289.227.572.579	1.195.413.157.733	93.814.414.846
	Total	**13.913.650.037.089**	**9.900.899.769.889**	**4.012.750.267.200**

Selain itu, terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa tanah Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada satker Pembangunan Double-Double Track senilai Rp. 21.726.090.000,- tidak diketahui keberadaan dan tidak didukung bukti kepemilikan. Ditjen Perkeretaapian sesuai rekomendasi BPK RI telah membentuk Tim untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengadaan tanah senilai Rp. 21.726.090.000,- yang tidak jelas keberadaannya dengan Surat Keputusan Dirjen Perkeretaapian No. KP. 801./SK.52/DJKA/06/11 tanggal 24 Juni 2011. Posisi saat ini tim masih dalam proses investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti administrasi atas belanja modal tanah yang didasarkan atas pekerjaan bulan Januari s.d. September 2006. Inspektorat Jenderal dengan surat PS.313/1/4/ITJEN-2012 tanggal 11 Januari 2012 menyampaikan kepada Ketua BPK-RI perihal Hasil Audit Khusus Penelitian Keaslian dan Keabsahan Dokumen Pengadaan Tanah 2006 Satker Pembangunan Double-Double Track, disarankan akan ke ranah hukum dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp 2.69 triliun

C.2.20 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 2.687.717.692.541,- dan sebesar Rp.1.335.377.937.585,-. Nilai Aset Lainnya ini sudah termasuk Nilai Aset Lainnya pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 24.205.495.916,- yang terdapat pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Tabel 65.
Rincian Aset Lainnya per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	126.064.240.351	97.901.634.322	28.162.606.029
02	Inspektorat Jenderal	1.860.551.000	1.353.891.000	506.660.000
03	Ditjen Perhubungan Darat	1.374.418.606.481	307.748.321.147	1.066.670.285.334
04	Ditjen Perhubungan Laut	250.851.498.929	219.206.018.684	31.645.480.245
05	Ditjen Perhubungan Udara	205.662.350.570	188.135.113.509	17.527.237.061
08	Ditjen Perkeretaapian	391.522.838.768	253.694.843.573	137.827.995.195
11	Badan Litbang Perhubungan	210.362.110.928	181.001.677.588	29.360.433.340
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	126.975.495.514	86.336.437.762	40.639.057.752
	Total	2.687.717.692.541	1.335.377.937.585	1.352.339.754.956

Tabel 66.
Aset Lainnya Menurut Jenisnya

Aset Lainnya	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	421,823,066	489,841,857	(68,018,791)
Aset Tak Berwujud	1,489,684,023,758	1,190,668,823,626	299,015,200,132
Aset Lain-lain	1,197,611,845,717	144,219,272,102	1,053,392,573,615
Total	2,687,717,692,541	1,335,377,937,585	1,352,339,754,956

TP/TGR sebesar Rp 423,13 juta

C.2.20.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp. 423.135.811,- dan Rp 489.841.857,-.

Tabel 67.
Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	423.135.811	468.347.211	(45.211.400)
05	Ditjen Perhubungan Udara		21.494.646	(21.494.646)
	Total	423.135.811	489.841.857	(66.706.046)

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2011 yang terdapat pada Ditjen Perhubungan Laut terdiri atas :

a. Markus Palijama (Bendahara Penerima Kanpel Jailolo) sebesar Rp. 12.384.905,- dengan tahun kejadian 1994.
b. Moksen Kudubun (Bendahara Penerima Kanpel Gebe) sebesar Rp. 148.201.876,- dengan tahun kejadian 1997.
c. Abdul Hakim (Bendahara Penerima UPP Amamapare) sebesar Rp. 203.755.600,- dengan tahun kejadian 2008.
d. Mardiansa Tasiam (Bendahara Penerima UPP Pomako) sebesar Rp. 58.793.430,- dengan tahun kejadian 2010.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR minus Rp1.31 juta

C.2.20.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2011 dan per 31 Desember 2010 adalah sebesar minus Rp 1.312.745,- dan Rp 0.

Tabel 68.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	(1.312.745)		(1.312.745)
Total		(1.312.745)	-	(1.312.745)

Tagihan TP/TGR Netto Rp 421.82 juta

C.2.20.3 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi *(Netto)*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2011 dan per 31 Desember 2010 adalah sebesar minus Rp 421.823.066,- dan Rp 489.841.857,-.

Tabel 69.
Tagihan Tuntutan TP/TGR per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	421.823.066	468.347.211	(46.524.145)
05	Ditjen Perhubungan Udara		21.494.646	(21.494.646)
Total		421.823.066	489.841.857	(68.018.791)

Aset Tak Berwujud Rp.1.48 triliun

C.2.20.4 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan per 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 1.489.684.023.758,- dan sebesar Rp 1.190.668.823.626,-. Nilai aset tak berwujud tersebut sudah termasuk Aset Tak Berwujud pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 24.093.295.916,-.

Tabel 70.
Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	123,931,789,014	97,867,763,972	26,064,025,042
02	Inspektorat Jenderal	1,860,551,000	1,353,891,000	506,660,000
03	Ditjen Perhubungan Darat	339,061,283,645	306,017,891,727	33,043,391,918
04	Ditjen Perhubungan Laut	101,283,163,419	91,108,374,219	10,174,789,200
05	Ditjen Perhubungan Udara	197,438,360,510	179,664,087,614	17,774,272,896
08	Ditjen Perkeretaapian	391,413,185,268	253,585,190,073	137,827,995,195
11	Badan Litbang Perhubungan	210,346,547,928	180,986,114,588	29,360,433,340
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	124,349,142,974	80,085,510,433	44,263,632,541
	Total	1,489,684,023,758	1,190,668,823,626	299,015,200,132

Rincian Aset Tak Berwujud Menurut Jenisnya

No	Uraian	Rupiah
1	Paten	23.167.000
2	Software	119.172.871.070
3	Lisensi	3.140.430.564
4	Hasil Kajian/Penelitian	351.860.483.445
5	Aset Tak Berwujud Lainnya	1.015.487.071.679
	Total	1.489.684.023.758

Pada semester I tahun 2011, Sekretariat Badan Litbang Perhubungan telah melakukan realisasi pengadaan lisensi/ijin penggunaan *e-book*|*e-jurnal* (Custom 100 Transportation Collection Bidang Transportasi Darat, Laut dan Udara) dengan Akun 536111 Belanja Modal Fisik Lainnya, dan dimasukan dalan Aset Tak Berwujud dengan nilai sebesar Rp. 45.100.000,-

Aset Lain-Lain Rp 163.93 miliar

C.2.20.5 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan per 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 1.197.611.845.717,- dan sebesar Rp 144.219.272.102,-. Nilai Aset Lain-lain tersebut sudah termasuk Aset Lain-lain pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 112.200.000,-.

Tabel 71.
Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	2.132.451.337	33.870.350	2.098.580.987
03	Ditjen Perhubungan Darat	1.035.357.322.836	1.730.429.420	1.033.626.893.416
04	Ditjen Perhubungan Laut	149.146.512.444	127.629.297.254	21.517.215.190
05	Ditjen Perhubungan Udara	8.223.990.060	8.449.531.249	(225.541.189)
08	Ditjen Perkeretaapian	109.653.500	109.653.500	0
11	Badan Litbang Perhubungan	15.563.000	15.563.000	0
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	2.626.352.540	6.250.927.329	(3.624.574.789)
	Total	1.197.611.845.717	144.219.272.102	1.053.392.573.615

Aset Lain-Lain ini adalah hasil reklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan/dihentikan penggunaannya, diharapkan dalam waktu dekat akan diajukan penghapusannya kepada pengelola barang.

Pada Ditjen Perhubungan udara Aset Tetap dalam Renovasi yang pada pelaporan sebelumnya diinput ke dalam aplikasi SAKPA menggunakan Jurnal Neraca, untuk periode pelaporan ini telah diinput kedalam aplikasi SIMAK-BMN.

Terdapat selisih nilai Aset Lain-Lain pada Neraca dengan SIMAK-BMN sebesar Rp 1.033.626.893.416,- yang terdapat pada Ditjen Perhubungan Darat yaitu:

1. Untuk mereklasifikasi aset yang telah diserahkan kepada Pemda yang telah terbit BASTO (namun belum ada keputusan penetapan status hibah Kemenkeu) dari akun Persediaan ke kun Aset Lain-Lain pada 43 satker Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 987.112.568.916,-.
2. Untuk mereklasifikasi aset yang telah diserahkan kepada Pemda yang telah terbit BASTO (namun belum ada keputusan penetapan status hibah Kemenkeu) dari akun Aset Tetap ke Akun Aset Lain-Lain pada satker Penunjang Keperintisan.
3. Untuk mereklasifikasi aset yang telah diserahkan kepada Pemda yang telah terbit BASTO (namun belum ada keputusan penetapan status hibah Kemenkue) dari akun Aset Tetap ke Akun Aset Lain-Lain pada satker Pengadaan Sarana Angkutan Perkotaan.

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 131.52 miliar

C.2.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 131.518.928.284,- dan Rp 139.725.858.192,-. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Tabel 72.
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Eselon I

Kode	Uraian Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan/Penurunan
02	Inspektorat Jenderal	16,935,227	3,239,500	13,695,727
03	Ditjen Perhubungan Darat	192,022,753	25,228,221	166,794,532
04	Ditjen Perhubungan Laut	51,420,492,378	106,470,644,388	(55,050,152,010)
05	Ditjen Perhubungan Udara	1,662,084,366	13,143,787,978	(11,481,703,612)
08	Ditjen Perkeretaapian	77,532,217,146	31,058,165	77,501,158,981
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	695,176,414	20,051,899,940	(19,356,723,526)
Total		**131,518,928,284**	**139,725,858,192**	**-8,206,929,908**

Terdapat Koreksi BPK-RI pada Satker Peningkatan Fungsi Pelabuhan dan Pengerukan Pusat pada Laporan Keuangan TA. 2010 yaitu :

a. Eskalasi harga pekerjaan Pelabuhan Dumai Tahap III (proyek selesai tahun 2008) sesuai hasil audit BPKP Rp. 93.141.284.843,18 ditambah PPN 10% Rp. 9.314.128.484,32 sehingga menjadi Rp. 102.455.413.328,-.
b. Kekurangan pembayaran hutang retensi kepada Kontraktor pekerjaan Pelabuhan Dumai Tahap III yaitu "Rinkai Adhi Marubeni (JV)" sebesar Rp. 445.329.478,-.
c. Kekurangan pembayaran pelunasan kontrak senilai ¥18,428,740.00 (Kurs ¥100=Rp11.028,53; Kurs Tengah Transaksi BI per 31 Des 2010) kepada konsultan Pelabuhan Dumai Tahap III yaitu "*Pacific Consultant*" dalam rupiah sebesar Rp. 2.032.419.120,-.

Dari ketiga temuan tersebut telah dicatat sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 104.933.161.926,- pada TA. 2010 dan pada Tahunan TA. 2011 telah dilakukan realisasi pembayaran utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 56.657.748.598,- sehingga Satker Peningkatan Fungsi Pelabuhan dan Pengerukan Pusat masih mempunyai kewajiban Utang pada Pihak Ketiga sebesar Rp. 48.275.413.328,-. Realisasi pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga telah dianggarkan di Tahun Anggaran 2011 Pada MAK 534111 (Belanja Modal Jalan dan Jembatan) dan telah mendapat Revisi pengesahan untuk pencairannya dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Pengesahan Nomor S-4173/PB/2011 Tanggal 27 April 2011, sehingga dengan adanya realisasi Belanja Modal tersebut tidak menambah nilai aset pada Satker Peningkatan Fungsi Pelabuhan dan Pengerukan Pusat.

Pada Ditjen Perkeretaapian terdapat Utang Kepada Pihak Ketiga senilai Rp 76.884.009.850,00 yang merupakan utang dari Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Barat kepada Penyedia Barang dan Jasa atas pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian di Propinsi Jawa Barat pada TA 2011. Hal ini timbul karena adanya penolakan atas dokumen pendukung pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran sisa nilai kontrak oleh KPPN Bandung, sehingga anggaran senilai Rp 76.884.009.850,00 tidak dapat terealisasi.

C.2.22 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2011 dan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 116.103.388,- dan Rp 0,- perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Penerimaan.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp 127.022 juta

Tabel 73.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	116.103.388	-	116.103.388
Total		116.103.388	-	116.103.388

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Ditjen Perhubungan Laut merupakan kelebihan atas pembayaran Jasa Kenavigasian oleh PT Admiral Lines sebesar Rp. 116.103.388,- pada Syahbandar Utama Surabaya.

Pendapatan Diterima Dimuka Rp 19.48 miliar.

C.2.23 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 19.480.696.134,- dan Rp 12.249.090,-. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Tabel 74.
Pendapatan Diterima Dimuka per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
05	Ditjen Perhubungan Udara	89,810,185	12,249,090	77,561,095
11	Badan Litbang Perhubungan	163,333,333	-	163,333,333
12	Badan PSDM Perhubungan	19,227,552,616	-	19,227,552,616
Total		19,480,696,134	12,249,090	19,468,447,044

Uang Muka dari KPPN Rp 473,99 juta

C.2.24 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per *31 Desember 2011 (Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 473.989.973,- dan Rp 854.093.528,-. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tabel 75.
Rincian Uang Muka dari KPPN per Eselon I

Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
Sekretaris Jenderal	225,898,562	357,710,031	(131,811,469)
Inspektorat Jenderal	11,495,000	0	11,495,000
Ditjen Perhubungan Darat	12,207,000	18,681,000	(6,474,000)
Ditjen Perhubungan Laut	177,431,196	204,162,810	(26,731,614)
Ditjen Perhubungan Udara	36,451,764	273,539,687	(237,087,923)
Ditjen Perkeretaapian	5,862,100	0	5,862,100
Badan Pengembangan SDM Per	4,644,351	0	4,644,351
Total	473,989,973	854,093,528	(380,103,555)

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp 5.20 miliar

C.2.25 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 adalah Rp 10.044.906.720,- dan Rp 345.903.360.986,- Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Di Bendahara Penerimaan dan Akun Kas Lainnya dan Setara Kas.

Tabel 76.
Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
03	Ditjen Perhubungan Darat	1,452,000	107,434,127	(105,982,127)
04	Ditjen Perhubungan Laut	3,752,551,493	336,847,248,772	(333,094,697,279)
05	Ditjen Perhubungan Udara	4,715,475,924	428,459,415	4,287,016,509
12	Badan Pengembangan SDM	1,575,427,303	8,520,218,672	(6,944,791,369)
	Total	10,044,906,720	345,903,360,986	(335,858,454,266)

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

Cadangan Piutang Rp 162.83 miliar

C.2.26 Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 adalah *(Audited)* sebesar Rp 187.267.518.295,- dan Rp 228.950.805.933,- Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, dan Uang Muka Belanja dan merupakan nilai netto setelah dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 77.
Rincian Cadangan Piutang per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	35,923,457	44,790,892	(8,867,435)
03	Ditjen Perhubungan Darat	5,974,061	493,270,945	(487,296,884)
04	Ditjen Perhubungan Laut	162,068,742,991	162,784,898,232	(716,155,241)
05	Ditjen Perhubungan Udara	8,416,348,024	60,810,619,903	(52,394,271,879)
08	Ditjen Perkeretaapian	16,088,586,238		16,088,586,238
12	Badan Pengembangan SDM Perhubu	651,943,524	4,817,225,961	(4,165,282,437)
	Total	187,267,518,295	228,950,805,933	(41,683,287,638)

Cadangan Persediaan Rp 1,75 triliun

C.2.27 Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 750.419.837.513,- dan Rp 1.051.477.759.601,- perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Persediaan dan Persedian Badan Layanan Umum.

Tabel 78.
Rincian Cadangan Persediaan per Eselon I

Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
Sekretaris Jenderal	842,210,116	211,007,785	631,202,331
Inspektorat Jenderal	12,684,025	110,886,675	(98,202,650)
Ditjen Perhubungan Darat	645,357,066,865	940,403,943,746	(295,046,876,881)
Ditjen Perhubungan Laut	55,143,865,450	66,175,838,681	(11,031,973,231)
Ditjen Perhubungan Udara	43,717,119,655	39,718,189,830	3,998,929,825
Ditjen Perkeretaapian	2,947,952,550	2,072,992,850	874,959,700
Badan Litbang Perhubungan	8,775,861	2,415,230	6,360,631
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	2,390,162,991	2,782,484,804	(392,321,813)
Total	750,419,837,513	1,051,477,759,601	(301,057,922,088)

Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (-) Rp 131.64 miliar

C.2.28 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Nilai Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar minus Rp 131.633.900.472,- dan minus Rp 139.693.536.754. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan.

Tabel 79.
Rincian Dana yang Harus Disediakan untuk
Pembayaran Utang Jangka Pendek per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
02	Inspektorat Jenderal	(16,935,227)	(3,239,500)	(13,695,727)
03	Ditjen Perhubungan Darat	(192,021,753)	(25,228,221)	(166,793,532)
04	Ditjen Perhubungan Laut	(51,536,270,566)	(106,438,322,950)	54,902,052,384
05	Ditjen Perhubungan Udara	(1,661,279,366)	(13,143,787,978)	11,482,508,612
08	Ditjen Perkeretaapian	(77,532,217,146)	(31,058,165)	(77,501,158,981)
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	(695,176,414)	(20,051,899,940)	19,356,723,526
	Total	(131,633,900,472)	(139,693,536,754)	8,059,636,282

Dana Lancar BLU Rp 131.53 Miliar

C.2.29 Dana Lancar BLU

Nilai Dana Lancar BLU per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 132.850.346.828,- dan Rp 93.038.372.556,-. Perkiraan tersebut merupakan penyeimbang Akun Kas pada Badan Layanan Umum yang terdapat pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Tabel 80.
Rincian Dana Lancar pada satker BLU

BLU	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	35,981,347,353	22,710,082,374	13,271,264,979
BP3IP	59,567,583,853	42,833,281,555	16,734,302,298
Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar	11,902,272,585	16,471,195,817	(4,568,923,232)
ATKP Surabaya	2,615,141,470	0	2,615,141,470
BPPTD Tegal	2,299,687,803	753,018,497	1,546,669,306
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	9,100,190,715	10,270,794,313	(1,170,603,598)
Balai Diklat Ilmu Pelayaran Surabaya	11,384,123,049	0	11,384,123,049
Total	132,850,346,828	93,038,372,556	39,811,974,272

Dana Lancar Lainnya Rp 1.92 miliar

C.2.30 Dana Lancar Lainnya

Nilai Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2011 dan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 1.851.845.922,- dan sebesar Rp 0,-. Merupakan penyeimbang dari Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari saldo hibah langsung.

Tabel 81.
Dana Lancar Lainnya per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	1.851.845.922	-	1.851.845.922
Total		1.851.845.922	-	1.851.845.922

Dana Lancar Lainnya pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp. 1.851.845.922,- merupakan rekening penampungan ANF dan Norad pada satker Pengembangan Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut. Berdasarkan Surat Pengesahan Hibah Langsung sisa dana yang ada di rekening (Kas Lainnya dan Setara Kas) sebesar Rp 1.919.991.523,-, namun berbeda dengan rekening Koran ANF, Bank BNI Cabang Harmoni Nomor Rekening 0165113802 dan Rekening Norad, Bank BNI Cabang Harmoni Nomor Rekening 0220214025 yang berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2011 (Rp 9.068,-) saldonya sebesar Rp 1.851.845.922,- sehingga terdapat selisih kurs sebesar Rp 68.145.601,- Terhadap selisih kurs telah dilakukan koreksi audit.

Barang/Jasa Yang Harus Diterima Rp 511,73 juta

C.2.31 Barang/Jasa Yang Harus Diterima

Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diterima per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan per 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 511.735.738,- dan Rp 3.372.081.629,-. Merupakan penyeimbang dari akun Uang Muka Belanja.

Tabel 82.
Barang/Jasa Yang Harus Diterima per Eselon I :

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	57.200.000	49.500.000	7.700.000
05	Ditjen Perhubungan Udara	454.535.738	3.322.581.629	(2.868.045.891)
	Total	511.735.738	3.372.081.629	(2.860.345.891)

Pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 57.200.000,- merupakan sewa gedung kantor di Adpel Lhokseumawe dan pada Ditjen Perhubungan Udara terdapat pada Bandara Medan Baru dan Adbandara Polonia senilai Rp 454.535.738,-.

Barang/Jasa Yang Harus Diterima Rp 19,48 juta

C.2.32 Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan

Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan per 31 Desember 2011 dan per 31 Desember 2010 adalah sebesar minus Rp 19.480.696.134,- dan minus Rp 12.249.090,- Merupakan penyeimbang dari akun Pendapatan Diterima Dimuka.

Tabel 83.
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
05	Ditjen Perhubungan Udara	(89.810.185)	(12.249.090)	(77.561.095)
11	Badan Litbang Perhubungan	(163.333.333)	-	(163.333.333)
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	(19.227.552.616)	-	(19.227.552.616)
	Total	(19.480.696.134)	(12.249.090)	(19.468.447.044)

Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp 143.30 triliun

C.2.33 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan per 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah Rp 135.489.192.929.555,- dan Rp 76.948.072.224.400,- Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Tetap.

Tabel 84.
Rincian Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per eselon I

Kode	Eselon I	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	896,131,043,377	848,430,610,656	47,700,432,721
02	Inspektorat Jenderal	17,454,865,525	14,113,316,025	3,341,549,500
03	Ditjen Perhubungan Darat	5,588,909,088,154	4,998,349,898,317	590,559,189,837
04	Ditjen Perhubungan Laut	17,467,861,714,097	13,622,994,068,546	3,844,867,645,551
05	Ditjen Perhubungan Udara	29,197,222,758,595	28,216,347,683,763	980,875,074,832
08	Ditjen Perkeretaapian	74,742,551,258,954	23,144,832,236,481	51,597,719,022,473
11	Badan Litbang Perhubungan	18,149,490,765	15,765,110,766	2,384,379,999
12	Badan Pengembangan SDM P	7,560,912,710,088	6,087,239,299,846	1,473,673,410,242
	Total	135,489,192,929,555	76,948,072,224,400	58,541,120,705,155

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Rp 2.69 triliun

C.2.34 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2011 *(Audited)* dan per 31 Desember 2010 *(Audited)* adalah sebesar Rp 2.687.717.692.541,- dan Rp 1.335.377.937.585,- Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Lainnya.

Tabel 85.
Rincian Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	126.064.240.351	97.901.634.322	28.162.606.029
02	Inspektorat Jenderal	1.860.551.000	1.353.891.000	506.660.000
03	Ditjen Perhubungan Darat	1.374.418.606.481	307.748.321.147	1.066.670.285.334
04	Ditjen Perhubungan Laut	250.851.498.929	219.206.018.684	31.645.480.245
05	Ditjen Perhubungan Udara	205.662.350.570	188.135.113.509	17.527.237.061
08	Ditjen Perkeretaapian	391.522.838.768	253.694.843.573	137.827.995.195
11	Badan Litbang Perhubungan	210.362.110.928	181.001.677.588	29.360.433.340
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	126.975.495.514	86.336.437.762	40.639.057.752
Total		2.687.717.692.541	1.335.377.937.585	1.352.339.754.956

Catatan Penting Lainnya

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

1. Hambatan/kendala dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2011, antara lain :
   a. Pemahaman petugas SAI (SAK dan SIMAK BMN) terhadap jenis transaksi dalam proses penginputan masih belum memadai;
   b. Banyak peraturan baru yang diterbitkan akhir tahun sehingga belum dapat disosialisasikan sepenuhnya baik di tingkat wilayah maupun tingkat Kantor/Satker.
   c. Informasi akrual belum dipahami sepenuhnya oleh Kantor/Satker walaupun Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan telah disosialisasikan. Hal ini karena tidak semua Petugas berlatar belakang pendidikan akuntansi.
   d. Aplikasi yang belum sempurna/bermasalah dalam hal restore, back up, update versi dan pengiriman dari persediaan ke SIMAK maupun SIMAK ke SAKPA dan virus.
   e. Kantor/Satker yang bertindak sebagai UAPPA-W belum berperan optimal, hanya sekedar mengkonsolidasi. Belum dilakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi dengan Kantor/Satker dibawah kendalinya.
   f. Penyampaian Laporan Keuangan mulai dari tingkat Kantor/Satker (UAKPA), UAPPA-W sampai dengan UAPPA-E1 tidak tepat waktu sehingga menyulitkan dalam proses konsolidasi.
   g. Keterlambatan informasi dari KPPN VI (khusus) kepada Satker Penerima pinjaman luar negeri terhadap bukti Surat Perintah Pembukuan /Pengesahan (SP3) yang telah terbit pada akhir bulan Desember, namun baru diterima pada bulan Pebruari atau setelah dilakukan rekonsiliasi.

2. Neraca BLU Tahun 2011 di lingkungan Kementerian Perhubungan telah diintegrasikan kedalam Laporan Keuangan BA 022 Kementerian Perhubungan Tahun 2011 (*Audited*) .

3. CATATAN PENTING PER ESELON I

1) INSPEKTORAT JENDERAL.

Pada Tahun 2011 pada Inspektorat Jenderal terdapat transfer aset masuk dari Ditjen Perhubungan Laut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Transfer Barang Milik Negara antara Inspektorat Jenderal dengan Direktorat Jenderal Perhubungan laut Nomor : PL.301/13/12/Itjen-2010 tanggal 22 Desember 2010 dan telah dimasukkan pada aset Inspektorat Jenderal yaitu berupa :

No	Uraian	Merk/type	Satuan	Tahun pembuatan	Harga Perolehan	Jumlah	Ket
1	Minibus	Ford Escape 4x2 OL MT	3 Unit	2003	Rp 209.000.000,-	Rp 627.000.000,-	Kondisi Baik
2	Minibus	Ford Escape 3.0	2 Unit	2003	Rp 209.000.000,-	Rp 418.000.000,-	Kondisi Baik
3	Minibus	Mitsubishi Kuda	1 Unit	2002	Rp 159.500.000,-	Rp 159.500.000,-	Kondisi Baik
Jumlah			6 Unit			Rp 1.204.500.000,-	

2) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

a) Terdapat Pekerjaan TA. 2010 berupa Konsultansi sebesar Rp. 407.708.000 belum diinput dalam neraca.

Pekerjaan sebesar Rp. 407.708.000 adalah sebagai berikut :

Pekerjaan Konsultan sebesar	Rp. 387.860.000,-
Biaya Iklan, Penggandaan, ATK dll	Rp. 19.848.000,-
Jumlah	Rp. 407.708.000,-

b) Pada saat dilakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Jakarta I disarankan pekerjaan berupa jasa Konsultansi sebesar Rp. 387.860.000,- dan Biaya Iklan, Penggandaan, ATK dll sebesar Rp. 19.848.000,- tidak dimasukkan pada Simak BMN / dikeluarkan dari Simak BMN, karena hasil kegiatan tersebut tidak menambah aset.

3) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

a) Pada UAKPA Balai Elektronika jenis kewenangan pada DIPA terbagi 2 Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah(KD), sehingga menyulitkan dalam proses pencairan anggaran. Untuk hal ini telah dilakukan usulan revisi DIPA menjadi 1 jenis kewenangan. Untuk Kantor Administrator Bandara Soekarno-Hatta jenis kewenangan yang semula Kantor Pusat (KP) untuk semester II ini Kantor Daerah (KD).

b) Kanwil DJPB Kementerian Keuangan untuk wilayah, Sulawesi Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Papua Barat mengharuskan UPT/Satker merubah kode wilayah sesuai dengan kabupaten. Hal ini mengakibatkan aplikasi SIMAK-BMN tidak bisa terkirim ke Aplikasi SAKPA. Untuk masalah ini Ditjen Perhubungan Udara mengharuskan UPT/Satker tetap pada kode wilayah sebelumnya.

c) Bandar Udara Cakrabuwana Cirebon periode semester 2 Tahun Anggaran 2011 tidak dapat melakukan rekonsiliasi ke tingkat wilayah karena menurut persepsi Kanwil XII Jawa Barat tidak diperlakukan sebagai UAPPA-W cukup dengan tingkat KPPN saja dan kemudian langsung rekonsiliasi ke Eselon 1 bersangkutan.

d) Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Bandar Udara Walter Monginsidi atas nama Sdr. Hasan (Mantan Bendahara Rutin) sudah lunas sehinga TGR sudah tidak ada lagi pada tahun 2011.

4) DITJEN PERKERETAAPIAN

a) Dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran Bendahara Pengeluaran di lingkungan Ditjen Perkeretaapian telah menggunakan rekening-rekening yang telah mendapat persetujuan dari Kanwil Ditjen Pebendaharaan/KPPN setempat (daftar rekening terlampir).
b) Laporan Keuangan Ditjen Perkeretaapian TA. 2011 telah disusun dengan menggunakan aplikasi SAK dan Simak-BMN.
c) Pada Satker Pembangunan Jawa Barat masih ada tagihan belanja Modal (53) senilai Rp. 76.884.009.850,- dan Satker Pengambangan Perkeretaapian Sumatera Utara juga masih terdapat tagihan belanja modal senilai Rp. 612.572.324,-

Selain hal tersebut dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara masih terdapat hambatan/kendala antara lain :

- Kurang patuhnya beberapa satker menyampaikan laporan keuangan tepat waktu secara berjenjang baik SAK maupun Simak-BMN sehingga menyulitkan penggabungan pada tingkat Eselon I
- Kurang sempurnanya aplikasi sehingga masih terdapat permasalahan dalam pengaplikasian sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap penyelesaian laporan keuangan
- Kurangnya pengungkapan pelaksanaan dan hambatan pada Catatan atas Laporan Keuangan (baik CaLK LRA, CaLK Neraca maupun CaLK BMN) baik tingkat Satker/Kantor dan tingkat Wilayah sehingga menyulitkan pengungkapan pada tingkat Es- I.
- Masih sering terjadi keterlambatan informasi dari KPPN VI (Khusus) kepada Satker penerima pinjaman luar negeri terhadap bukti Surat Perintah Pembukuan / Pengesahan (SP3) yang telah terbit pada akhir bulan Desember sehingga Satker yang sebelumnya telah melaksanakan rekonsiliasi akhir tahun anggaran kembali melakukan rekonsiliasi ulang kepada KPPN VI (Khusus) yang berdampak pada perubahan Realisasi, Neraca serta CaLK pada Satker dan Eselon.

5) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

a) Terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 1.569.301.350,- terdiri dari :
   1) STTD Bekasi sebesar Rp. 322.150.950,-
   2) ATKP Medan sebesar Rp. 166.000.000,-
   3) ATKP Makassar sebesar Rp. 1.081.150.400,-

   Tanggapan dari ATKP Makassar tentang adanya Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 1.081.150.400,-, yang terdapat dalam Rekening Koperasi Penerbangan sebesar Rp. 309.244.750,- (No. Rekening 65682556 yang dikelola oleh bendahara koperasi 1), Dana yang tersimpan di Bendahara Koperasi 2 sebesar Rp. 292,-, Dana yang tersimpan di rekening koperasi penerbangan sebesar Rp. 771.905.358,- (no. Rekening 00004966-01-011266-53-2 yang dikelola SENAT TARUNA ATKP MAKSSAR) secara kronologis sebagai berikut :
   1) Pada tanggal 9 Desember 2011, ATKP Makassar mengajukan penggunaan Rekening Bendahara Penerimaan dengan nomor rekening 65669657-8 pada BNI Capem Bandara Hasanuddin guna menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan.
   2) Pada tanggal 13 Desember 2011, ATKP Makssar menerima surat dari KPPN 1 Makassar Nomor S-7737/WPB.24/KP.0130/2011 perihal persetujuan atas penggunaan Rekening Bendahara Penerimaan.
   3) ATKP Makassar akan melakukan pemindahaan rekening dari Rekening Bendahara Koperasi dan Rekening SENAT TARUNA ATKP Makassar ke Rekening Bendahara Penerimaan pada bulan Januari 2012.

   Tanggapan dari STTD Bekasi mengenai penerimaan yang diluar mekanisme sebesar Rp. 322.150.950,- merupakan temuan BPK pada tahun 2010 terkait dana masyarakat yang dikelola oleh Komite Orang Tua dan Koperasi. Tindak lanjut temuan BPK terkait dengan dana masyarakat yang dikelola oleh Komite Orang Tua Taruna dan Koperasi untuk membiaya keperluan dan kegiatan ekstrakulikuler taruna yang tidak di biaya oleh APBN, BPK menyarankan dilakukan tutup buku setiap tanggal 31 Desember dan dibukukan dalam catatan samping diluar pembukuan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran APBN. Saldo dana tersebut bukan merupakan saldo tetapi dana bergulir yang akan habis dialokasikan pada akhir tahun ajaran 31 Agustus 2012 (Prinsip Anggaran Berimbang).

ATKP Medan sebesar Rp. 166.000.000,- merupakan sisa dana kegiatan taruna yang tidak habis terpakai di tahun 2011 dan akan digunakan kembali di tahun 2012. Untuk ATKP Medan sudah mendapatkan ijin persetujuan pembukaan rekening di Bendahara Penerimaan untuk keperluan menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerima dengan Surat Nomor : S-1457/WPB.02/KP.0230/2011 tanggal 10 Juni 2011.

b) Untuk saat ini dana masyarakat yang diluar mekanisme APBN dikelola secara manual dan tetap dilaporkan dalam Laporan Keuangan dan dijelaskan dengan CalK sampai menunggu proses BLU bagi Satker yang non BLU dan sedang menunggu surat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk perlakuan khusus.

c) Terdapat selisih kas BLU yang tercatat dalam Laporan SAI dengan yang terdapat dalam Laporan BLU ATKP Surabaya sebesar Rp. 20.150.000,- yang merupakan pembebanan honorarium kelebihan dari SPM Pengesahan.

d) Terdapat selisih Saldo Persediaan BLU antara Laporan SAI dengan Laporan BLU sebesar Rp. 478.837.165,- karena belum adanya Reklas persediaan menjadi Persediaan BLU pada Satker PIP Semarang, PIP Makassar dan BPPTD Tegal.

e) Terdapat selisih Saldo Aset antara Laporan SAI dengan Laporan BLU sebesar Rp. 1.458.826.399,- yang terdapat pada Satker :
   - PIP Semarang sebesar Rp. 273.790.000,- merupakan hasil Audit BPK penyesuaian pd Neraca SIMAK tahun 2010 dan akan disesuaikan pada Laporan Keuangan Audited TA. 2011;
   - PIP Makassar sebesar Rp. 1.185.036.399,- merupakan selisih harga perolehan hasil penghapusan setelah penilian dari KPKNL dan akan dilakukan penyesuaian pada Laporan Keuangan Audited.

f) Terdapat penambahan peralatan mesin yang bukan bersumber dari Belanja Modal dibiayai dengan Belanja Barang sebesar Rp. 276.781.450,- terdiri dari :
   a. ATKP Surabaya sebesar Rp. 269.081.450,-
   b. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan senilai Rp. 7.700.000,- (sudah disesuaikan dalam SIMAK-BMN).

   Untuk selanjutnya dalam pengelolaan anggaran / keuangan yang berikutnya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Temuan dan Tindak Lanjut BPK RI dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan sebelum Tahun 2010

No	Temuan	Progress/Tindak Lanjut
I.	**Laporan Keuangan 2007**	
1.	Pemanfaatan Aset Tanah seluas ± 31.464 M2 milik Ditjen Perkeretaapian dan Ditjen Perhubungan Udara oleh pihak lain tidak sesuai ketentuan	Sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian. Hal yang belum selesai ditindaklanjuti menyangkut : 1. Pelaksanaan peninjauan kembali seluruh kontrak sewa lahan disepanjang jalur kereta api yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Belum ada MoU dengan PT. KAI 3. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan aset sehingga dapat memberikan kontribusi optimal dan menguntungkan negara 4. Belum ada perjanjian sewa antara koperasi pegawai Ditjen Hubud dengan Avia Sejahtera 5. Percepatan penyelesaian sertifikat atas tanah seluas 4.535 M2 yang berlokasi di jalan KS Tubun No. 6 Jakarta Barat
II.	**Laporan Keuangan 2008**	
2.	Sistem Pencatatan dan Pelaporan Piutang Bukan Pajak Kementerian Perhubungan Tidak Memadai. Permasalahan pada PNBP dari pelayanan transportasi udara pada Bandara Hang Nadim.	1. Masih menunggu putusan Kementerian Ekuin. Saat ini Bandara Hang Nadim menyetorkan ke kas negara per tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan jenis pelayanan yaitu pelayanan jasa penerbangan (PJP) domestik dan internasional, pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U), pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) dan pas bandara. 2. Otorita Batam dan PT. Persero Angkasa Pura sepakat mengadakan perjanjian bahwa pendapatan pelayanan penerbangan khususnya PJP Internasional dipungut selama 3 (tiga) tahun oleh PT. Persero Angkasa Pura II TMT 1 Oktober 2011 s.d 30 September 2014.

b. Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2010.

Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2010 diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

1) Koreksi atas penyajian Laporan Keuangan (sudah dilakukan koreksi pada LK Kementerian Perhubungan Tahun 2010 *(Audited)*
2) Sistem Pengendalian Intern (9 temuan)
3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (6 temuan)

c. Daftar temuan dan tindak lanjutnya dilampirkan sebagaimana format terlampir.

Rincian Temuan Tindak Lanjut Temuan per Eselon I:

1) DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Temuan BPK-RI pada TA. 2010, yaitu :

a) Aset Tetap Kemenhub yang sudah dimanfaatkan oleh pihak ketiga yaitu Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota belum dilakukan serah terima operasional.

Ditjen Hubdat dengan surat No. PL. 301/2/7/DJPD/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 telah menginstruksikan kepada seluruh Satker yang belum mengusulkan Serah Terima Operasional segera mengajukan usulan Serah Terima Operasional kepada Dirjen Perhubungan Darat dengan dilengkapi data dukung sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun hasil Perkembangan Berita Acara Serah Terima Operasional atas Temuan BPK TA. 2010, dengan rincian terlampir pada Rencana Tindak Kementerian Negara/Lembaga.

b) Belanja Aset Tetap yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat, direalisasikan bukan dari Belanja Barang melainkan dari Belanja Modal.

Belanja aset tetap yang dimaksudkan untuk dioperasionalkan atau dibagikan kepada pihak ketiga direalisasikan bukan dari belanja barang/sosial melainkan dari belanja modal, hal ini dikarenakan kesulitan pada waktu penganggaran ada pembatasan antara perbandingan belanja modal dan belanja barang, namun setelah dilakukan serahterima operasional maka pencatatannya dalam neraca direklasifikasi dari aset definitif menjadi persediaan sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.4320/KU.006/DRJD/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Perlakuan (Treatment) Akuntansi Terhadap Hasil Pekerjaan Belanja Modal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Selanjutnya akan dikeluarkan dari Persediaan setelah status aset/hibah disetujui oleh Menteri Keuangan.

c) **Sistem Pencatatan dan Pelaporan Piutang Bukan Pajak Kemenhub belum memadai.**

Bahwa ada pendapatan diakhir TA. 2010 pada UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangau senilai Rp. 4.815.840,- yang disetorkan oleh pengelola jasa pelabuhan ke Bandara Penerima pada tahun 2011 dan disetorkan oleh Bendahara Penerima ke Kas Negara di Tahun 2011 sehingga transaksi akrual atas pendapatan yang masih harus diterima tersebut dicatat pada neraca 31 Desember 2010 sebagai Piutang PNBP .

2) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

Sebagai tindak lanjut atas temuan BPK tentang penerimaan yang berasal dari penyelenggaraan kebandarudaraan di UPT Bandar Udara Hang Nadim Batam yang seluruhnya diambil Otorita Batam tanpa ada kejelasan kontribusi sedikitpun kepada Ditjen Perhubungan Udara selaku yang memiliki UPT Bandara Hang Nadim, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mengirimkan surat nomor: AU/01116/keu.085/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 bahwa sambil menunggu penetapan dari Menteri Koordinator EKUIN, maka pendapatan yang diperoleh Bandar Udara Hang Nadim Batam diminta untuk disetorkan ke kas negara terhitung mulai 1 Januari 2011 berdasarkan jenis pelayanan yaitu :

- Pelayanan jasa penerbangan (PJP) domestik dan internasional;
- Pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U);
- Pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U);
- Pas Bandar Udara

Bandar Udara Hang Nadim menginformasikan bahwa sesuai dengan Kesepakatan bersama antara Badan Pengausahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BP-Kawasan Batam (Otorita Batam) dengan PT. Persero Angkasa Pura II Nomor :

104/SPJ/BP-BTM/A.1/11/2011
PJJ - 15.01.01/00/11/2011/240

Tanggal 30 November 2011 sepakat mengadakan perjanjian bahwa Pendapatan Jasa Pelayanan Penerbangan khususnya PJP Internasional dipungut selama 3 Tahun oleh PT. Persero Angkasa Pura II TMT. 01 Oktober 2011 s/d 30 September 2014.

3) DITJEN PERKERETAAPIAN

Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI.

Hasil Audit BPK-RI ATAS LK Ditjen Perkeretaapian TA 2010 :

NO	KANTOR/SATKER	TEMUAN	AKUN	PENYESUAIAN/ REKLASIFIKASI
				DEBET/KREDIT
1.	Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah	Laporan hasil survey yang tidak dapat didistribusikan secara langsung terhadap perolehan aset jalan Irigasi dan Jaringan	diinvestasikan dalam aset tetap pada Jalan dan Jembatan diinvestasikan dalam aset lainnya	Rp. 497.100.000,-
2.	Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah	Kurang saji terkait kesalahan pencatatan yaitu terdapat mutasi kurang atas akun Jalan dan Jembatan	Jalan dan Jembatan diinvestasikan dalam aset tetap	Rp. 1.346.622.002,-
3.	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pengadaan KRL 1 set dan peralatan sinyal pengadaan di tahun 2006 yang telah diserahterimakan dengan BASTO ke PT. KAI	Diinvestasikan dalam aset tetap pada peralatan dan mesin	Rp.22.283.294.000,-
4.	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pengadaan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) 26 unit di tahun 2006 yang telah diserahterimakan dengan BASTO ke PT. KAI	Diinvestasikan dalam aset tetap pada peralatan dan mesin	Rp. 67.955.008.000,-
5.	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Rehabilitas Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) 20 unit	Diinvestasikan dalam aset tetap pada aset tetap lainnya	Rp. 9.938.500.000,-
6.	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Rehabilitasi KRD Ekonomi (K3) 8 unit	Diinvestasikan dalam aset tetap pada aset tetap lainnya	Rp. 8.025.659.000,-
7.	Satker Pembangunan Double-Double Track	Koreksi KDP Tanah dalam pengerjaan atas putusan inkrah atas kasus pengadaan tanah fiktif tahun 2005	Diinvetsaikan dalam aset tetap pada Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 1.738.125.000,-
8.	Satker Peningkatan Jalan Kereta Api lintas Utara Jawa	Koreksi KDP – Jalan JEmbatan dalam pengerjaan dan belanja modal atas 4 (empat) SP3 yaitu No. 865410C, 865411C, 865412C, 8654444C, 865362C, yang belum dibukukan	Konstruksi dalam pengerjaan diinvestasikan dalam aset tetap dan belanja modal Jalan dan Jembatan pada Piutang dari KPPN	Rp. 63.077.294.294,-

9.	Satker Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perkeretaapian	Koreksi KDP – Jalan dan Jembatan dalam pengerjaan dan belanja modal atas 4 (empat) SP3 yaitu no. 865360C, 865361C, 865362C, 865363C, dan 865378C yang belum dibukukan	Konstruksi Dalam Pengerjaan diinvestasikan dalam aset tetap dan Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada Piutang dari KPPN	Rp. 16.657.658.540,-
10.	Satker Pengembangan Sarana Perkeretaapian	Kurang catat perhitungan nilai aset tetap berupa biaya angkut	Peralatan dan Mesin diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp. 530.983.600,-
11.	Satker Pembangunan Double-Double Track	Koreksi atas aset tanah yang telah diserahterimakan ke Kodam Jaya	Diinvestasikan dalam aset tetap pada tanah	Rp. 3.370.947.850,-
12.	Satker Pembangunan Double-Double Track	Koreksi salah catat sintelis dicatat dalam gedung dan bangunan seharusnya jaringan, koreksi nilai yang dapat dikapitalisasi	Diinvstasikan dalam aset tetap pada gedung dan bangunan	RP. 2.992.000.000,-

Dari hasil temuan tersebut, Ditjen Perkeretaapian telah melakukan langkah lanjut sesuai usulan / rekomendasi BPK-RI sebagai berikut:

a) Telah melakukan reklasfikasi keluar Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 497.100.000,- pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah berupa hasil survey yang tidak bisa didistribusikan langsung terhadap nilai perolehan aset jalan, irigasi dan Jaringan
b) Telah melakukan reklasfikasi masuk Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 497.100.000,- pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah
c) Telah melakukan reklas masuk Jalan dan Jembatan senilai Rp. 1.346.622.002,- pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah terkait Kurang saji terkait kesalahan pencatatanyaitu terdapat mutasi kurang atas akun jalan dan jembatan.
d) Telah melakukan reklasfikasi keluar peralatan dan mesin senilai Rp.22.283.294.000,- pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pengadaan KRL satu set dan peralatan sinyal pengadaan tahun 2006 yang telah diserahterimakan dengan BASTO ke PT KAI.
e) Telah melakukan reklasfikasi keluar peralatan dan mesin senilai Rp. 67.955.008.000,- pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pengadaan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) 26 Unit tahun 2006 yang telah diserahterimakan dengan BASTO Ke PT KAI.
f) Telah melakukan reklasifikasi keluar aset tetap lainnya senilai Rp. 9.938.500.000,- pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk rehabilitasi Kereta Penumpang kelas Ekonomi (K3) 20 Unit.

g) Telah melakukan reklasfikasi aset tetap lainnya senilai Rp. 8.025.659.000,- pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk Rehabilitasi KRD Ekonomi (K3).
h) Telah melakukan reklasfikasi keluar konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp1.738.125.000,- pada Satker Pembangunan Double-Double Track merupakan Koreksi KDP Tanah dalam pengerjaan atas putusan inkrah atas kasus pengadaan tanah fiktif tahun 2005.
i) Telah melakukan input atas kekurangan input 4 (empat) buah SP3 senilai Rp. 63.077.313.294 pada satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas selatan Jawa.
j) Telah melakukan input atas kekurangan input 5 (lima) buah SP3 senilai Rp. 16.657.658.540,- pada satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas selatan Jawa.
k) Telah melakukan reklasfikasi masuk Rp. 350.983.600,- pada Satker Pengembangan Sarana Perkeretaapian yang merupakan biaya angkut kereta api.
l) Telah melakukan reklasfikasi keluar Aset Tetap Tanah senilai Rp. 3.370.947.850,- pada Satker Pembangunan Double-Double Track, tanah tersebut sudah diserahterimakan kepada Kodam Jaya.
m) Telah melakukan reklasfikasi keluar senilai Rp. 2.992.000.000,- dan reklasifikasi masuk Peralatan dan Mesin senilai Rp. 17.155.820,- jaringan senilai Rp. 2.923.541.657,-pada Satker Pembangunan *Double-Double Track* yang merupakan salah catat sintelis dicatat dalam gedung dan bangunan seharusnya jaringan dan koreksi nilai yang dapat dikapitalisasikan.

Terhadap Temuan BPK-RI Tahun Anggaran 2010 tersebut telah dilakukan Reklasifikasi dan perbaikan pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 *(Audited)*.

Temuan Terkait Sistem Pengendalian Intern BPK-RI TA 2010

1. Hasil Inventarisasi Penilaian Aset Ditjen Perkeretaapian tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan koreksi.

   a. Pemasukan data hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) Prasarana Perkeretaapian telah dilakukan pada bulan Juli 2011 secara bertahap dengan terlebih dahulu memasukkan data Tanah (RUMAJA dan RUMIJA) dan selanjutnya pemasukan data Jalan Kereta Api, Jembatan, Bangunan dan Gedung, Signal Kereta Api, dan Alat Telekomunikasi. Aset hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) Prasarana Perkeretaapian senilai Rp. 56.019.460.015.032,- tersebut telah tercatat dalam aplikasi Simak – BMN Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian dengan rincian sebagai berikut :

Intrakomptabel

Tanah	Rp.	34.909.906.039.250,-
Peralatan dan Mesin	Rp.	533.725.503.616,-
Gedung dan Bangunan	Rp.	28.206.691.422,-
Jalan dan Jembatan	Rp.	20.278.809.786.758,-
Irigasi	Rp.	244.171.905.551,-
Jaringan	Rp.	24.621.061.964,-
Total	Rp.	56.019.440.988.561,-

Ekstrakomptabel

Peralatan dan Mesin	Rp.	7.401.472,-
Gedung dan Bangunan	Rp.	11.625.000,-
Total	Rp.	19.026.472,-

2. Aset tetap Kementerian Perhubungan yang sudah dimanfaatkan oleh pihak ketiga yaitu Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dan Kodam Jaya Belum dilakukan Serah terima Operasional.

   Telah dilakukan serah terima kepada Kodam Jaya BA No. 1085/DDT/BA/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009, dan Ditjen Perkeretaapian telah melakukan Reklasifiklasi Keluar Aset Gedung dan Bangunan yang telah diserah-terimakan sebesar Rp.3.370.947.850,- terdiri dari :

   a. Pembangunan Gudang Minyak di Cijantung senilai Rp. 1.440.241.000,-
   b. Pembangunan Gudang Peralatan di Cijantung senilai Rp. 1.994.898.000,-
   c. Supervisi /Pengawasan senilai Rp. 80.630.000,-

   Terdapat pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp. 144.821.150,-

3. Pelaksanaan Pekerjaan fisik dan Pengawasan dimulai sebelum adanya Kontrak dan terdapat Pekerjaan fisik tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 13.571.772,35

   Kasatker Pembangunan *Double-Double Track* telah menarik kelebihan Pembayaran dan telah menyetor ke kas Negara sebesar Rp. 13.571.772,- dengan SSBP No. 003/SSBP/IV/2011 tanggal 28 April 2011.

Temuan BPK-RI terkait Kepatuhan

1. Nilai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Kementerian Perhubungan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp.826.546.294.645,- yang merupakan hasil kegiatan tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2006 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	NILAI BPYBDS	KETERANGAN
1.	BPYBDS yang sudah dilengkap BASTO definitive	Rp. 659.516.797.167,-	
2.	BPYBDS yang belum dilengkapi BASTO definitive	Rp. 167.029.497.478,-	Posisi BASTO saat ini ada di PT. KAI (Persero)

4) BADAN LITBANG PERHUBUNGAN

- Tindak lanjut temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2010 Badan Litbang Perhubungan terhadap Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 12.045.362.519,- (jumlah nilai studi yang masa manfaatnya sudah melebihi 5 tahun) belum menggambarkan secara wajar kondisi sebenarnya.
- BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk menyusun kebijakan penatausahaan aset tak berwujud dilingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka memenuhi criteria ATB sesuai dengan SAP termasuk tata cara penghapusannya.
- Tindak lanjut temuan BPK atas aset tak berwujud, Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan telah menyusun draf SOP tentang aset tak berwujud sesuai rekomendasi BPK. Akan tetapi menunggu diterbitkan buletin teknis aset tak berwujud oleh KSAP, berdasarkan hal tersebut pada saat pembahasan tindak lanjut antara Kementerian Perhubungan dan BPK posisi tindak lanjut disepakati dalam kondisi "pending".

D.2 REKENING PEMERINTAH

Tahun 2011 Kementerian Perhubungan mengelola rekening pemerintah terdiri :

a) Rekening Bendahara Pengeluaran sebanyak 676 rekening
b) Rekening Bendahara Penerimaan sebanyak 114 rekening
c) Rekening Lainnya sebanyak 12 rekening
d) Rekening yang ditutup sebanyak 1 rekening

Daftar rekening pemerintah yang dikelola Kementerian Perhubungan terlampir.

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat pemerintah pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahunan, secara berjenjang dari mulai UAKPA sampai dengan UAPA, dimulai dari Laporan Keuangan Tahunan TA 2009.

Transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari:

1. Pendapatan yang masih harus diterima (disajikan sebagai penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang di neraca); dan/atau
2. Pendapatan diterima dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca).

Sedangkan transaksi belanja secara akrual meliputi:

1. Belanja yang masih harus dibayar (disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca); dan/atau
2. Belanja dibayar dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca).

Daftar Informasi pendapatan dan belanja secara akrual dilampirkan sebagaimana format terlampir.

Sampai dengan Laporan Keuangan ini disusun Kementerian Perhubungan sudah melakukan sosialisasi atas Penyusunan Laporan Keuangan yang berbasis akrual, namun masih terdapat kendala SDM yang bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi sehingga menyulitkan dalam penginformasian pendapatan dan belanja secara akrual.